Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Berbasis Komunitas

Kajian Sosial - Antropologi
pada Masyarakat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek
Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Mohammad Adib, MA
Pujio Santoso

PMN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Kajian Sosial-Antropologi pada Masyarakat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Mohammad Adib
Pujio Santoso

PMN
2012

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Penulis : Mohammad Adib
Pujio Santoso
Design Sampul : Andi Cioyono
Layout : Kristiani Aditsetia S.Y
©2012, Surabaya

Diterbitkan pertamakali oleh :
CV. Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya 2012
Griya Kebraon Tengah XVII Blok FI/10, Surabaya
Telp. : 031 – 60909556, 92161344
Fax. : 031 – 7664673
E-mail : putramedia_nusantara@yahoo.co.id

Anggota IKAPI no.125/JTI/2010

ISBN 978-602-7508-03-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dicetak oleh C&R Digital Solution, Surabaya
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan (*empowering*) masyarakat bukan sekedar mengajak mereka untuk ikut terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, melainkan juga memerankan mereka sebagai subyek dalam memiliki dan mengontrol aktivitas-aktivitas program. Pihak luar dari masyarakat itu dapatlah dikatakan sekedar sebagai fasilitator. Sebagai subyek, maka dalam pemberdayaan telah mengasumsikan masyarakat sebagai pemilik dan penentu program itu sendiri. Melalui asumsi-asumsi tersebut, maka sesungguhnya pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan dengan maksud untuk melakukan penguatan dalam penyaluran nilai *(value transmitting)*, namun juga penyaluran daya cipta *(value creating),* dan daya kehendak *(value desiring)*. Berbagai komponen masyarakat di luar, hendaknya menempatkan kesadaran dirinya sebagai fasilitator, yang meniatkan diri untuk memfasilitasi para aktor di lokasi penelian ini untuk meningkatkan keberdayaan dan kemartabatannya sebagai manusia.

Penelitian yang dilakukan di wilayah sekitar hutan di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan FGD *(Focused Group Discussion)*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sidonganti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas—yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya, dan terutama moral. Krisis multidimensi merupakan faktor eksternal yang secara langsung atau melalui perantara telah menjadi bagian kehidupan di masyarakat itu. Dalam konteks ini, perilaku anomali dipandang sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa. Karenanya, dalam kondisi seperti ini—nyaris tidak perlu lagi membedakan perilaku baik dan tidak baik, legal atau illegal, normal atau tidak normal. Ibarat warna, sudah "abu-abu", merupakan campur-aduk dari warna merah, kuning, dan biru. Tidak penting lagi memilahkan secara jelas antara ketiga warna itu. Ibarat sakit, maka kondisinya sedang akut dan kritis. Saat menghendaki kembali sehat, maka tidak ada cara yang tepat, kecuali harus dilakukan "opname" kebudayaan. Perhatikan pandangan berikut tentang masyarakat di lokasi penelitian ini, "mereka dalam kondisi kosong pikiran (pendidikan), kosong hati (agama), kosong perut(kesejahteraan)nya."

Dalam opname kebudayaan, pertama-tama yang tidak boleh lupa adalah mengidentifikasi secara jelas bahwa masyarakat sebagai

subyek, telah terbukti bersungguh-sungguh memiliki keinginan untuk sehat. Dengan kata lain, hendaknya menyadari bahwa dirinya sedang dalam kondisi sakit (tidak sehat), sehingga tumbuh dalam dirinya sendiri seperangkat semangat, keinginan, dan kemauan untuk terbebas dari sakit yang dideritanya menuju kepada kehidupan yang sehat. Sejumlah identifikasi dan rancangan diagnosis telah diuraikan dalam buku ini

Penulis menyampaikan terima kasih yang seagung-agungnya kepada Pimpinan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur—juga Administratur dan Wakil Administratur di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban, sebagian bagian program kerja Seksi Komunikasi Sosial Biro Perlindungan SDH, yang membagikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk mengenal lebih dalam dari bagian masyarakat di Jawa Timur yakni Desa Sidonganti. Secara khusus juga berterima kasih kepada para Asper di BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mulyoagung Pak Rudi Hartono dan Ngulahan Pak Sarju.

Sejumlah pihak yang berkontribusi tinggi dalam kegiatan ini adalah Bupati Tuban Bapak KH. Fathul Huda dan Wabup Tuban Bapak Ir. H. Noor Nahar Husein yang telah menerima penulis di kantornya. Begitu pula teman-teman aktivis di lembaga keswadayaan masyarakat Tuban antara lain Drs. H. Ali Mansoer *(Mangrove Center)*, Bapak Nashir dan Mas Edy *(Tunggak Semi)*, Mas Edy Toyyibi *(Cagar Alam)*, Imam Suroso *(BC Center)*. Begitu pula Forkom LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Drs. Mujayyin (Tuban) dan Pak Frenky (Jatirogo). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ir. Wahyu Darmawan (PT Semen Gresik), Bapak Ahmad (Kades Sidonganti), dan Mas Ramu (Pemuda Sidonganti).

Akhirnya, "tiada gading yang tak retak," kata pepatah, maka tulisan inipun terdapat keretakan atau celah berupa kekurangan-kekurangan. Untuk melengkapinya adalah masukan dari para pembaca sangat diharapkan.

Surabaya, 10 Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

DAFTAR PETA DAN DIAGRAM VII

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 1
1.2. RUMUSAN MASALAH 5
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 6

BAB II 15
METODE PENELITIAN 15

BAB III 17
PROFIL DESA SIDONGANTI 17
3.1. SEJARAH 17
3.2. GEOGRAFI 19
3.3. DEMOGRAFI 25
3.4. PENDIDIKAN 28
3.5. KESEHATAN 29
3.6. KEADAAN SOSIAL 30
3.7. KEADAAN EKONOMI 32

BAB IV 33
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN 33
4.1. KEAMANAN HUTAN 33
4.1.3.1. IDENTIFIKASI DAN STRATIFIKASI PENCURIAN KAYU 42
4.1.3.2. MONITORING/EVALUASI PENCURIAN 43
4.1.3.2. STRATEGI PENGENDALIAN PENCURI KAYU 45

4.2. PENYELESAIAN TENURIAL 47
4.3. PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) 63
4.4. MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS . 80

BAB V 107
PENUTUP 107
5.1. SIMPULAN 107
5.2. SARAN 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 1. Luas Wilayah Desa Sidonganti, Persentase Terhadap Luas Kecamatan Kerek, dan Jarak ke Ibukota Kecamatan Kerek 23
Tabel 2. Luas Wilayah Desa Sidonganti Menurut Penggunaan Tanah (Ha) Di Kecamatan Kerek Tahun 2010 24
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 27
Tabel 4. Tamatan Sekolah Masyarakat di Desa Sidonganti..... 28
Tabel 5. Mata Pencaharian, Jumlah, dan Persentase Penduduk Desa Sidonganti 32
Tabel 6. Data Gangguan Keamanan Hutan Pencurian Pohon di Wilayah Perum Perhutani KPH Parengan 2006-2011 37
Tabel 7. Data Gangguan Keamanan Hutan Pencurian Pohon Di Wilayah BKPH Mulyoagung Perum Perhutani KPH Parengan..... 37
Tabel 8. Rekapitulasi Gangguan Keamanan Hutan KPH Jatirogo 38
Tabel 9. Data Gangguan Keamanan Hutan 5 Tahun Terakhir 2007 - 2011 KPH Tuban 38
Tabel 10. Strata Pencurian Kayu Jati di KPH Parengan Tuban 44
Tabel 11. Stratifikasi Permasalahan Tenurial di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban 50
Tabel 12 Rekapitulasi Konflik Tenurial Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2011 KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban Dalam Wilayah Perum Perhutani Unit Ii Jawa Timur 52
Tabel 13 Rekap Jenis Permasalahan Tenurial KPH Parengan Sampai dengan Bulan Juni 2010..... 53
Tabel 14. Rekap Tenurial Per BKPH Sampai dengan Bulan Juni 2010 53
Tabel 15 Upaya Penanganan Konflik Tenurial Yang Telah Dilakukan Oleh KPH Parengan,

Jatirogo, dan Tuban..... 58
Tabel 16. Sejarah Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa..... 66
Tabel 17. Nama LMDH Yang Sudah Berkoperasi
di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban..... 72
Tabel 18. LMDH Yang Sudah PKS dan Kategorinya
di KPH Parengan, KPH Jatirogo,
dan KPH Tuban Tahun 2009 72
Tabel 19. Daftar Nama-Nama LMDH
Yang Mendapatkan Sharing Produksi Kayu Tebangan
Tahun 2010 KPH Jatirogo 73
Tabel 20 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Sharing Produksi Kayu Tebangan Tahun 2010
KPH Tuban 74
Tabel 21 Perbandingan, Perkembangan, Kriteria LMDH
di KPH Jatirogo, KPH Parengan, dan KPH Tuban 81
Tabel 22. Road Map Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Komunitas di Kecamatan Kerek
Kabupaten Tuban 102

DAFTAR PETA DAN DIAGRAM

Peta 1. Dusun-dusun dan Desa Sidonganti serta Batas-batasnya 19
Peta 2. Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ... 21
Peta 3. Desa Sidonganti berada di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 22
Peta 4 Desa Sidonganti dalam Lingkup Perbatasan KPH Jatirogo, KPH Tuban dan KPH Parengan..... 26
Diagram 1. Strategi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

"Manusialah yang harus didahulukan, bukan Kapital." Begitu, pernyataaan Sjafrudin Prawiranegara dalam bukunya yang berjudul *Membangun Kembali Ekonomi Indonesia,* pada tahun 1966. Namun perjalanan pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi kini, lalai untuk melaksanakan pernyataan tersebut. Strategi pertumbuhan ekonomi (kapital) yang tinggi menjadi acuan penting dalam pembuatan kebijakan baik pada tingkat makro maupun mikro. Pilihan strategi pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kecondongan pemerintah pada negara-negara kapitalis, baik di Jepang, Amerika Serikat maupun beberapa negara Eropa. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah pada saat itu yang mengalami keterpurukan anggaran keuangan negara akibat ketidakstabilan keamanan dan politik di masa orde sebelumnya.

Paradigma pembangunan nasional ini sangat berpengaruh pada pilihan strategi pembangunan desa yang berorientasi pada target capaian dalam produksi padi per tahun. Kapitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan integrasi dengan pasaran internasional dilaksanakan melalui program *Bimas* (Bimbingan Masal). Eksperimen pemerintah untuk mempercepat pencapaian target produksi padi terus berkembang bahkan dengan melibatkan perusahaan asing CIBA (*Cyprus International Businesses Association*) serta melalui kelembagaan lain yang dibentuk pemerintah di tingkat desa, yakni Bimas Gotong Royong. Keterlibatan pihak asing tidak saja dalam hal penyediaan bibit unggul, pestisida, namun juga dalam hal penyalurannya ke tingkat petani dan pemberian kredit. Menurut UNDP (Reintjes, 1999), jika kecenderungan ini terus berlangsung, tidak mustahil akan menimbulkan ketidakberdayaan manusia.

Alih-alih mengubah strategi pembangunan khususnya di pedesaan, keterpurukan masyarakat pedesaan akibat kebijakan pembangunan nasional makin masif dan meluas, tidak hanya di wilayah Jawa namun juga di luar Jawa. Jika sebelumnya masyarakat pedesaan mampu mencegah terjadinya polarisasi (suatu proses mengkutubnya

masyarakat menjadi hanya dua lapisan, yakni lapisan petani komersial yang kaya dan lapisan buruh tani tunakisma—tanpa pemilikan lahan—yang miskin) melalui pranata sosial berupa ikatan-ikatan yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik dalam suatu pola hubungan patron-klien, namun kini hubungan sosial yang terjadi di pedesaan lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi yang dapat terperangkap kepada hanya hubungan transaksional.

Masuknya revolusi hijau ke Indonesia sejak tahun 1970-an, yang ditandai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian makin memarjinalkan sumber daya masyarakat pedesaan. Teknologi pertanian tradisional digantikan oleh teknologi modern yang tidak hanya mempercepat pekerjaan, namun juga mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam proses produksi. Menurut Hayami dan Masao Kikuchi (1987: 267), masuknya teknologi modern ke pedesaan menimbulkan dilema. Di satu pihak masuknya teknologi menghancurkan pranata-pranata tradisional yang berfungsi mencegah terjadinya polarisasi, namun di pihak lain tanpa teknologi modern perekonomian desa mengalami kemandegan (stagnasi). Hal ini juga telah dikaji oleh C. Geertz (1976) yang melihat masyarakat pedesaan di Jawa hanya mengalami perubahan yang bersifat ke dalam (involusi), sehingga kemiskinan yang dialami tidak makin berkurang tetapi malah makin merata (*shared poverty*).

Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian yang sangat dinamis, namun ironis bahwa pulau ini masih dihuni oleh penduduk miskin yang pada umumnya bermukim di sekitar hutan-hutan dan pedesaan. Redistribusi penduduk yang tidak seimbang menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, khususnya hutan (Sudarsono, 2007). Pada saat ini Pulau Jawa mengalami permasalahan yang sangat serius pada daya dukung ekologinya. Peristiwa bencana alam seperti banjir, tanah-longsor dan kekeringan, kini terjadi di mana-mana (Kartodihardjo et al. 2006a).

Pengelolaan sumber daya hutan dicirikan adanya pengelolaan asset terbuka, hubungan interaksi dan interdepensi antara sub sistem kehutanan (bersifat statis) dan sub sistem masyarakat (bersifat dinamis), dimana masing-masing sub sistem memiliki kemampuan dan kebutuhan dalam memper-tahankan eksistensinya.

Perkembangan kemajuan perekonomian secara global sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku Sosial Ekonomi dan Budaya (Sosekbud) masyarakat di sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan primernya juga harapannya terhadap kebutuhan yang bersifat sekunder maupun tersier. Mengingat kondisi semakin padatnya jumlah

penduduk, banyaknya pengangguran dan sempitnya lahan pertanian di desa sekitar hutan meng-akibatkan tekanan pada kawasan hutan yang diindikasikan adaya penurunan potensi sumber daya hutan.

Data dari Kemenhut (2003) menjelaskan bahwa dari 25.068 desa (30.351.371 KK) di seluruh wilayah Jawa-Madura terdapat 5.603 desa (22.35%) terletak di sekitar kawasan hutan. Di samping itu, terdapat 5.073 desa dengan: (i) 536.350 KK yang tinggal di wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor; (ii) 76.245 KK tinggal di daerah rawan longsor, tersebar di 1.970 desa; (iii) 2.744 rumah di bantaran sungai yang ditinggali oleh 3.055 KK berada di daerah rawan banjir bandang, yang tersebar di 257 desa; dan (iv) 457.060 KK tinggal pada daerah rawan bencana banjir tahunan (reguler) yang tersebar di 2.846 desa.

Kondisi masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan masyarakat desa yang tinggal di daerah-daerah pertanian yang subur. Kelangkaan aset tanah yang menjadi haknya untuk digarap, jauh dari sumber air, serta buruknya sarana infra-struktur yang menghubungkan antara masyarakat desa sekitar hutan dengan "dunia luar" menjadikan masyarakat desa tersebut tidak pernah dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Sejak pemerintahan Orde Baru, hutan telah dimanfaatkan untuk memperoleh dana pembangunan melalui eksploitasi secara komersial. Pemerintah melihat hutan adalah salah satu kekayaan alam yang mampu menghasilkan dana devisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dari sisi ekonomi makro, eksploitasi hutan secara besar-besaran dan intensif memang dapat meningkatkkan devisa, namun dari sisi mikro utamanya dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai masalah sosial-ekonomi dan ekologi. Kerusakan dan pengrusakan hutan tentu akan terjadi bukan saja oleh para pengusaha pemilik hak pengusahaan dan pengelolaan hutan, namun juga oleh masyarakat yang telah hidup sejak lama di sekitar hutan.

Kebijakan pembangunan kehutanan selama Orde Baru yang bersifat sentralistik telah dikritisi oleh banyak pihak tidak efektif menjaga kawasan hutan. Dengan sistem ini, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan kadangkala mereka justru dirugikan akibat kebijakan yang telah diambil pemerintah secara sepihak. Keterbatasan yang dimiliki pemerintah seperti kurangnya tenaga lapangan, sarana dan prasarana, serta dana,

telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan mengelola sendiri hutan yang sangat luas tersebut (Rahardjo dan Isnaini, 2006 dalam Waznah, 2009).

Seringnya konflik yang terjadi antara masyarakat desa di sekitar hutan dengan pihak pemerintah daerah maupun pengusaha pemegang hak pengusahaan hutan, tentunya harus ditemukan pe-mecahan yang bukan saja menguntungkan salah satu pihak saja, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi kelestarian tanaman dan kawasan hutan.

Masalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, mempunyai perbedaan sifat dan karakter antara Jawa dan Luar Jawa, sekalipun saat ini agak susah melihat perbedaan tersebut. Di luar Jawa, eksploitasi hutan yang secara tidak langsung diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha telah berlangsung sejak tahun 1970-an, dan dampaknya bukan saja kerusakan ekologi hutan, namun juga hak adat serta tradisi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan yang sangat tergantung hidupnya pada ekosistem hutan. Sementara itu masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa sekitar hutan yang ada di pulau Jawa lebih dikarenakan kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga "menggerogoti" area hutan yang berada di sekitarnya. Diharapkan dengan meletak-kan masyarakat sebagai kunci utama pembangunan, mereka akan secara aktif mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara optimal, sehingga dapat men-capai tujuan pengembangan lokal (Friedman, 1992 dalam Sawitri, 2006).

Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani masih rawan gangguan keamanan hutan. Hal ini mengakibatkan penurunan potensi sumber daya hutan yang cukup tajam. Akar masalah terjadinya gangguan keamanan hutan ini disebabkan dua faktor yaitu (i) eksternal dan (ii) internal (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 2011).

Pertama faktor eksternal gangguan keamanan hutan adalah (i) Lapar lahan (rata-rata kepemilikan lahan pertanian kurang dari 0,1 Ha); (ii). Sempitnya lapangan kerja, tingkat pendidikan rendah kemiskinan; (iii) Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, lokasi pemukiman berbatasan dengan hutan; (iv) Kebutuhan kayu yang semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan industri; (v). Adanya sindikat pencuri kayu; (vi) Adanya anggapan yang salah dari masyarakat bahwa hutan merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka; (vii). Budaya yang negatif seperti *molimo* (main perempuan, judi, minum-minuman keras, mencuri dan madat) masih kental dilakukan sebagian masyarakat desa terutama para pencuri kayu/bromocorah kayu; (viii).

Dengan adanya informasi global, tuntutan kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan meningkat.

Kedua, faktor internal gangguan keamanan hutan adalah (i) Keterbatasan personil pengamanan hutan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Para Mandor kebanyakan masih berfungsi ganda dimana selain menangani tanaman masih dibebani tugas lain; (ii). Keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan hutan, seorang mandor polhut yang mendapat beban mengamankan hutan ± 200 Ha, tidak mendapat sarana transportasi kendaraan bermotor dari perusahaan kecuali mereka mampu membeli sendiri; (iii) Keluasan areal wilayah hutan yang harus dijaga; dan (iv) Sistem pengamanan hutan masih belum terpadu dengan kegiatan kelola sosial (implementasi PHBM), apalagi pemahaman petugas dan masyarakat desa hutan tentang sistem PHBM masih beragam.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan model pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan di wilayah Tuban, Jawa Timur. Pemberdayaan dalam pengertian *enabling* (penciptaan lingkungan), *empowering* (penguatan), dan *protecting* (perlindungan) masyarakat bukan sekedar mengajak mereka untuk ikut terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, melainkan juga memiliki dan mengontrol seluruh aktivitas program. Pihak luar hanya sekedar menjadi fasilitator, sedangkan pemilik dan penentu program adalah masyarakat itu sendiri. Melalui pemberdayaan masyarakat tidak saja melakukan *value transmitting*, melainkan juga *value creating* (Sutrisno, 1997).

1.2. Rumusan Masalah

Secara lebih spesifik penelitian ini hendak mengkaji dan menemukan sejumlah jawaban atas pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peta-peta spasial sosial-ekonomi masyarakat desa Sidonganti?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam meningkatkan keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar?
3. Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam melestarikan hutan dan memberdayakan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi kondisi sosial budaya pada masyarakat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi akar permasalahan dalam perilaku perusakan dan pencurian kayu hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani di kawasan Desa Sidonganti.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan dan pemberdayaan dalam pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ssidonganti.
3. Menyusun model pemberdayaan masyarakat yang efektif di sekitar kawasan hutan.

1.3.3. Manfaat

1. Bagi Peneliti
2. Sebagai upaya atau wahana untuk mengaplikasikan metode etnografi dalam penelitian Antropologi.
3. Bagi Instansi
4. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi pemangku kepentingan *(stake holders)* tentang data peta spasial sosial-ekonomi masyarakat, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat, dan model pemberdayaan masyarakat Desa Sidonganti.
4. Bagi Peneliti Lain
   Menyediakan data pada peneliti selanjutnya tentang metode etnografi dalam Antropologi untuk menghasilkan metode yang lebih tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

1.4. Kerangka Teori

Pemanfaatan hutan sebagai upaya penerimaan devisa negara pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870. Melalui Undang Undang tersebut tanah yang belum dikuasai oleh rakyat dapat dijadikan tanah negara dan disewakan kepada pengusaha Belanda untuk menjadi perkebunan. Nampaknya upaya ini menarik banyak penanam modal Belanda untuk membuka lahan-lahan perkebunan di Pulau Jawa, menjadikan Indonesia, khususnya Pulau Jawa sebagai lumbung devisa bagi pembangunan di negeri Belanda (Mubyarto, dkk, 1992).

Kebijakan ini juga diteruskan oleh pemerintah Indonesia di masa Orde Baru dengan memberikan Hak Konsesi Hutan kepada pengusaha, khususnya di wilayah luar Jawa yang masih memiliki areal hutan yang luas, seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua. Melalui kebijakan ini bukan saja konflik yang terjadi melainkan juga kemiskinan dan marjinalisasi masyarakat desa yang tinggal di kawasan sekitar hutan.

Bagi para petani yang tinggal di kawasan tersebut melihat hutan bukan saja sebagai tempat menggantungkan kehidupan utamanya kebutuhan pangan (*food security*), namun juga sebagai cadangan bagi perluasan tanah garapan akibat peningkatan jumlah penduduk desa tersebut. Desakan pertumbuhan penduduk desa serta sistem warisan yang cenderung bersifat *fragmented* terhadap tanah, telah menjadikan *man-land ratio* semakin timpang. Oleh karenanya satu-satunya jalan adalah dengan membuka hutan sebagai lahan garapan untuk memenuhi ke-butuhan terutama pangan.

Jika di luar Jawa penduduk desa sekitar kawasan hutan dikepung oleh perusahaan yang memegang konsesi hutan, maka di Jawa penduduk desa di sekitar kawasan hutan dikepung oleh para pengusaha perkebun-an, baik swasta maupun BUMN dan Perusahaan Umum (Perum).

Kondisi dan situasi yang demikian ini dalam jangka panjang tidak menguntungkan, baik pemerintah, pengusaha, terlebih masyarakat desa. Minimnya tingkat pendidikan, ke-terampilan serta kemiskinan membuat mereka sulit untuk diajak mengembangkan diri keluar dari kemelut kemiskinan yang men-deranya.

Beberapa penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan kebanyakan melakukan kajiannya di luar Jawa, terutama yang terkait dengan hubungan antara masyarakat perbatasan hutan dengan pengusaha pemegang konsesi. Mubyarto, dkk. (1992) melakukan penelitian-nya di masyarakat desa kawasan hutan Jambi mengenai partisipasi masyarakat desa perbatasan dalam rangka pemberdayaan melalui program HPH Bina Desa. Program ini merupakan program pemerintah Indonesia yang dikeluarkan sejak tahun 1990, yang mengharuskan para pengusaha konsesi hutan untuk ikut membina pengembangan desa per-batasan hutan. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa temuan, di antaranya adalah bahwa pada awal-awal pencanangan program HPH Bina Desa banyak perusahaan yang belum siap melaksana-kan, khususnya kurang mampunya petugas perusahaan dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini bisa terjadi karena

adanya kesalahan (baca: perbedaan) dalam menafsirkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan merupakan konsep yang melihat salah satu kelompok dalam masyarakat mengalami suatu situasi yang tidak setara bahkan terpuruk dibandingkan kelompok lainnya. Oleh sebab itu kelompok yang mampu, diwajibkan secara moral untuk mengajak kelompok yang terpuruk tersebut untuk dapat berdiri sejajar dengan kelompok lainnya melalui kekuatan dan kondisi nyata yang dimilikinya. Sekalipun berbeda secara esensial, pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari konsep partisipasi. Acapkali partisipasi yang dimaksud adalah dilibatkan-nya warga masyarakat dalam berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pihak lain. Ini adalah konsep partisipasi yang tidak mengarah pada pemberdayaan, sebab dalam konsep pemberdayaan partisipasi, yang dimaksud meliputi aspek perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang kesemuanya melibatkan warga masyarakat sebagai pemilik hak, dan bukan sekedar melibatkan masyarakat pada satu atau beberapa aspek saja sementara aspek lainnya dikendalikan oleh pihak luar.

Analisis yang dilakukan oleh Mubyarto, dkk. (1993) pada beberapa penelitiannya di masyarakat desa perbatasan di Sumatera juga melihat lemahnya pemahaman konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sekalipun sudah dimasukkannya aktivitas monitoring dan evaluasi dalam program tersebut, namun kedua kegiatan ini dipegang oleh Instansi Kehutanan dan masyarakat setempat tidak dilibatkan.

Keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat desa dan program pem-bangunan secara umum bisa dilihat dari banyaknya program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan itu kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Pedesaan tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang mengamanatkan bahwa pembangunan masyarakat desa perlu terus ditingkatkan terutama melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, sehingga mereka mampu untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksinya, serta mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Kebijakan pembangunan desa ditujukan untuk meniadakan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat desa.

Kebijaksanaan pembangunan desa ini diimplementasikan melalui program-program pembangunan desa. Program pem-bangunan desa

tersebut meliputi program bantuan pembangunan desa yang diberikan pada tiap-tiap Pelita, dalam jumlah yang terus meningkat. Pada tahun 1969/1970 bantuan itu sebesar Rp.100.000, pada tahun 1974-1975 bertambah menjadi Rp.200.0000, menjadi Rp.350.000 pada tahun 1975/1976. Pada tahun 1979/80 menjadi Rp.650.000, pada tahun 1981/1990 naik men-jadi Rp.2.500.000 dan sekarang sudah mencapai Rp.3.500.000 setiap desa atau kelurahan (Maschab, 1994:54).

Selain Program Bantuan Desa kita juga dikenal program PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu). Program ini secara langsung menangani desa-desa dalam satu kawasan yang mempunyai masalah khusus (kawasan setingkat Kecamatan). Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan yang belum terjangkau oleh program pembangunan maupun hasil-hasilnya. Permasalahan desa terpencil, desa perbatasan dan desa yang jarang penduduknya diatasi melalui program ini. Secara teknis, program ini diisi dengan kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan dasar serta kegiatan lainnya.

Program pembinaan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) meliputi: (a) peningkatan keterampilan aparatur kecamatan, termasuk Camatnya; dan (b) penyelenggaraan diskusi UDKP untuk menyusun pola pengembangan wilayah kecamatan dan rencana pembangunan tahunan kecamatan.

Peningkatan Swakarya dan Swakarsa masyarakat merupakan upaya untuk mengubah masyarakat desa dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) beserta sepuluh program pokoknya, pembinaan dan pemantapan fungsi LKMD dan Pengembangan dan Pembentukan Kader Pembangunan Desa (PPKPD). Terkait dengan program itu dilakukanlah kegiatan Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), Pemukiman kembali penduduk, pembinaan Usaha Ekonomi Desa (UED), pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD), pengembangan perkreditan desa dan sebagai-nya (lihat Soehoed, 1994:42-52).

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan pembangunan pedesaan seperti tersebut di atas, namun pada tingkat pelaksanaannya, apalagi melihat jenis, bentuk dan sifatnya, sungguh sangat membingungkan. Di lapangan, kebijakan pemerintah berubah menjadi "belantara program pembangunan pedesaan". Hal ini disebabkan hampir semua departemen mempunyai program yang berkaitan dengan masyarakat dan daerah pedesaan, misalnya Depdagri,

Depkes dan BKKBN terlibat dalam program-program KB, Posyandu, UPGK dan berbagai program lainnya. Departemen Pekerjaan Umum dengan program Pemugaran Perumahan Pedesaan, DEPHANKAM dengan program ABRI manunggal, Kejaksaan dengan program Jaksa Masuk Desa, Departemen Kehakiman gerakan Kadarkum. Program-program tersebut ada yang bersifat fisik, sebagian lagi bersifat non-fisik.

Sungguhpun program-program pembangunan pedesaan itu berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan, akan tetapi kebanyakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dipersoalkan karena dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak menguasai tanah, dan kurang pendidikan (Lihat Mubyarto, 1984: 6-7, lihat juga Mubyarto dan Kartodirdjo, 1988: l0-l l).

Dalam nada yang sama **Chambers (**1987: 17-32) mempersoal-kan adanya enam prasangka yang menghinggapi para peneliti, petugas lapangan, ataupun kaum profesional yang menjadi wisatawan pembangun-an desa. Keenam prasangka itu adalah (i) prasangka keruangan, (ii) prasangka proyek, (iii) prasangka kelompok sasaran, (iv) prasangka musim kemarau, (v) prasangka diplomatis, dan (vi) prasangka profesional. Keenam prasangka ini merintangi hubungan seseorang dengan kemiskinan di pedesaan.

Pertama, prasangka keruangan meliputi prasangka kota, jalan raya dan terminal. Prasangka ini nampak pada proyek-proyek pembangunan desa, kunjungan-kunjungan wisatawan pembangunan desa yang cenderung memilih lokasi yang dekat ke kota, apalagi kalau ada kendala biaya, dekat dengan jalan raya dan terminal. Prasangka ini menutupi problem kemiskinan pedesaan yang acapkali tersembunyi jauh di balik kota, jalan raya maupun terminal.

Kedua, prasangka proyek mengacu pada kecenderungan para wisatawan pembangunan desa, tak terkecuali para peneliti, untuk hanya melihat proyek-proyek percontohan terkesima atas kebaikan koordinasi kepemimpinannya, keindahannya dan lain-lain, sehingga suatu kunjungan atau penelitian lebih banyak berkaitan dengan proyek itu dan mengabaikan penduduk miskin.

Ketiga, prasangka kelompok sasaran meliputi prasangka kelompok elite, kelompok laki-laki, pemakai jasa dan penerima gagasan baru, mendahulukan orang-orang yang aktif dan hidup. Kelompok elite pedesaan mengacu pada mereka yang mampu dan lebih berpengaruh. Mereka terdiri dari petani progresif, tokoh masyarakat, kepala desa, pedagang, pemuka agama, guru dan sejenisnya. Mereka inilah yang paling banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di desanya, mereka juga

yang sering menjadi informan bagi peneliti, mereka pula yang mengemukakan kepentingan dan keinginan "masyarakat desa". Penduduk miskin tidak membuka mulut, bahkan duduknya pun di belakang atau di pinggiran.

Keempat, musim. Selalu berargumen sedang musim paceklik atau musim hujan; *Kelima,* diplomatik yang tidak mau mendekati golongan miskin dengan alasan takut menyinggung; dan *keenam* profesional, dengan alasan tidak sesuai dengan bidang keahlian-nya.

Uphoff (1988) menekankan perlunya melibatkan partisipasi penduduk miskin dalam proyek-proyek pembangunan pedesaan. Dengan meng-gunakan contoh kasus pembangunan pedesaan di Nepal, Ghana dan Meksiko, Uphoff mengingatkan agar partisipasi penduduk tidak dijadikan sebagai slogan, tapi para perencana pembangunan pedesaan mampu membangkitkan partisipasi, memerinci siapa yang berpartisipasi, bagaimana mereka dapat berpartisipasi, dan sejauh mana mereka dapat berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau proyek. Berdasarkan pengalaman yang dikumpulkan dari tiga proyek di atas, Uphoff menyebutkan lima cara untuk menjamin partisipasi penduduk miskin dalam rancangan dan pelaksanaan proyek. Kelima cara tersebut adalah (1) sejak semula memperjelas taraf partisipasi yang dikehendaki masyarakat (2) harus ada tujuan yang jelas dan realistis (bagi masyarakat miskin) mengapa mereka harus berpartisipasi, (3) harus memanfaatkan organisasi setempat. Jika tidak ada maka bisa dirancang suatu organisasi yang sesuai dengan budaya setempat, (4) mesti ada komitmen keuangan yang terpisah, yang memadai untuk partisipasi, dan (5) mesti ada rencana untuk bersama-sama memikul tanggung-jawab pada semua tahap siklus proyek (Cernea,1988: 457-458).

Konsep pemberdayaan menurut Sutrisno (1997) adalah mengembangkan kondisi yang dapat mengembangkan masyarakat desa sebagai manusia. Hal itu menyangkut pandangan tentang manusia yang tidak sekedar sebagai "*value transmitting*", namun juga "*value creating*". Artinya manusia tak hanya menjadi obyek keputusan dari atas, namun menjadi subjek yang mampu menentukan nilai-nilai serta apa yang baik bagi diri mereka itu sendiri.

Dalam konteks kebudayaan, karakter positif masyarakat perlu secara terus menerus untuk ditumbuhkembangkan dengan tiga tahapan membangun karakter positif anak bangsa yang seharusnya menjadi tanggungjawab para pemangku kepentingan *(stake holders)* institusi pendidikan, yakni (1) sebagai pembangun kembali karakter bangsa *(character builder).* Di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, kemudian

ditambah dengan sejumlah erosi karakter positif bangsa dan adanya gejala amplifikasi atau penguatan mentalitas negatif, seperti malas, koruptif dan sebagainya. Peran *character builder* ini tentunya sangat berat, namun esensinya adalah adanya kemauan keras dan komitmen untuk menjunjung nilai-nilai moral dan berupaya menginternalisasi-kannya pada kegiatan dan aktifitas sehari-hari. (2) Sebagai pemberdaya karakter *(character enabler).* Pembangunan kembali karakter bangsa tentunya tidak akan cukup, jika tidak dilakukan pemberdayaan secara terus menerus. Bentuk praktisnya adalah kemauan dan hasrat yang kuat untuk menjadi *role model* dari pengembangan karakter bangsa yang positif. Peran ini juga tidak kalah beratnya dengan peran yang pertama, karena dibutuhkan adanya kekuatan untuk terlibat dalam suatu ajang konflik etika dengan entitas lain di masyarakat, bagaimana para pemangku kepentingan mampu menjadi *role model*s dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi role model bagi masyarakat. (3) Sebagai perekayasa karakter *(character engineer).* Peran yang terakhir ini menuntut untuk terus menerus melakukan pembelajaran. Harus diakui bahwa pengembangan karakter positif bangsa, bagaimanapun juga, menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Para pemangku kepentingan harus menjadi sumber perekayasa karakter agar hasil rekayasa sejalan dengan nilai-nilai positif yang ditumbuhkembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Listiyono dan Mohammad Adib:2011).

Penelitian yang dilakukan Oleh Purwita Dkk (2009) tentang *Analisis Keragaman Ekonomi Rumah Tangga: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Pangalengan Bandung Selatan* menyaran-kan *Pertama,* perlu dilakukan penggalian pengetahuan dan kearifan lokal di tingkat mikro untuk melandasi kebijakan pembangunan makro. Kegagalan pembangunan sering diakibatkan karena realitas persoalan di level mikro banyak diabaikan. *Kedua,* perlu dilakukan penguatan kelembagaan di level mikro, diantaranya pemberdayaan kelembagaan koperasi/lembaga ekonomi rakyat yang bisa membangun *added-value* bagi hasil-hasil produksi petani, di samping kelembagaan KTH dan LMDH.

1.5. Kerangka Konsep

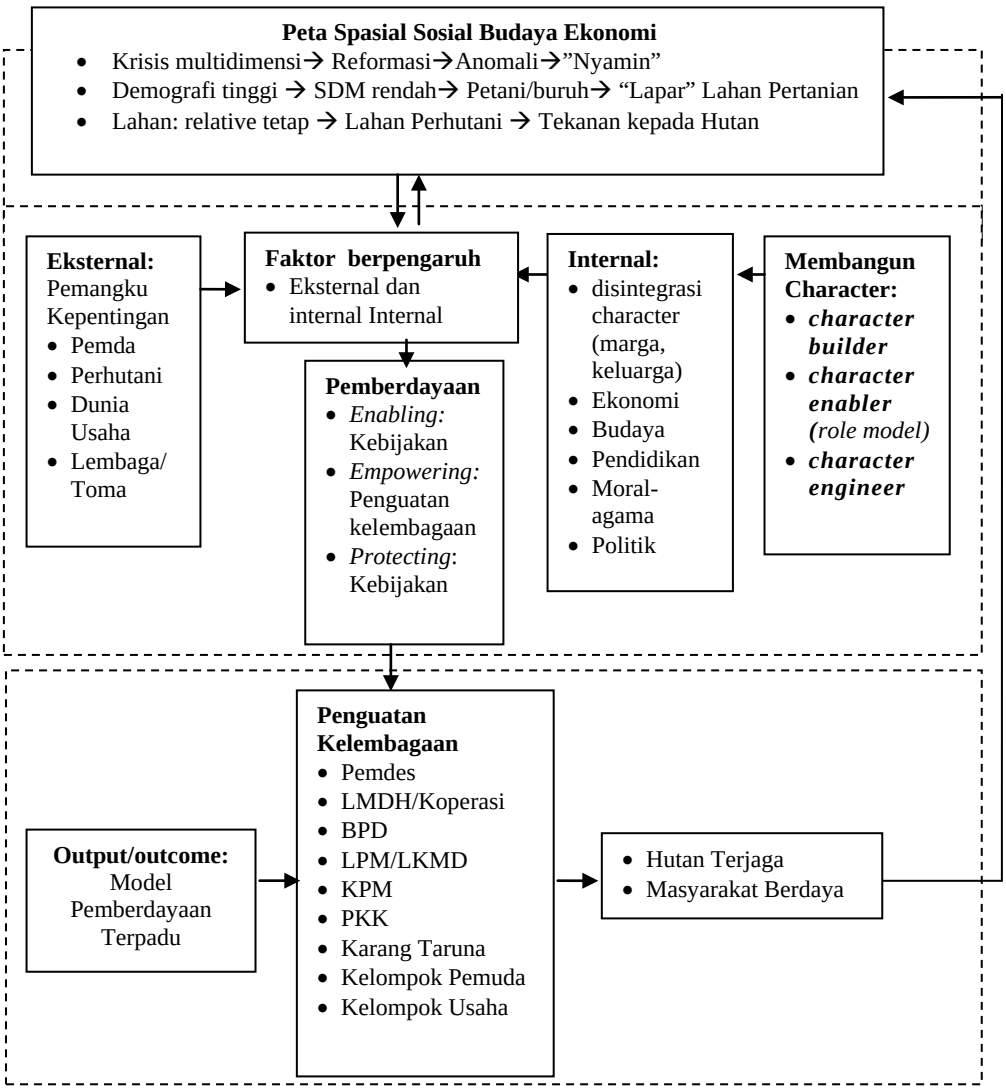

BAB II
METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Desa Sidonganti merupakan salah satu desa di Tuban yang ber-batasan dengan wilayah KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Tuban, Parengan, dan Jatirogo. Desa Sidonganti terdiri dari tiga pedukuhan yakni Dukuh Tegal Guwo, Sidonganti, dan Dukuh Soco.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yakni wawancara, pengamatan terlibat serta FGD *(Focused Group Discussion)*. Wawancara dilakukan kepada informan dari tiap-tiap dusun yang dipilih secara acak sederhana, serta melalui beberapa informan yang dipandang mengetahui tentang kondisi sosial-ekonomi dan budaya setempat. Sementara itu pengamatan terlibat juga dilakukan untuk melihat aktivitas sehari-hari warga desa terutama yang dapat memberi petunjuk penting mengenai potensi dan penghambat upaya pemberdayaan dalam pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Melalui kedua cara pengumpulan data tersebut dapat diperoleh peta potensi masyarakat desa Sidonganti serta berbagai faktor penghambat upaya pemberdayaan dan pelestarian hutan.

Melalui FGD diperoleh data yang lebih memperkuat temuan data dari hasil wawancara dan pengamatan. Metode FGD dilakukan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda serta aparat pemerintahan di dalam lingkungan dan di luar lingkungan Desa Sidonganti. FGD juga dilakukan kepada para ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) di desa yang berbatasan dengan Desa Sidonganti antara lain Desa Guwo Terus, Desa Trantang, Desa Gemulung, dan Desa Tengger Wetan. Selain itu FGD juga dilakukan dengan para petugas Perhutani di lingkungan KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban. Teknik FGD dilakukan melalui panduan diskusi yang dipimpin oleh seorang fasilitator dari peneliti. Diskusi diarahkan pada pemetaan potensi, kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa, baik yang berkaitan dengan internal desa maupun eksternal desa tentang pembedayaan. Kemudian mereka diajak untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk memecahkan masalah penguatan kelembagaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, dan melestarikan hutan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan diskusi tersebut di atas, dilakukan analisis yang mengarah pada penemuan model-model pemberdayaan yang mendasarkan pada karakteristik sosial budaya di Desa Sidonganti. Model adalah kerangka berpikir sistematis untuk menjawab suatu permasalahan. Model berbentuk tahapan atau bagan kerangka analisis yang memiliki elemen-elemen, peran dari masing-masing elemen serta hubungan antar elemen yang tersusun dalam *road map* (peta jalan) dalam Tabel 22.

BAB III
PROFIL DESA SIDONGANTI

3.1. Sejarah

Desa Sidonganti, sebagaimana desa-desa lainnya, memiliki sejarah dan asal usul kehidupan masyarakat dan desanya. Sejarah dan asal muasal desa, seringkali tertuang dalam dongen-dongeng atau legenda yang dituturkan secara turun temurun dan disampaikan dari mulut ke mulut. Sehingga dalam banyak hal, tidak mudah untuk membuktikan kebenarannya sebagai suatu kenyataan.

Dongeng asal muasal Desa Sidonganti diantaranya yang paling popular adalah sebagaimana dituturkan oleh salah seorang warga yang tinggal di situ yakni Mbak Kaimin. Pada zaman dahulu, terdapat dua orang wali yaitu yang pertama Bagong (yang disebut guru) dan yang kedua Lempar (yang disebut murid). Setiap hari kedua orang tersebut bekerja sebagai pemburu hewan hutan sekaligus sebagai hobinya. Di suatu hari kedua orang tersebut berangkat berburu ke hutan di daerah Ndelong (*Alas Ndelong*). Kedua orang wali ini yakni mbah Bagong dan Lempar berhasil menangkap seekor menjangan. Hasil tangkapan itu ingin segera dibawa pulang ke kampung halaman(tempat tinggal)nya. Namun muridnya yang bernama Lempar sudah tidak tahan lagi untuk menahan rasa lapar—telah beberapa jam perjalanan di hutan dan sudah tidak tahan lagi untuk segera menikmati hasil buruannya.

Saat itu sang guru Bagong dan muridnya Lempar sudah mengambil dan mengumpulkan ranting-ranting kayu dan rumput ilalang yang sudah mengering di areal hutan itu untuk segera dapat membakar (memasak) hasil buruannya. Pada saat itu belum mengenal yang namanya korek api—apalagi berbahan gas seperti sekarang, yang sangat mudah diperoleh dipasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Lempar sempat kebingungan untuk menyalakan kayu dan rumput ilalang yang telah disediakan tersebut. Lalu mbah Bagong mengerjakan sesuatu untuk maksud tersebut. Tidak seperti umumnya orang, mbah Bagong dapat menyalakan dan membakar barang tersebut dengan menggunakan air liur (ludah) yang dikeluarkan dari mulutnya, untuk membuat sumber api.

Kedua orang ini bertempat tinggal di suatu lokasi yang bernama Banjarejo (Mbanjar) dan mempunyai sebidang ladang yang kemudian diberi nama Sidonganti. Setiap mereka membutuhkan lauk-pauk, tempat

yang dekat dan dapat segera dijangkau yakni Sidonganti (*sido*=segera atau jadi). Jadi Sidonganti merupakan suatu wilayah ladang dan Banjarejo (Mbanjar) tempat yang jauh—pada saat itu dari upaya untuk memperoleh lauk-pauk. Saat mereka mengharapkan atau menginginkan lauk pauk dan atau sesuatu hal maka mereka datang ke Sidonganti untuk memperoleh lauk-pauk atau makanan. Dari daerah Tambakboyo, akhirnya mereka berpindah dan bertempat tinggal di Sidonganti.

Pada perkembangannya, terjadilah sebuah desa Sidonganti ini yang terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Tegal Guwo, Sidonganti dan Soco. Dinamakan Sidonganti, karena Sido (*Jawa*: jadi, nyata) dan *nganti* artinya menunggu. Sidonganti berarti jadi menunggu. Untuk mengenang peristiwa itu dan manandai wilayah itu akhirnya para leluhur memberi nama wilayah itu dengan sebutan Sidonganti.

Pemilahan dalam tiga dusun di Desa Sidonganti ini telah ditetapkan sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Tiga dusun itu adalah Dusun Tegal Guwo, Dusun Sidonganti (Ibukota Desa), dan dusun Soco. Tiap dusun dipimpin oleh seorang Kasun yang dibantu oleh Bayan, Petengan, Kamituwo dan Jogoboyo. Dalam perkembangan zaman, ketiga dusun tersebut dirangkum dalam satu kesatuan administratif yakni Desa Sidonganti sampai saat ini (Lihat Peta 1).

Pada zaman menjelang dan kemerdekaan penetapan desa tersebut dilanjutkan sampai sekarang dan telah mengalami enam kali pergantian kepemimpinan desa (Kades=Kepala Desa) atau Petinggi (orang Sidonganti menyebutnya sebagai *Pak Inggi*, yakni (i) tahun 1940-1950 dipimpin oleh Sudadi; (ii) pada tahun 1950-1977 dipimpin oleh Darsimin; (iii) pada tahun 1977-1990 dipimpin oleh Adji Munari; (iv) pada tahun 1990-1999 dipimpin oleh Sarmidi; (v) pada tahun 1999-2007 dipimpin oleh Tamsul; dan (vi) tahun 2007 sampai sekarang dipimpin oleh Ahmad.

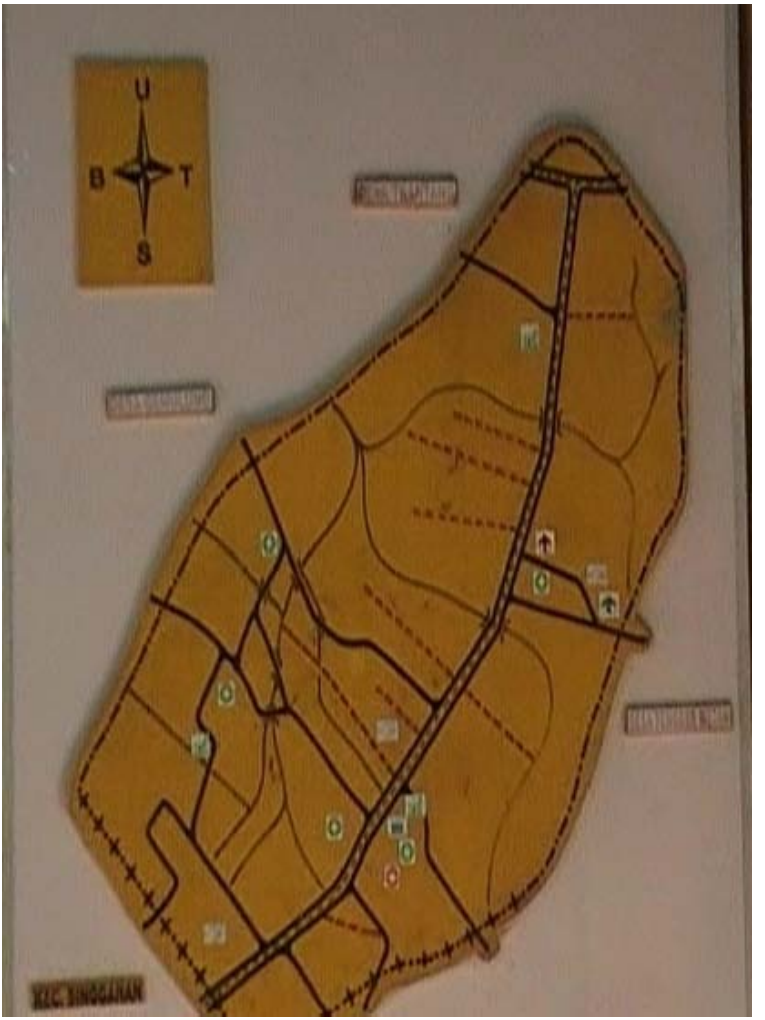

Peta 1 Dusun-Dusun dan Desa Sidonganti serta Batas-batasnya

3.2. Geografi

Wilayah Desa Sidonganti terdiri dari tiga Dusun, yaitu: Tegal Guwo, Sidonganti, dan Soco, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun). Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas dari desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sidonganti, dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah administrasi Desa Sidonganti ini adalah 716,40 Ha. Luas desa tersebut terdiri dari areal lahan yang digunakan untuk sawah (40.10 ha), ladang (620 ha) dan lain-lain seluas

56,3 ha. Sehingga jumlah lahan sawah dan ladang di Desa sidonganti 660.10 ha (BPS Tuban 2011, Lihat Tebel 2). Jumlah lahan tersebut apabila dibagi dalam 1557 KK penduduk desa sidonganti maka rata-rata lahan perKK adalah 0,42 ha.

Secara administratif, Desa Sidonganti terletak di wilayah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kerek di antara 12 Kecamatan di Kabupaten Tuban. Kecamatan-kecamatan yang membatasi wilayah administratif Kecamata Kerek adalah Kecamatan Tambakboyo di sebelah Utara, Kecamatan Merakurak di sebelah Timur, Kecamatan Montong sebelah Selatan, dan Kecamatan Bangilan di sebelah Barat (Lihat Peta 2)

Desa Sidonganti juga dibatasi oleh wilayah administratif oleh wilayah desa-desa tetangga. Desa-desa pembatas administrasi itu adalah: (i) Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trantang; (ii) Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gemulung; (iii) Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Guwo Terus; dan (iv) Di sisi Timur berbatasan dengan Tengger Wetan (Lihat Peta 2).

Luas wilayah Desa Sidonganti berjumlah 7,17 km dengan 6,55 persen dibandingkan dengan luas keseluruhan wilayah Kecamatan Kerek. Aksesibilitas jarak tempuh desa Sidonganti ke Ibukota Kecamatan Kerek adalah 13,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Tuban adalah 32 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit (Lihat Tabel 1.). Aksesibilitas jarak tempuh tersebut dapat dijangkau melalui sarana jalan yang sudah dibangun dengan bahan cetakan *(hotmix)*. Sehingga desa ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan lancar kecuali beberapa ruas jalan yang perlu perbaikan, karena sarana jalan di situ sebagian sudah mengelupas. Kondisi jalan yang demikian juga telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Tuban saat berkunjung ke Desa Sidonganti dalam acara Jumatan di Masjid Desa itu pada tanggal 16 Maret 2012.

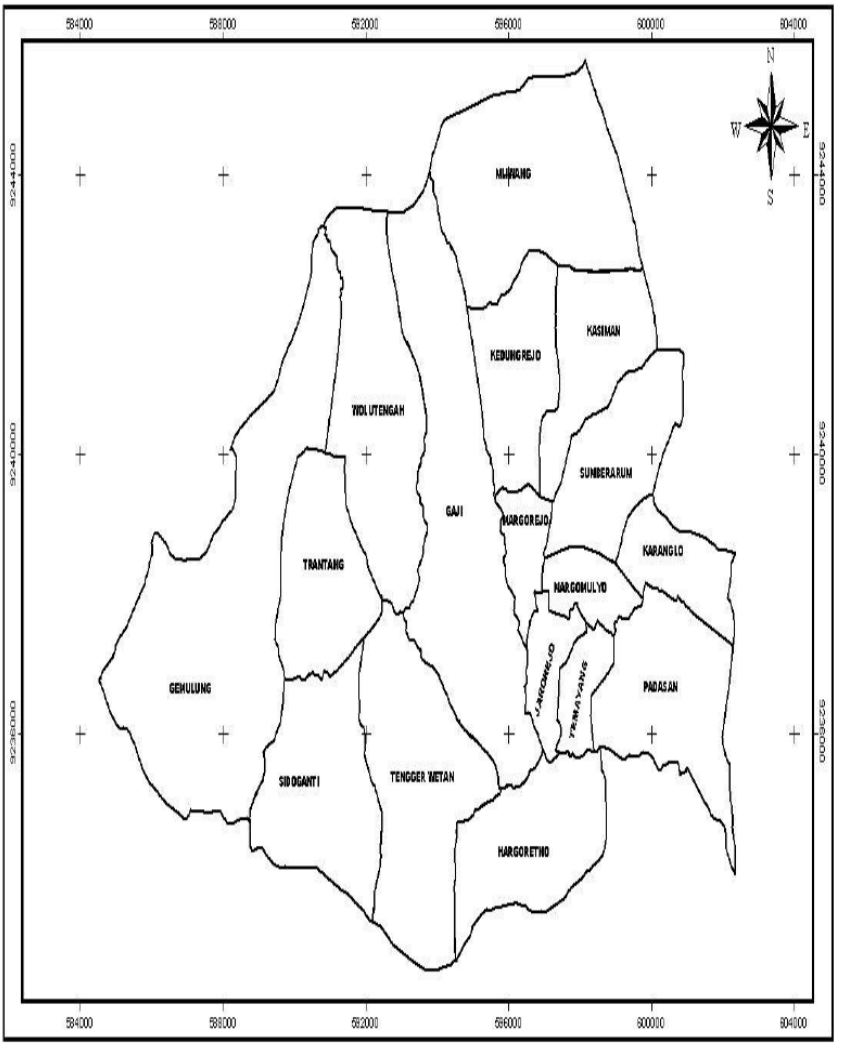

Peta 2. Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Sumber: BPS Tuban, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011

Peta 3 Desa Sidonganti Berada di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Sumber: Monografi Kecamatan Kerek, 2012

Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ini secara geografis juga terletak di perbatasan tiga KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu KPH Jatirogo, KPH Tuban dan KPH Parengan. Dengan kata lain, Desa Sidonganti merupakan wilayah yang dilingkupi oleh pengelola hutan dalam segitiga KPH tersebut. Lebih terperinci, wilayah yang bersinggungan langsung dengan desa ini adalah dari (i) KPH Parengan

yaitu RPH Mulyoagung dan RPH Guwoterus BKPH Mulyoagung; (ii) KPH Jatirogo RPH Tuwiwiyan BKPH Bahoro; dan (iii) KPH Tuban RPH Simbatan dan RPH Nglonde, serta BKPH Kerek (Lihat Peta 4).

Tabel 1.
Luas Wilayah Desa Sidonganti, Persentase Terhadap Luas Kecamatan Kerek, dan Jarak ke Ibukota Kecamatan Kerek

No	Desa	Luas Wilayah (Km ^{2})	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)	Jarak Ke Ibukota Kecamatan (Km)
1	Gemulung	9,48	8,66	13,5
2	Wolutengah	8,84	8,07	7,3
3	Trantang	4,70	4,29	12,3
4	Sidonganti	7,17	6,55	13,5
5	Tegger Wetan	8,08	7,38	8,8
6	Hargoretno	5,35	4,89	4,4
7	Temayang	3,53	3,22	2,0
8	Padasan	5,95	5,43	2,2
9	Karanglo	3,69	3,37	4,5
10	Sumber Arum	7,14	6,52	3,0
11	Margo Mulyo	3,85	3,52	0,7
12	Jarorejo	6,42	5,86	0,6
13	Margorejo	4,92	4,49	2,0
14	Gaji	8,93	8,16	5,3
15	Kedungrejo	8,95	8,17	3,2
16	Kasiman	5,67	5,18	4,1
17	Mliwang	6,83	6,24	7,3
Jumlah :		**109,5**	**100**	

Sumber: BPS Tuban, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011

Iklim suatu daerah sangat dipengaruhi sekali oleh letak, tinggi tempat, temperatur serta faktor hujan. Topografi wilayah Sidonganti, berupa dataran sedang dengan berketinggian sekitar 56 meter (antara 24–320) diatas permukaan air laut (dpl). Sedangkan suhu ± 25,9 - 32 o C dan curah hujan bulan tertinggi 537 mm, dan bulan terendah 160 mm. Desa Sidonganti terletak di daerah dengan musim kemarau yang jelas, berlangsung sekitar empat bulan yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Pada musim kemarau ini, tidak dapat dilakukan kegiatan pertanian polowijo sehubungan dengan keterbatasan air. Pada musim kemarau, di wilayah desa ini, sejauh mata memandang hanyalah berpapasan dengan bebatuan berwarna putih. Sedangkan pada musim penghujan boleh dikatakan jumlah hujan yang mencapai maksimum jatuh pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Pada musim

hujan seperti ini dilakukan penanaman *tumpangsari* dan *polowijo,* berupa tanaman jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau.

Tabel 2.
Luas Wilayah Desa Sidonganti Menurut Penggunaan Tanah (Ha)
Di Kecamatan Kerek Tahun 2010

No	Desa	Sawah	Ladang	Lainnya
1	Gemulung	49.10	810.00	92.10
2	Wolutengah	48.20	1038.00	251.00
3	Trantang	42.40	362.00	64.90
4	Sidonganti	40.10	620.00	56.30
5	Tegger Wetan	188.00	566.00	53.10
6	Hargoretno	142.00	350.00	42.70
7	Temayang	98.90	442.00	62.90
8	Padasan	146.00	263.00	20.80
9	Karanglo	49.70	239.00	79.20
10	Sumber Arum	75.00	439.00	199.00
11	Margo Mulyo	207.00	99.90	73.50
12	Jarorejo	179.00	228.00	101.00
13	Margorejo	169.00	255.00	67.800
14	Gaji	256.00	463.00	94.70
15	Kedungrejo	101.00	681.00	164.00
16	Kasiman	85.90	370.00	110.00
17	Mliwang	62.10	400.00	120.00
Jumlah:		**1,936.40**	**7,626.90**	**1,653.00**

Sumber: BPS Tuban, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011

Areal tanah hutan di wilayah Sidonganti pada umumnya merupa-kan wilayah kritis berupa bukit–bukit pegunungan kapur dan beriklim D (menurut Smith & Ferguson) yang memungkinkan musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Wilayah desa hutan Sidonganti ini merupakan wilayah di bagian Tuban Barat yang umumnya terlihat areal yang gundul, terutama pada kurun lebih dari 15 tahun terakhir.

Adapun dari aspek administratif kependudukan, wilayah Desa Sidonganti ini diperoleh gambaran tentang demografi, pendidikan, kesehatan, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi sebagai berikut.

3.3. Demografi

Data administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2010, jumlah penduduk Desa Sidonganti terdiri dari 1557 KK, dengan jumlah total 4.330 jiwa, dengan rincian 2.150 laki-laki dan 2.180 perempuan sebagaimana tertera berdasarkan usia dapat dilihat dalam Tabel 3.

Dari jumlah 1.557 KK diatas, sejumlah 702 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 800 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 50 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 02 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 3 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50 % KK Desa Sidonganti adalah keluarga miskin.

Dari Tabel 3 tersebut nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 21–50 tahun Desa Sidonganti berjumlah 1.912 atau hampir 60 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi penyediaan tenaga produktif dan SDM.

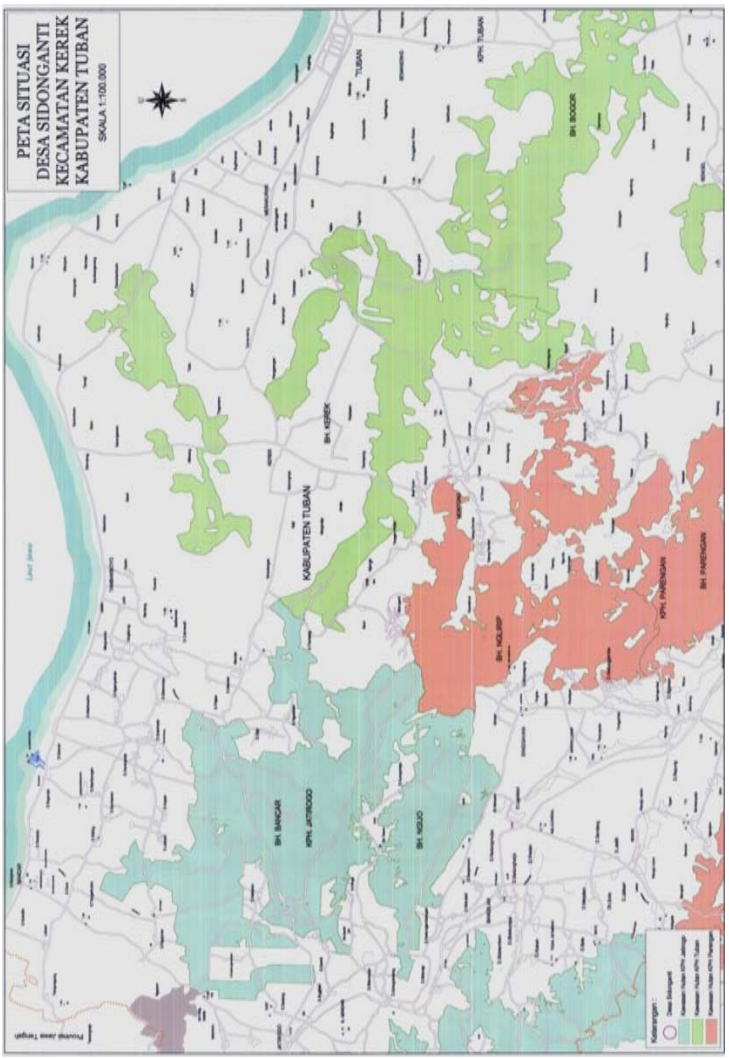

Peta 4. Desa Sidonganti dalam Lingkup Perbatasan KPH Jatirogo, KPH Tuban dan KPH Parengan

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Sidonganti Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	0 – 5	151 orang	3,49 %
2	6 – 10	251 orang	5,80 %
3	11 – 15	273 orang	6,30 %
4	16 – 20	335 orang	7,75 %
5	21 – 25	379 orang	8,75 %
6	26 – 30	402 orang	9,28 %
7	31 – 35	409 orang	9,44 %
8	36 – 40	410 orang	9,47 %
9	41 – 45	398 orang	9,20 %
10	46 – 50	311 orang	7,20 %
11	51 – 55	256 orang	5,91 %
12	56 – 60	162 orang	3,74 %
13	>61	493 orang	11,39%
Jumlah Total		**4.330 orang**	**100%**

Sumber: RPJM Desa Sidonganti 2010-2014 Tahun 2011

Pola penggunan lahan di Desa Sidonganti lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan mengandalkan penggunaan pengairan tadah hujan.

Aktivitas mobilisasi di Desa Sidonganti cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian palawija maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dirasakan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Permasalahan mendasar yang dialami masyarakat Sidonganti antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa ini kurang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, misalnya keberadaan lahan pertanian yakni tanah persil yang di bawah pengelola Perum Perhutani—yang luas di Desa Sidonganti belum mampu mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai, mengandalkan tadah hujan, serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang masih sangat terbatas. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya

masih di bawah garis kemiskinan. Lihat data di atas lebih 50 % KK Desa Sidonganti adalah keluarga miskin.

3.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian suatu masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan kemandirian masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga dapat memudahkan untuk mengentaskan dirinya dari belenggu pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Jumlah dan persentase tingkat pendidikan Desa Sidonganti dapat dilihat pada Tabel 2 Berikut ini:

Tabel 4
Tamatan Sekolah Masyarakat di Desa Sidonganti

No.	Tamatan Sekolah	Jumlah	Persentase
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun ke atas	2230 orang	50 %
2	Pra-Sekolah	52 orang	1,20 %
3	Tidak Tamat SD	893 orang	21 %
4	Tamat Sekolah SD	1.026 orang	24 %
5	Tamat Sekolah SMP	103 orang	2,38 %
6	Tamat Sekolah SMA	26 orang	0,60 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	6 orang	0,14 %
Jumlah Total		4.330 orang	100 %

Sumber: RPJM Desa Sidonganti 2010-2014 Tahun 2011

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sidonganti hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan SLTP (SMP). Bahkan sebagian besar/rata-rata hanya sampai Sekolah Dasar bahkan banyak yang tidak sekolah. Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas angka buta hurufnya mencapai 50%. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini sesungguhnya jauh dari harapan dasar dan merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Sidonganti, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, disamping itu, tentunya adalah masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sidonganti yang tersedia adalah tingkat pendidikan dasar 6 tahun (PAUD, TK dan SD), sementara untuk

pendidikan tingkat menengah pertama dan atas berada di Kota Kecamatan Kerek yang berjarak 8 km.

Untuk mengatasi keterbatasan pendidikan di Desa Sidonganti adalah melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia di Desa Sidonganti. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah dilaksanakan tidak juga bisa berkembang.

3.5. Kesehatan

Layanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang. Masyarakat akan menjadi produktif apabila dalam kondisi kesehatan yang prima. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terbebas dari berbagai keluhan penyakit. Dari data yang tersedia menunjukkan jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi (RPJM Desa Sidonganti, 2011). Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut juga menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi penyembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat terutama disebabkan oleh ketersediaan air bersih yang mengandalkan satu sumber air di Dukuh Soco Sidonganti ini. Setiap hari masyarakat mengangkut air dengan wadah jurigen dari tempat ini ke tempat tinggal tinggal mereka yang berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun melakukan hal serupa, merupakan pemandangan yang dapat dilihat setiap hari di desa ini, meskipun pada musim penghujan. Kondisi yang demikian ini tentu menjadi hambatan pada daya produktifitas masyarakat Desa Sidonganti secara umum.

Data orang cacat mental dan fisik di Desa Sidonganti juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 3 orang, tuna wicara 5 orang, tuna rungu 10 orang, tuna netra 5 orang, dan lumpuh 5 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk di Desa Sidonganti.

Hal yang perlu juga dipaparkan disini adalah kepesertaan masyarakat dalam program KB (Keluarga Berencana). Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2010 di Desa Sidonganti berjumlah 1.135 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasi dengan

vaksin Polio dan DPT-1 berjumlah 103 orang bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Polindes yang berlokasi di sebelah kiri kantor atau Balai Desa Sidonganti. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif terbatas ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 103 bayi lahir pada tahun 2010, hanya 1 bayi yang tidak tertolong.

Data tentang balita yang berjumlah 103 balita di tahun 2010, masih terdapat 4 balita yang bergizi buruk, 5 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Sidonganti ke depan lebih baik. Bidan Desa di Sidonganti terdapat satu orang bidan yang sudah bertugas dan menempati Rumah Dinas yang berlokasi bersebelahan dengan kantor Desa Sidonganti (Lihat Foto 119 Pondok Bersalin "Melati").

3.6. Keadaan Sosial

Perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis di era reformasi ini, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik agar dapat melaksanakan prinsip demokrasi. Dalam konteks politik lokal Desa Sidonganti diperoleh gambaran melalui pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pemilu Legislatif, Pemilu Eksekutif (Pilpres), pemilukada, dan pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan Kepala Desa (Kades) merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Misalnya latar belakang pendidikan, kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya selesai, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan Februari dan Maret 2010 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Tuban putaran I secara langsung. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, yakni hampir 70 % dari daftar pemilih tetap, telah memberikan hak pilihnya. Fakta Ini merupakan progress demokrasi yang cukup signifikan di Desa Sidonganti.

Pola kepemimpinan di Desa Sidonganti berada di tangan Kepala Desa, namun mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Sidonganti yang mengedepankan pola kepemimpinan demokratis (Lihat foto 120 Kantor Desa dan BPD Desa Sidonganti).

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dipahami bahwa Desa Sidonganti mempunyai dinamika politik lokal yang kondusif. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpin-an, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terdapat minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sidonganti kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal kegiatan keagamaan, suasananya dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, yang berkegiatan budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, melalui TI (Teknologi Informasi), hal-hal yang terlaksana selama ini mulai mendapat respon dan tafsir positif dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sidonganti. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sidonganti. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik, tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Sidonganti. Isu-isu penting yang patut memperoleh perhatian adalah meningkatkan kesejahteraan. Masalah kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial, meskipun demikian perlu terus ditingkatkan kewaspadaan bersama bahwa kedua hal tersebut tidak boleh terjadi, dengan melakukan sejumlah aksi nyata dengan kegiatan pelestarian tanaman hutan.

3.7. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sidonganti Rp. 20.000,- (RPJM Desa Sidonganti, 2010) per KK/hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sidonganti dapat didentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk usia produktif berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5
Mata Pencaharian, Jumlah, dan Persentase Penduduk Desa Sidonganti

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentese
1	Pertanian	4.114 orang	97.44%
2	Jasa / perdagangan		0.23%
	a. Jasa Pemerintahan	10 orang	
	b. Jasa Perdagangan	75 orang	1.77%
	c. Jasa Angkutan	23 orang	0.54%
	d. Jasa Keterampilan	-	
	e. Jasa lainnya	-	
3	Sektor Industri	-	
4	Sektor Lain	-	
	Jumlah	4.222 orang	100%

Sumber: RPJM Desa Sidonganti 2010-2014 Tahun 2011

Dari tabel di atas nampak bahwa hampir semua masyarakat Desa Sidonganti yang usia bekerja merupakan petani atau buruh tani (97%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketergantungan terhadap lahan atau terutama lahan hutan (tanah persil) sebagai sumber mata pencaharian sangat tinggi. Sumber data lain juga menunjukkan bahwa angka pengangguran di Desa Sidonganti masih cukup tinggi. Jumlah penduduk usia 20–55 yang belum bekerja mencapai jumlah 1.500 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.000 orang.

BAB IV
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN

4.1. Keamanan Hutan

"Selama manusia masih hidup, selama itu pula kejahatan (kriminalitas) dan pencurian terus berlangsung." Begitu sergah seorang staf senior, yang awal bulan Februari tahun ini memasuki masa pensiun, di lingkungan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, kepada peneliti. Tokoh senior ini mengisahkan, saat masih usia 23 tahunan, beliau bertugas sebagai mantri hutan di daerah Jember pada tahun 70-an. Saat itu, pencurian kayu jati juga dilakukan oleh pelaku (aktor) dari masyarakat yang tinggal di lingkungan kawasan Perhutani. Ia melanjutkan pengalamannya saat berhasil mendekat kepada salah seorang "blandong" (petugas keamanan di Polsek Kecamatan Kerek menyebutnya sebagai "Jagger") yang berbadan kekar. Sempat pula bermalam di rumah sang tokoh ini. Ia pernah dipanggil oleh Kepala ADM (Administratur) di ruang kerjanya dan dituduh telah bersekongkol dengan sang Blandong. Dengan nada yang meyakinkan bahwa bila ia terlibat dalam persekongkolan pencurian kayu jati, maka siap dipindahkan ke manapun. Singkat kata, dengan dekatnya hubungan dengan tokoh blandong dan keluarganya itu, maka dalam kenyataan, dapat meredam kebiasaan pencurian kayu di hutan.

Desa Sidonganti merupakan daerah yang berdekatan langsung dengan wilayah tiga KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu: (i) KPH Parengan terdiri atas RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Mulyoagung dan RPH Guwoterus BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mulyoagung; (ii) KPH Jatirogo RPH Tuwiwiyan BKPH Bahoro; (iii) KPH Tuban RPH Simbatan dan RPH Nglonde, dan BKPH Kerek (Lihat Peta 4). Dalam pengertian ini masyarakat Sidonganti sesungguhnya juga masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan yang

dilingkupi oleh tiga KPH sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) Perum Perhutani di Kabupaten Tuban.

4.1.1. Gangguan Keamanan Hutan

Di ketiga wilayah *buffer zone* (daerah penyangga) Desa Sidonganti ini terdapat angka gangguan keamanan hutan di tiga KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) tersebut yaitu KPH Parengan, KPH Jatirogo dan KPH Tuban. Secara lebih khusus lagi angka gangguan di RPH (Resort Pemangkuan Hutan) berbatasan wilayah langsung dengan Desa Sidonganti yang menjadi akses penyerangan masyarakat Sidonganti terhadap Sumber Daya Hutan (SDH). Data gangguan keamanan hutan dan pencurian pohon dalam lima tahun terakhir di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban dapat diperoleh gambaran sebagaimana Tabel 6, 7, 8 dan 9. Sehingga kawasan Sidonganti ditetapkan oleh KPH Parengan sebagai daerah yang paling kirits dan paling rawan terhadap gangguan keamanan hutan. Kondisi tersebut juga terjadi di masyarakat yang tinggal di desa sebelahnya yakni Desa Trantang dan Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban (Lihat Peta 2 serta Foto 4 dan 5 yang diberikan tanda merah oleh KPH Parengan). Sehingga ketiga desa ini sering memperoleh sebutan "segitiga" (*triangle*) rawan kerusakan tanaman hutan. Ketiga wilayah desa ini oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur ditetapkan sebagai daerah paling rawan dan paling kritis. Bersamaan dengan hal tersebut, oleh tokoh masyarakat Tuban disebut sebagai daerah yang paling *primitif* di seluruh Kabupaten Tuban.

Meskipun dilihat dari jalan raya di wilayah KPH Parengan dan KPH Jatirogo sampai pada wilayah RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Mulyoagung dan RPH Guwoterus, tanaman pohon jati tampak lengkap dan berhasil (Foto 16, 17, dan 61), namun kenyataan di dalamnya tidaklah demikian. Kelihatan berhasil tanaman kayu jati itu disebabkan karena terletak di pinggir jalan raya yang biasa dilalui pengawasan langsung oleh petugas keamanan melalui pos-pos keamanan yang disiap-kan oleh KPH sebagaimana tampak petugas dari kepolisian dan tentara di PTM (Patroli Tunggal Mandiri) 4 dan 5 di Asperan Mulyoagung (Foto 21 dan 22). Namun, apabila kita melihat agak ke dalam, ternyata tidak sampai 500 meter dari lokasi itu, masih juga terjadi pencurian kayu jati bahkan perusakan-perusakan kayu yang dikelola oleh Perum Perhutani (Foto 19 dan 20).

Tabel 6 dan 7 dapat diperoleh penjelasan bahwa di kawasan KPH Parengan, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mulyoagung selalu mendominasi jumlah angka pencurian kayu dari tahun 2006-2011 dibandingkan dengan 5 BKPH lainnya. Sepanjang

tahun 2011 BKPH Mulyoagung jumlah pencurian pohon mencapai 971 pohon dengan kerugian hampir Rp 1 milyar (Tabel 6). Bila kita lebih memfokuskan di BKPH Mulyoagung dapat kita lihat di BKPH Mulyoagung, RPH Guwoterus yang berbatasan dengan Desa Sidonganti selalu mendominasi angka pencurian kayu pada 5 tahun terakhir (Lihat Tabel 8) di wilayah KPH Parengan.

Sampai akhir Januari 2012 di RPH Guwoterus masih dilakukan pencurian kayu jati yang siap untuk dipanen (Lihat Foto 19 dan 20) dan juga perusakan kayu yang berusia lebih dari 3 tahun dengan maksud agar dapat dilakukan penanaman palawija di lahan itu (Lihat foto 23, 24, 25, 26, 27, dan 28). Untuk mengalihkan perhatian petugas, para pelaku pencurian ini melakukan perusakan kepada pos penjagaan keamanan (Lihat foto 18). Dengan melakukan perusakan pos keamanan seperti itu, para pelaku pencurian kayu berharap dapat membawa pergi kayu hasil curiannya.

Gangguan keamanan hutan di KPH Jatirogo pada lima tahun terakhir masih nampak menunjukkan kecenderungan angka yang meningkat. Juga pada tahun 2011 jumlah pohon yang dicuri adalah 2.989 pohon dengan kerugian mencapai Rp.1,24 milyar. Angka tersebut tidak termasuk perusakan hutan yang jumlah pohon yang rusak mencapai 4.799 pohon pada tahun 2011, penggembalaan, kebakaran, dan bencana alam. Pada tahun 2001 merupakan angka tertinggi gangguan keamanan hutan di KPH Jatirogo, dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya (Lihat Tabel 8).

Sedangkan gangguan keamanan hutan di KPH Tuban pada lima tahun terakhir masih menunjukkan angka yang tinggi yakni mencapai jumlah 1.117 pohon dengan kerugian sampai Rp.1,015 milyar. Meskipun angka kehilangan pohon pada tahun 2011 tidak setinggi pada tahun 2007 berjumlah 1.897 pohon, tahun 2008 berjumlah 1.594 pohon dan tahun 2009 berjumlah 1.237 pohon. Namun angka tahun 2011 juga terjadi lonjakan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 854 pohon (Lihat Tabel 9).

Angka-angka tersebut ini sudah cukup membuktikan bahwa tingkat kerawanan hutan di sekitar kawasan Desa Sidonganti dalam wilayah tiga KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Parengan adalah masih sangat tinggi. Bahkan memiliki tingkat paling rawan di Jawa Timur.

4.1.2. Sumber Gangguan Keamanan Hutan

Dalam penyelesaian permasalahan tingginya intensitas gangguan keamanan hutan perlu dilakukan perumusan akar permasalahan. Akar

permasalahan di-pilahkan dalam dua hal yakni internal Perum Perhutani dan faktor ekternal di luar Perum Perhutani yang kedua faktor tersebut bukan merupakan bagian yang terpisah sama sekali, namun saling terkait. Faktor-faktor internal dalam Perum Perhutani adalah (i) jumlah tenaga keamanan yang tidak seimbang antara luas kawasan dengan tenaga keamanan.

Adapun lima faktor-faktor eksternal utama penyebab terjadinya gangguan keamanan hutan adalah (i) faktor krisis multidimensi kehidupan masyarakat; (ii) faktor sosial budaya kehidupan masyarakat; (iii) gangguan hama penyakit; (iv) politik; dan (v) ekonomi. Kelima faktor tersebut diurakan sebagai berikut:

Tabel 6.
Data Gangguan Keamanan Hutan Pencurian Pohon di Wilayah Perum Perhutani KPH Parengan 2006-2011

NO	BKPH	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
		HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MULYOAGUNG	941	2,622	1,063,787	774	1,667	770,863	388	788	190,755	395	835	204,936	345	822	242,083	373	971	895,449
2	MONTONG	200	606	144,613	109	301	69,414	97	256	32,476	89	223	31,201	105	279	31,332	106	249	86,373
3	PARENGAN UTARA	165	487	116,959	213	380	88,038	186	265	78,169	172	234	56,122	123	159	43,678	89	131	99,478
4	PARENGAN SELATAN	192	504	77,534	188	402	67,470	158	303	51,656	165	315	45,624	103	168	33,973	74	128	41,984
5	PUNGPUNGAN	105	245	53,681	179	494	113,001	151	469	62,519	115	354	44,158	111	244	29,603	70	228	56,105
6	MALO	461	1,429	323,407	352	602	135,513	194	229	53,787	191	179	31,805	164	217	50,320	203	263	312,492
	JUMLAH	**2,064**	**5,893**	**1,779,981**	**1,815**	**3,846**	**1,244,299**	**1,174**	**2,310**	**469,362**	**1,127**	**2,140**	**413,846**	**951**	**1,889**	**430,989**	**915**	**1,970**	**1,491,881**

Sumber: KPH Parengan 2012

Tabel 7.
Data Gangguan Keamanan Hutan Pencurian Pohon Di Wilayah BKPH Mulyoagung Perum Perhutani KPH Parengan

NO	BKPH	RPH	2006			2007			2008			2009			2010			2011		
			HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN	HA	POHON	KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MULYO-AGUNG	MULYOAGUNG	410	906	513,907	291	404	348,791	100	146	65,061	103	243	76,994	97	344	95,333	137	467	516,892
		GUWOTERUS	338	1,205	471,883	278	664	353,524	79	175	63,571	90	141	72,307	95	159	80,580	96	189	253,965
		NGULUHAN	103	277	50,171	93	280	37,411	106	218	36,054	99	223	31,051	73	158	26,536	79	142	96,365
		TREMBUL	34	110	12,272	43	135	8,083	32	93	8,524	43	120	9,544	32	70	6,190	19	34	8,013
		KEDUNGJAMBE	56	124	15,554	69	184	23,054	71	156	17,545	60	108	15,040	48	91	15,444	42	139	20,214
		JUMLAH	**941**	**2,622**	**1,063,787**	**774**	**1,667**	**770,863**	**388**	**788**	**190,755**	**395**	**835**	**204,936**	**345**	**822**	**224,083**	**373**	**971**	**895,449**

Sumber: KPH Parengan 2012

Tabel 8.
Rekapitulasi Gangguan Keamanan Hutan KPH Jatirogo

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Gangguan Keamanan**						
1.	**Pencurian Pohon**						
	a. Jumlah (pohon)	1,991	1,365	918	2,579	2,898	9,751
	b. Kerugian (x Rp. 1000)	302,089	209,877	137,828	432,695	1,244,871	2,327,360
2.	**Bibrikan**						
	a. Luas (ha)	-	-	-	-	-	0.00
	b. Kerugian (x Rp. 1000)	-	-	-	-	-	0
	a. Luas (ha)	-	0.77	0.97	4.14	10.60	
	b. Jumlah Pohon (btg)	299	218	190	985	4799	1,692
	c. Kerugian (x Rp. 1000)	4,147	2,995	2,394	6,345	145,697	161,578
4.	**Penggembalaan**						
	a. Luas (ha)	6.70	0.25	4.00	44.30	3.0	55
	b. Jumlah Pohon (btg)	1,005	38	32	176	-	1,251
	c. Kerugian (x Rp. 1000)			480	3,240	6,750	
5.	**Kebakaran**						
	a. Luas (ha)	106.20	110.55	113.80	0.00	47.4	330.55
	b. Jumlah Pohon (btg)	-	-	-	-	1	0
	c. Kerugian (x Rp 1000)	19,428	13,623	19,811	0	136,500	189,362
6.	**Bencana Alam**						
	a. Luas (ha)	2.50	-	0.00	20.4		22.90
	b. Jumlah Pohon (Btg)	23	47	65	252	84	387
	c. Kerugian (Rp. X 1000)	-	-	-	-	136,652	0
	Jumlah Kerugian (Rp. X 1000)	**326,669**	**226,533**	**160,065**	**439,216**	**1,663,720**	**2,816,203**

Sumber: KPH Jatirogo 2012, diolah

Tabel 9.
Data Gangguan Keamanan Hutan 5 Tahun Terakhir 2007 - 2011 KPH Tuban

No	Tahun	Kehilangan Phn		Bencana Alam		Kebakaran Hutan		Sisa Ky Pertkngan		Hsl Pengamanan	
		Pohon	X Rp1.000	Phn	X Rp1.000	Ha	X Rp1.000	M3	X Rp1.000	M3	X RP1.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2007	1,897	594,629	73	73	412.3	55,089	339.954	166,099	379.9058	181,995
2	2008	1,594	567,594	62	62	155.2	54,548	289.980	128,651	320.3336	137,566
3	2009	1,237	348,695	41	41	105.4	19,355	181.288	66,460	221.0680	90,964
4	2010	854	244,322	85	85	-	-	140.276	50,251	155.9562	58,078
5	2011	1,117	1,015,229	60	67,293	163.2	4,144,252	138.9699	316,184	156.1033	336,288
JUMLAH		6,699	2,770,469	321	67,554	836	4,273,244	1,090	727,645	1,233	804,891

Sumber: KPH Tuban 2012

Pertama, terjadi krisis multi dimensional pada masyarakat desa Sidonganti, sesungguhnya merupakan cerminan dari krisis yang terjadi pada masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Krisis multi-dimensi itu antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang tinggi sementara kualitas SDM yang rendah. Penduduk Desa Sidonganti mencapai 4330 orang yang sejumlah 97% bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Jumlah lahan 'pajakan' yang terbatas rata-rata

0,02 ha perkapita. Kondisi demikian yang menyebabkan terjadi tekanan terhadap eksistensi lahan yang tersedia di sekitarnya yakni "lahan persil" yang dikelola oleh Perum Perhutani di sekitar desa ini. Kondisi yang demikian pada gilirannya menimbulkan konflik pengelolaan SDH berkepanjangan seperti pencurian hutan dan penggarapan lahan hutan secara ilegal—antara lain dengan melakukan perusakan tanaman kayu yang dikelola Perhutani. Perusakan tanaman hutan dapat dipilahkan menjadi (i) merusak tanaman hutan yang baru ditanam sampai berumur 3 tahun; (ii) merusak tanaman hutan yang berumur lebih dari tiga tahun; dan (iii) mencuri tanaman hutan yang sudah dapat dipanen (lihat foto 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27).

Tuntutan untuk hidup (untuk memenuhi kebutuhan pangan) merupakan tekanan ekonomi dan sosial yang masih tinggi (*social-economical distress*) yang dari tahun ke tahun, bahkan berkecenderungan semakin meningkat, sejalah dengan jumlah penduduk yang juga meningkat. Kondisi yang demikian juga didorong oleh perkembangan ekonomi dan politik lokal, regional dan nasional yang belum begitu kondusif betul.

Kedua, pola pencurian pohon yang dilakukan oleh kelompok pencuri dari Desa Sidonganti—dan sejumlah pelaku yang mengatasnamakan dan atau diduga dari desa ini—dapat dikelompokkan dalam strata C dan D, yaitu pencurian pohon yang dilakukan secara berkelompok dengan jumlah 60 orang atau lebih. Kondisi yang demikian sangat menyulitkan petugas di lapangan. Pencurian pohon dalam kelompok strata seperti ini terjadi di KPH Parengan, dimana RPH yang bersinggungan secara langsung yaitu RPH Mulyoagung dan RPH Guwoterus BKPH Mulyoagung, KPH Jatirogo yaitu RPH Tuwiwiyan BKPH Bahoro, KPH Tuban yaitu RPH Simbatan dan RPH Nglonde BKPH Kerek.

Ketiga, penyebab terjadinya pencurian ini adalah faktor socio-historis yang terjadi jarak (gap) sebagai implikasi dari hubungan komunikasi yang tidak lancar (harmonis) antara masyarakat dan Perhutani. Hubungan komunikasi yang tidak lancar ini berlangsung sejak beberapa dekade sebelumnya yang dirasakan belum dapat dicairkan sampai kegiatan penelitian ini dilaksanakan.

Pencurian kayu jati di hutan yang dikelola Perhutani sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 70-an. Saat itu yang menjadi bagian dari pelaku (aktor) adalah petugas keamanan sendiri dari kalangan TNI dan Polri di tingkat kecamatan dan desa. Pelaku pencurian kayu termasuk pelaku yang mengamankan distribusi barang itu sampai ke tempat tujuan di pasar lokal, regional maupun nasional. Petugas Perhutani meyakini bahwa selama masih ada orang, dan masih tersedia kayu jati, maka yang

namanya pencuri (maling) itu pasti selalu ada. Ia juga mengakui bahwa tidak menutup mata juga, orang-orang petugas sebagai bagian dari Perum Perhutani juga menjadi bagian dari pelaku tersebut. Sehingga PHBM yang aslinya merupakan kependekan dari (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) namun dalam kenyataan di lapangan berubah menjadi "Pencurian Hutan Bersama Mantri" hutan. Pencurian kayu jati di wilayah pengelolaan Perhutani ini mencapai puncaknya pada masa reformasi pada akhir dekade 90-an dan awal dekate 2000-an. Saat itu masyarakat menggunakan dalih bahwa hutan adalah milik *negoro* (bahasa Jawa yang berarti silahkan me*negor*, memotong tanaman hutan) yang dikemukakan oleh salah seorang pemimpin nasional.

Petugas keamanan terutama yang dibekali senjata api baik kalangan TNI maupun Polri yang memperoleh tugas berkomunikasi langsung kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya juga sempat tidak berkutik. Orang Sidonganti menyatakan "kesumpelan bunga melati, senjata itu tidak bisa berbunyi". Dengan eksplisit orang itu menjelaskan maksudnya yakni senjata itu saat tertutup uang recehan 100 ribu rupiah (yang bergambar bunga melati), senjata itu tidak jadi berbunyi. Petugas keamanan telah kalah dengan uang recehan Rp.100 ribuan.

Keempat, belum terintegrasikannya berbagai kegiatan dalam menanggulangi permasalahan Sidonganti yang telah dilakukan oleh badan, lembaga, instansi, dan masyarakat. Integrasi dan koordinasi antar dan intern lembaga, instransi, dan masyarakat, dan Perum Perhutani merupakan kunci utama penyelesaiannya. Sehingga dapat dimungkinkan untuk diminimalkan kesan pelaku atau pembina yang *single fighter* (bekerja sendiri). Diperlukan penguatan dari berbagai instansi terkait seperti bidang atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Keluarga dan Kesehatan (Bapemas dan KKK) bersinergi menanggulangi masalah kemiskinan yang multidimensional terjadi di masyarakat seperti di Desa Sidonganti ini.

Kelima, belum tersusunnya *grand design* atau *road map* (peta jalan) di ketiga KPH (KPH Parengan, KPH Tuban, dan KPH Jatirogo) yang merupakan lokasi kawasan penyangga *(buffer zone)* bagi Desa Sidonganti dalam rumusan dan tahapan tertentu mencapai maksud dapat menciptakan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Tujuan tersebut terumuskan dalam tulisan berpigora yang dapat dibaca di tulisan di sejumlah KPH antara lain di KPH Jatirogo yakni "Masyarakat Berdaya dan Hutan Terjaga (Lihat Foto no. 37).

Dalam rangka melaksanakan tujuan hutan lestasi perlu dilakukan penyadaran kepada semua fihak yang berkompetens *(stake holders)* khusus-nya bagi pembina agar dapat dilakukan penanaman hutan dengan jenis tanaman tertentu. Misalnya tanaman pohon sengon yang dapat memanen hasilnya dalam waktu 8-10 tahun. Waktu seperti ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan menanam kayu jati yang memerlukan waktu minimal 20 tahun. Topik ini menjadi pembahasan penting dalam diskusi dengan LMDH "Wonoasri" di Desa Tengger Wetan (Lihat Foto 82, 83 dan 84).

Jenis tanaman lainnya yang ditanam di areal Perhutani adalah Tanaman Kayu Putih yang dapat panen dalam waktu sekitar 5 tahun. Penanaman Kayu Putih, hendaknya juga disertai dengan pendirian pabrik Minyak Kayu Putih (MKP) di wilayah Kabupaten Tuban. Gagasan yang pernah diluncurkan Perum Perhutani beberapa tahun sebelumnya itu hendaknya ditangani secara lebih serius dan konsisten. Topik penanaman kayu putih juga menjadi fokus pembicaraan pada diskusi dengan tiga ketua LMDH yakni "Wono Lestari" Bapak Jait, LMDH "Gemulung Jaya" Bapak Sudjati, dan LMDH "Wono Bangkit" Bapak Sumari di halaman depan Pos PTM 16 BKBH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngulahan KPH Jatirogo (Lihat foto 44, 45, dan 46). Gagasan yang dikemukakan saat itu adalah hendaknya pabrik yang akan didirikan itu tidak harus pabrik yang berskala besar. Dapat berupa pabrik berskala menengah dan mungkin portable. Hendaknya pula dipertimbang-kan agar pabrik yang didirikan itu dekat dengan sumber air bersih untuk memudahkan kegiatan produksi berupa penyulingan minyak kayu putih.

Ditekankan oleh para tokoh masyarakat pengelola LMDH ini, agar pasca produksi minyak kayu putih hendaknya para produsen di LMDH itu tidak kesulitan untuk menjual hasil produksi minyak kayu putihnya. Berarti juga harus disiapkan pula pembelinya. Keberadaan pabrik Minyak kayu Putih ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yang memungkinkan masyarakat di desa-desa itu memperoleh kegiatan yang dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan ekonominya.

Perum Perhutani KPH Parengan juga telah membuat pilot project (2010) dalam pengelolaan hutan dengan tanaman kayu putih di sekitar pangkuan desa Sidonganti sebagai *buffer zone*. Luas lahan yang direncanakan sejumlah 250,8 Ha, yang sudah realisasi seluas 156,2 Ha,. Masih sisa 94,6 Ha, direncanakan ditanam tahun 2010 dengan jarak tanam 6 x 1mtr agar ada kelonggaran bagi para penggarap untuk tanaman Tumpangsari mereka di wilayah desa Sidonganti.

4.1.3. Penanganan Gangguan Keamanan Hutan

Kajian pencurian ini dibuat dalam empat kelompok analisis yang dimulai dari proses stratifikasi pencurian, dilanjutkan dengan monitoring/evaluasi dan strategi pengendalian.

4.1.3.1. Identifikasi dan Stratifikasi Pencurian Kayu

Untuk mengetahui pola pencurian kayu, intensitas pencurian merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap pola pencurian yang ada dan besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat dengan membuat stratifikasi untuk berbagai kejadian pencurian yang terjadi.

Secara umum intensitas pencurian dapat diukur dari jumlah pencurian, banyaknya pohon hilang, dan kerugian yang ditimbulkan. Pencurian pohon dengan intensitas yang tinggi dimasukkan dalam strata D dan C, kemudian intensitas sedang dalam strata B, dan rendah masuk kategori strata A (Lihat Foto 132).

Pencurian dengan stratifikasi A mempunyai kriteria: pencurian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kayu pertukangan sendiri misalnya mengganti perkakas rumah yang rusak, tiang rumah, dan sebagainya. Pelaku pencurian biasanya dalam jumlah kecil antara 1 – 2 orang dengan memakai kapak. Ukuran kayu yang dicuri disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan, dibuat dalam bentuk persegi dan diangkut dengan pikulan.

Pencurian dengan stratifikasi B mempunyai kriteria: pencurian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kayu pertukangan sendiri misalnya mengganti perkakas rumah yang rusak, tiang rumah dan sebagainya. Pelaku pencurian biasanya dalam jumlah kecil kurang dari 10 orang dengan memakai kapak dan gergaji tangan. Ukuran kayu yang dicuri disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan, dibuat dalam bentuk persegi dan diangkut dengan pikulan.

Pencurian dengan stratifikasi C adalah pencurian yang dilakukan untuk membuat perkakas atau rumah setengah jadi, dengan tujuan untuk dijual setelah agak lama dan lengkap. Biasanya kayu ditempelkan (tidak permanen) pada bagian rumah yang ada (misalnya blandar/tiang), atau dibuat rumah kosong untuk kandang ternak, atau tempat menampung kayu bakar. Setelah agak lama dan lengkap, rumah tersebut dibongkar dan dijual untuk bahan kayu pertukangan atau dalam bentuk rumah.

Pelaku pencurian biasanya dalam kelompok 10-20 orang dengan memakai kapak dan gergaji tangan. Ukuran kayu yang dicuri disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan, dibuat dalam bentuk persegi dan diangkut dengan pikulan, kadang pakai mobil.

Pencurian dengan stratifikasi D adalah pencurian yang dilakukan untuk memenuhi pesanan industri mebel menengah dan besar. Pencurian dilakukan dengan gergaji tangan dan kadang gergaji mesin *(chain saw)*.

Kayu diangkut dengan mobil dalam waktu yang cepat, dilakukan oleh kelompok besar lebih dari 20 orang, pelaku sudah mempunyai jaringan dengan penadah dan industri. Pada saat melakukan pencurian, terdapat orang yang bertugas sebagai pengintai keberadaan petugas yang dilengkapi dengan alat pantau seperti handphone, dan apabila kepergok petugas tidak segan-segan melakukan perlawanan. Ukuran pohon yang dicuri tidak memandang besar atau kecil, namun sesuai dengan order dari industri mebel. Kriteria pada masing-masing strata pencurian kayu jati untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

4.1.3.2. Monitoring/Evaluasi Pencurian

Setiap terjadi tindak pencurian kayu di hutan yang diketahui petugas, maka dalam waktu 1x24 jam KRPH membuat laporan kejadian yang disebut LA. Laporan kejadian memuat tentang peristiwa kejadian, pelaku pencurian, lokasi pencurian, waktu pencurian, alat yang dipakai dan keterangan lain yang mendukung.

Dari kejadian pencurian tersebut, selanjutnya KRPH melakukan analisa dan mengelompokan kejadian pencurian tersebut dalam strata yang sesuai kriteria dan dituliskan pada bagian atas LA. Laporan tersebut diperiksa/ditandatangani oleh Asper/KBKPH dan diregister di Kantor BKPH, serta dibubuhi stempel Huruf **A/B/C/D** sesuai stratifikasi dan stempel tindak lanjut yang dituliskan KRPH. Contoh laporan kejadian (LA) dapat dilihat pada lampiran 1-3.

Selanjutnya LA dikirim ke Kantor KPH cq bagian koordinator keamanan untuk diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Administratur/KSKPH (Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan) selaku koordinator keamanan.

Tabel 10. Strata Pencurian Kayu Jati di KPH Parengan

Strata Parameter	A	B	C	D
Alat Kerja	Kapak pikulan	Gergaji tangan,kapak pikulan	Gergaji tangan,kapak, pikulan kadang mobil	Gergaji tangan, kapak, alat angkut mobil
Jumlah Orang	Perorangan max. 2 orang	Kelompok kecil (< 10), perorangan	Kelompok sedang (10 – 20)	Kelompok besar (20-80), sindikat
Sasaran	KU I-II, ukuran kayu masih dapat dipikul.	KU IV-V, ukuran kayu masih dapat dipikul.	KU IV-V, ukuran kayu masih dapat dipikul.	Semua Umur ukuran kayu sesuai order industri
Modus	Perorangan, kebutuhan sendiri	Perorangan, kebutuhan sendiri dan mulai dikomersilkan	Kelompok , kebutuhan sendiri dan sebagian komersil.	Sindikat, ada jaringan dengan industri dan perlindungan oknum petugas negara.
Pemaksa-an	Melihat petugas lari	Melihat petugas lari	Melihat petugas menjauh, petugas pergi kayu diambil lagi	Ada petugas balik meminta/memaksa kayu kadang dengan ancaman
	Bulanan	Bulanan	Mingguan, Harian	Harian, Jam.

Sumber: KPH Parengan 2012

Setiap laporan LA yang masuk di bagian korkam KPH Parengan, dilakukan input dan kompilasi dalam bentuk Laporan Monitoring Pencurian untuk tiap bulan.

Data monitoring bulanan yang telah disusun, kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan peta monitoring pencurian dalam bulan. Dari peta ini, dapat dilihat sebaran pola pencurian (stratifikasi) kayu yang ada dalam satuan anak petak di wilayah KPH Parengan yang nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi dan pengendalian tindak pencurian.

4.1.3.2. Strategi Pengendalian Pencuri Kayu

Dengan mengetahui sebaran maupun potensi tindak gangguan keamanan hutan, khususnya pencurian pohon selama lima tahun terakhir serta adanya identifikasi dan stratifikasi maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun strategi pengendalian pencurian kayu yang ada di KPH Parengan. Penetapan strategi ini menggunakan asumsi bahwa kecenderungan kondisi Internal dan Eksternal tidak jauh berbeda dengan situasi lima tahun terakhir, dan diharapkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

4.1.3.2.1. Pencurian Tipe I (Strata A)

Strategi pengendalian pencurian kayu tipe I (strata A) dengan upaya preemtif yaitu; (i) dengan penyuluhan tentang kelestarian hutan, dan menjalin hubungan baik antara petugas dan masyarakat; (ii) Mengadakan pelatihan keterampilan dan manstimulasi kegiatan usaha produktif LMDH dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi PHBM; (iii). Mengadakan publikasi dan komunikasi dalam rangka membentuk opini publik untuk memberantas pencurian kayu; (iv) Membangun kesepahaman dengan aparat dan LMDH dalam penindakan terhadap pencuri kayu dalam rangka pembinaan; (iv) Mengadakan patroli, peningkatan kinerja personil internal, meningkatkan efektifitas patroli dan kerjasama dengan LMDH; (v). Memfasilitasi kebutuhan kayu bagi MDH dan industri kayu/mebel di sekitar hutan melalui implementasi PHBM industri mebel dengan mekanisme yang jelas; (v). Membangun opini publik dan pencitraan untuk memberantas pencurian kayu melalui berbagai media.

4.1.3.2.2. Pencurian Tipe 2 (Strata B)

Strategi pengendalian pencurian kayu Upaya Preemtif yaitu dengan: (i). penyuluhan tentang kelestarian hutan, dan menjalin hubungan baik antara petugas dan masyarakat; (ii). Mengadakan pelatihan keterampilan dan menstimulasi kegiatan usaha produktif LMDH dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi PHBM; (iii). Mengadakan publikasi dan komunikasi dalam rangka membentuk opini publik untuk memberantas pencurian kayu; (iv).

Strategi pengendalian pencurian kayu Upaya Preventif yaitu dengan: (i). mengadakan patroli intensif, peningkatan kinerja personil internal, dan kerjasama dengan LMDH; (ii). Memfasilitasi kebutuhan kayu bagi MDH dan indusrti kayu/mebel di sekitar hutan melalui implementasi PHBM industri mebel dengan mekanisme yang jelas; (iii). Pembinaan pemeriksaan rutin terhadap industri kayu/mebel secara bersama dengan instansi

terkait; (iv). Koordinasi dengan instansi dan aparat terkait dalam rangka penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku pencurian

Strategi pengendalian pencurian kayu Upaya Represif, yaitu dengan: (i). mengadakan operasi bersama POLRI terhadap penadah maupun pengguna kayu curian; dan (ii). Membangun opini publik untuk memberantas pencurian kayu.

4.1.3.2.3. Pencurian Tipe 3 (Strata C dan D)

Strategi pengendalian pencurian kayu tipe 3 (Strata C dan D), Upaya Preemtif, yaitu dengan: (i). penyuluhan tentang kelestarian hutan, dan menjalin hubungan baik antara petugas dan masyarakat; (ii). Mengadakan pelatihan keterampilan dan menstimulasi kegiatan usaha produktif LMDH dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi PHBM; dan (iii). Mengadakan publikasi dan komunikasi dalam rangka membentuk opini publik untuk memberantas pencurian kayu.

Strategi pengendalian pencurian kayu tipe 3 dengan Upaya Preventif yaitu dengan: (i). mengadakan patroli intensif, peningkatan kinerja personil internal, dan kerjasama dengan LMDH; (ii). Memfasilitasi kebutuhan kayu bagi MDH dan industri kayu/mebel di sekitar hutan melalui implementasi PHBM industri mebel dengan mekanisme yang jelas; (iii). Pembinaan pemeriksaan rutin terhadap industri kayu/mebel secara bersama dengan instansi terkait; dan (iv). Koordinasi dengan instansi dan aparat terkait dalam rangka penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku pencurian.

Strategi pengendalian pencurian kayu tipe 3 dengan Upaya Represif, yaitu dengan: (i). mengadakan operasi bersama POLRI terhadap penadah maupun pengguna kayu curian; dan (ii). Membangun opini publik untuk memberantas pencurian kayu.

Pengendalian pencurian tetap berprinsip mengedepankan tindakan preemtif, prefemtif dan represif secara berjenjang. Dengan pola pengamanan pada berbagai tingkat stratifikasi seperti di atas, gangguan keamanan hutan pada tahun 2009 mencapai titik yang paling rendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, jumlah kehilangan pohon mencapai 2.135 (turun 74 % dari tahun 2005), sedangkan angka kerugian akibat kehilangan pohon sebesar Rp. 414.552.000,- sangat turun drastis apabila dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2005 yang sebesar Rp. 2.136.960.000,-.

4.2. Penyelesaian Tenurial

4.2.1. Identifikasi Akar Masalah Tenurial

Dalam penyelesaian permasalahan tenurial atau perambahan hutan, perlu dilakukan perumusan akar permasalahan. Akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik tenurial kawasan hutan di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, terdapat tuntutan hidup (sandang, pangan dan papan) akibat adanya tekanan ekonomi dan sosial yang makin tinggi *(social economy distress)* yang dari tahun ke tahun semakin meningkat akibat perkembangan ekonomi dan politik yang tak menentu;

Kedua, terdapat dua dasar yang masih berlaku pada lokasi yang sama (kawasan hutan) sebagaimana data yang ada di Perum Perhutani lokasi itu merupa-kan kawasan hutan dalam pengelolaan Perum Perhutani dengan dasar BATB (Berita Acara Tata Batas) sedangkan masyarakat mengakui bahwa lokasi tersebut merupakan lahan garapan yang sudah terus menerus digarap secara turun temurun oleh orang tua mereka;

Ketiga, luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan (17.633.30 ha), KPH Jatirogo (18.763.20 ha), dan Tuban (28.602.50), total seluas 64.999,00 hektar (Lihat Lampiran). Dari luasan dimaksud seluas 505.54 hektar (2,13%) dikuasai oleh masyarakat dan institusi Pemerintah untuk kepentingan pertanian, pemukiman masyarakat, penggarapan liar, dan okupasi sehingga potensi yang ada tidak bisa dimanfaat-kan. Adapun data penggunaan kawasan hutan seluas seluas 505.54 hektar oleh masyarakat dan Institusi Pemerintah di Wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban sampai dengan Triwulan ke-3 dengan strata A, B, C, dan D adalah sebagai berikut (lihat Tabel 8). Dari tabel tersebut dapat diperoleh data: (i) di KPH Parengan berjumlah 51 kasus, jumlah 34 petak dan seluas 39.42 hektar atau 0,2%); (ii). Di KPH Jatirogo berjumlah 1 kasus, jumlah 27 petak dan seluas 151,55 hektar atau 0,8%; dan (iii). KPH Tuban berjumlah 43 kasus, jumlah 54 petak dan seluas 314,57 hektar atau 1,1%;

Keempat, adanya anggapan dari masyarakat yang masih keliru tentang kawasan hutan adalah: (i) bahwa lahan hutan yang dikuasai adalah milik leluhur/nenek moyang tanpa didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atau tanpa melalui proses perijinan; (ii) menggunakan kawasan hutan dan memungut hasil hutan kayu atau bukan kayu tanpa ijin, merupakan warisan kegiatan secara turun temurun; (iii). adanya duplikasi/

tumpang tindih perijinan atau bukti kepemilikan, sehingga masyarakat merasa yakin akan bukti yang dimilikinya; dan (iv). terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah, perijinan diasumsikan mudah diterbitkan dengan alasan sama-sama untuk kepentingan negara tanpa melalui prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak memproses permohon-an secara tuntas.

Kelima, proses penggunaan kawasan hutan bukan untuk pembangun-an kehutanan seperti proses Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang belum tuntas;

Keenam, adanya gap dan miskomunikasi antara Petugas Perhutani dengan masyarakat sehingga deteksi dini cenderung relatif terlambat. Hal tersebut juga akan menimbulkan kekurangsepahaman, mispersepsi dan kecenderungan prasangka buruk yang berujung pada kecemburuan sosial;

Ketujuh, pada beberapa kasus yang intens kemungkinan disebab-kan oleh faktor *socio-history* yakni kurang harmonisnya hubungan antara masyarakat dan petugas Perhutani.

4.2.2 Potensi Permasalahan Sosial dalam Permasalahan Tenurial di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban

Lima potensi permasalahan sosial tenurial di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban adalah sebagai berikut:

Pertama, kurangnya peran dan sinergitas di antara para pemangku kepentingan *(stake holder* seperti Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban dengan Pemerintahan Kabupaten Tuban, Dinas dan Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, LMDH dan Serikat Petani Tuban/SPT) dalam pengelolaan sumber daya hutan, sehingga terjadinya kesenjangan (gap) sosial, sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi sumberdaya hutan secara optimal, sehingga pengelolaan sumberdaya hutan kurang efektif dan efisien serta laju pemberdayaan masyarakat terhambat.

Kedua, lemahnya akses masyarakat terhadap modal (finansial, lahan, saprodi) pasar, iptek, informasi, dan dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan hutan (bersama masyarakat). Hal ini menyebabkan masyarakat desa hutan tetap dalam kondisi marginal dan apatis sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan berjalan lambat. Serta program pemberdayaan masyarakat cenderung bersifat *top down* dan kurang tepat sasaran.

Ketiga, lemahnya *social capital* (tingkat kepercayaan, kebersamaan, partisipasi dan jejaring sosial) masyarakat desa hutan yang diberdayakan akan berdampak pada terhambatnya pengembangan potensi masyarakat, dan

kurang optimalnya internalisasi program Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Masih rendahnya inisiatif dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat menjadi pasif dan kurang mandiri.

Keempat, tingginya *akses* terhadap sumber daya hutan namun kontras dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sempitnya lahan pertanian, banyaknya pengangguran (kurangnya alternatif pendapatan masyarakat desa hutan) dan belum terwujudnya kelembagaan masyarakat desa hutan yang kuat dan mandiri,hal ini mengakibatkan tingginya tingkat gangguan keamanan hutan, terutama pencurian hutan dan tingginya kasus tenurial.

Kelima, tekanan sosial terhadap kawasan hutan di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban oleh kegiatan non kehutanan, kurangnya kepedulian dan kemampuan para pemangku kepentingan *(stake holder)* dalam pelestari-an sumber daya hutan, inkonsistensi kebijakan yang menyebabkan terjadi-nya tumpang tindih peruntukan lahan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya akseptabilitas (pengakuan) terhadap eksistensi tata ruang kawasan hutan ketiga KPH tersebut. Serta tekanan terhadap kawasan hutan dari sektor lain untuk penggunaan kawasan hutan bukan kegiatan kehutanan mengakibatkan sebagian kawasan hutan di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban berubah status dan fungsinya.

4.2.3. Tipologi Permasalahan Tenurial

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 460/Kpts/Dir/2010 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan menegaskan bahwa stratifikasi/tipologi permasalahan tenurial dapat dijelaskan sebagaimana tabel 11 berikut :

Tabel 11. Stratifikasi Permasalahan Tenurial di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban

No	Tipologi	KLASIFIKASI
1	TYPE A	Yaitu melakukan aktifitas atau kegiatan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani secara ilegal **tanpa bermaksud untuk menguasai dan atau memiliki lahan yang dikerjakan**. Dalam hal ini ciri-ciri permasalahan dimaksud adalah sbb : ▪ Masyarakat mengakui bahwa lahan adalah dalam status pengelolaan Perum Perhutani; ▪ Tidak ada upaya untuk menjadikan lahan yang dikerjakan sebagai hak milik pribadi (perorangan/kelompok); ▪ Pemanfaatan lahan kebanyakan untuk kegiatan usaha yang bersifat subsiten atau musiman. Kawasan hutan dirambah untuk digarap dengan tanaman pertanian semusim, perambah masih mengakui status kawasan hutan dan masih mungkin dilakukan rehabilitasi melalui pendekatan sosial Gambar 1. Strata A
2	TYPE B	Yaitu melakukan aktifitas atau kegiatan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani secara ilegal **dengan maksud menguasai (memanfaatkan dalam jangka waktu tak terbatas), namun tidak ingin memiliki.** Dalam hal ini ciri-ciri permasalahan dimaksud adalah sbb : ▪ Masyarakat mengakui bahwa lahan adalah dalam status pengelolaan Perum Perhutani; ▪ Tidak ada upaya untuk menjadikan lahan sebagai hak milik pribadi (perseorangan/kelompok); ▪ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha yang intensif komersial (dalam bidang pertanian maupun usaha lain), dan atau untuk perumahan, serta perkantoran. Pendudukan (Okupasi)/Penggunaan kawasan hutan yang berlangsung cukup lama dan sulit untuk dipindahkan. Okupan tidak memiliki bukti kepemilikan yang syah namun mengakui status lahan sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan sulit direhabilitasi. Gambar 2. Strata B

3	TYPE C	Yaitu melakukan aktifitas atau kegiatan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani secara ilegal **dengan maksud untuk menduduki dan atau memiliki**. Dalam hal ini ciri-ciri permasalahan dimaksud adalah sbb : ▪ Masyarakat tidak mengakui bahwa lahan adalah dalam status pengelolaan Perum Perhutani; ▪ Ada upaya untuk menjadikan lahan sebagai hak milik pribadi (perseorangan/kelompok); ▪ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha yang intensif komersial (dalam bidang pertanian maupun usaha lain), dan atau untuk perumahan, kantor, serta fasilitas umum.

Pemanfaatan Lahan untuk Pemukiman dengan maksud untuk memiliki secara berkelompok

Gambar 3. Strata C

4.	TYPE D	Yaitu melakukan aktifitas atau kegiatan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani dengan maksud menduduki dan atau memiliki disertai dengan adanya dokumen bukti-bukti kepemilikan seperti, Petok D/ Girik, dan lain-lain. Dalam hal ini ciri-ciri permasalahan dimaksud adalah sbb: ▪ Masyarakat tidak mengakui bahwa lahan adalah dalam status pengelolaan Perum Perhutani; ▪ Ada upaya untuk menjadikan lahan sebagai hak milik pribadi (perseorangan/kelompok); ▪ Memiliki bukti-bukti dokumen kepemilikan (Petok D, dll); Pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha yang intensif komersial (dalam bidang pertanian maupun usaha lain), dan atau untuk perumahan, kantor, serta fasilitas umum lain.

Pemanfaatan Lahan untuk Pemukiman yang dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan berupa sertifikat

Gambar 4. Strata D

Tabel 12. Rekapitulasi Konflik Tenurial Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2011
KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban Dalam Wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

No	KPH	Luas Wilayah KPH	STRATA KONFLIK												TOTAL KONFLIK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III				
			A			B			C			D							
			Jumlah	Jumlah	Luas	Jumlah	Jumlah	Luas	Jumlah	Jumlah	Luas	Jumlah	Jumlah	Luas	Jumlah	Jumlah	Luas	%	Keterangan
		(Ha)	Kasus	Petak	(Ha)	Kasus	Petak	(Ha)	Kasus	Petak	(Ha)	Kasus	Petak	(Ha)	Kasus	Petak	(Ha)	(18:3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PARENGAN	17,633.30	1	19	37.10	50	15	2.32	-	-	-	-	-	-	51	34	39.42	0.2	
2	JATIROGO	18,763.20	1	27	151.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	151.55	0.8	
3	TUBAN	28,602.50	2	11	202.40	40	40	110.30	1	3	1.87	-	-	-	43	54	314.57	1.1	
	JUMLAH	**64,999.00**	**4**	**57**	**391.05**	**90**	**55**	**112.62**	**1**	**3**	**1.87**	**-**	**-**	**-**	**95**	**115**	**505.54**	**2.13**	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Tahun 2012

4.2.4. Data Tenurial Di Kawasan Hutan KPH Parengan

Data tenurial di kawasan hutan KPH Parengan sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa kasus tenurial yang terjadi di KPH Parengan didominasi oleh kasus garapan liar dan bibrikan yang luasnya mencapai 98,2% dari keseluruhan kasus tenurial di KPH Parengan. Proses penanganan sampai sekarang masih berlangsung untuk mengurangi jumlah keluasan sehingga di-harapkan lahan yang dapat dibebaskan dapat dikelola kembali oleh KPH Parengan.

Tabel 13. Rekap Jenis Permasalahan Tenurial KPH Parengan Sampai dengan bulan Juni 2010

No	Jenis Tenurial	STRATA	∑ Kejadian	Luas (ha)
1	Bak Penampungan Air	B	1	0.0180
2	Bengkel	B	1	0.0028
3	Bibrikan	A	15	5.9000
4	Garapan Liar	A	247	1,929.4600
5	Kandang Sapi	B	1	0.0186
6	Masjid	B	1	0.0020
7	Pemukiman	B	8	0.1286
8	Pemukiman eks Kusta	B	1	2.0000
9	Toko	B	3	0.0181
8	Warung	B	7	0.2099
	Jumlah		283	1,937.7580

Sumber : Hugra KPH Parengan

Konflik tenurial di KPH Parengan berdasarkan hasil monitoring selama tahun 2010 terbanyak terdapat di BKPH Mulyoagung yaitu sebanyak 78 anak petak dengan luas 1.033,789 Ha. Bila dilihat dari bobot permasalahan 99,88% adalah kasus tenurial dengan strata A dan sisanya adalah kasus tenurial dengan strata B. Distribusi kasus tenurial per BKPH dapat disajikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 14. Rekap Tenurial Per BKPH Sampai dengan Bulan Juni 2010

No	BKPH	Strata A		Strata B		Total Kasus	
		Kasus	Luas	Kasus	Luas	Kasus	Luas
1	Malo	61	252.3100	-	-	61	252.3100
2	Pungpungan	28	104.8000	-	-	28	104.8000
3	Parengan S	23	131.3000	-	-	23	131.3000
4	Parengan U	42	176.9500	-	-	42	176.9500
5	Mulyoagung	65	1,031.4000	13	2.3980	78	1,033.7980
6	Montong	22	238.6000	-	-	22	255.6000
	Jumlah	**241**	**1,935.3600**	**13**	**2.3980**	**254**	**1,937.7580**

Sumber : Hugra KPH Parengan

Secara keluasan, kasus tenurial di KPH Parengan terbanyak terdapat di BKPH Mulyoagung yang kawasan Desa Sidonganti berada di dalamnya yaitu sebesar 1.031,400 ha atau 53,35% dari total kasus tenurial di KPH Parengan. Kemudian BKPH Malo dengan luas 252,31 ha atau 13,02% dan BKPH Montong sebesar 255,6 ha atau 12,31%. Mengerjakan kawasan tanpa ijin terjadi di petak 12 a, 13b, 14b, 15d, 16a, 16b, 17a RPH Guwoterus BKPH Mulyoagung tahun 2006-2008 didominasi oleh kawasan di lingkungan LMDH Sidomakmur Sidonganti (Lihat Lampiran-lampiran 7-14).

Akar permasalahan kasus tenurial di BKPH Mulyoagung terutama disebabkan oleh salah satu Masyarakat Desa Hutan (MDH) di daerah tersebut (Desa Sidonganti) yang mempunyai sikap ingin memiliki lahan—dengan cara hendak mengolahnya secara terus menerus—di lahan Perum Perhutani di wilayah mereka. Sehingga segala kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani perlu sosialisasi yang intensif agar tidak terdapat hambatan dari MDH tersebut.

4.2.5. Rencana dan Strategi Penanganan Masalah Tenurial

4.2.5.1. Rencana Penanganan Masalah Tenurial

Dalam rangka penanganan permasalahan tenurial, maka setelah dilakukan pemetaan permasalahan tenurial yang ada di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban selanjutnya dibuat rencana dan target penyelesaian masalah tenurial. Rencana dan target penyelesaian masalah tenurial dibuat secara bertahap yaitu adanya pengakuan tentang status kawasan hutan, pernyataan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan pengembalian fungsi hutan.

4.2.5.2. Strategi Penanganan Masalah Tenurial

Dalam menentukan strategi penanganan masalah tenurial, disamping permasalahan yang sudah ada kita juga harus mengaca pada sejarah permasalahan tenurial, konsep dasar penanganan, strategi teknis dan pelaksanaan dari strategi penanganan masalah tenurial tersebut.

Setelah mengetahui peta atau profil dan sejarah permasalahan tenurial, perlu disusun suatu kemungkinan strategi solusi-resolusi dengan prinsip bahwa konflik yang ada akan dikelola (*conflict management*) pada derajat dan suasana A sampai D.

Dengan latar belakang bahwa akar permasalahan yang timbul lebih banyak dikarenakan faktor sosial ekonomi dan budaya maka pendekat-an strategi penanganan permasalahan tenurial dengan langkah partisipatif *socio-cultural* dengan penjelasan sebagai berikut: (i) resolusi

konflik yang berbasis nilai kultural dengan membuka ruang komunikasi bagi persepsi dan pendapat masyarakat; (ii). resolusi konflik pengembangan dan pelibatan struktur kelembagaan yang sudah terbentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); dan (iii). Resolusi konflik pendekatan silvikultur sebagai bentuk kegiatan pemulihan potensi SDH.

4.2.5.3. Pelaksanaan Strategi Penanganan Masalah Tenurial

Pelaksanaan penanganan permasalahan tenurial dilakukan secara berjenjang dan bertahap yang skemanya dapat dilihat pada Diagram 1.

4.2.5.4. Tahapan Penanganan Masalah Tenurial

Pelaksanaan penanganan permasalahan tenurial dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Jajaran RPH dan BKPH sebagai ujung tombak penentu prioritas lokasi yang akan ditangani karena dekat dengan permasalahan dengan detail kondisi lokal spesifik masing-masing. Rencana kegiatan penyelesaian masalah tenurial tersebut dituangkan dalam *activity plan* masing-masing BKPH per petak dan selanjutnya setiap tahapan kegiatan penanganan masalah tenurial agar dilaporkan oleh KRPH atau Asper/KBKPH sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap penyelesai-an masalah tenurial tersebut kepada Administratur/KKPH

4.2.5.4.1. Identifikasi Masalah Tenurial

Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dilakukan dengan melakukan identifikasi. Kegiatan ini juga merupakan deteksi dini/awal permasalahan. Sehingga apabila terjadi permasalahan tenurial dapat segera ditangani tanpa menunggu permasalahan ini berlarut-larut dan menjadi besar serta sulit diselesaikan. Identifikasi masalah tenurial ini dilakukan oleh petugas/pelaksana di lapangan (Mandor Polter). Di dalam identifikasi ini, perlu memperhatikan tiga hal yakni: (i) melakukan inventarisasi lokasi permasalah; (ii) identifikasi motif, jumlah pelaku, asal pelaku, awal permasalahan, waktu kejadian dan peruntukan; (iii) melakukan pengelompokan/stratifikasi masalah tenurial sesuai dengan kriterianya.

Hasil identifikasi dicatat dan segera dilaporkan kepada KRPH setempat untuk diregister. KRPH kemudian menindak lanjuti hasil identifikasi mandor dengan melakukan pengecekan di lapangan. Selain itu KRPH membuat laporan kepada Asper/KBKPH untuk ditangani dan diselesaikan, apabila permasalahan sudah meluas dan BKPH tidak sanggup menangani segera dilaporkan ke KPH untuk ditangani level KPH. Kegiatan identifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan patroli

rutin yang dilakukan oleh Mandor Polter. Setiap bulan dibuatkan laporan hasil identifikasi kepada KRPH untuk dilanjutkan ke Asper/KBPH.

Diagram 1. Strategi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan KPH Parengan, Jatirogo, Dan Tuban

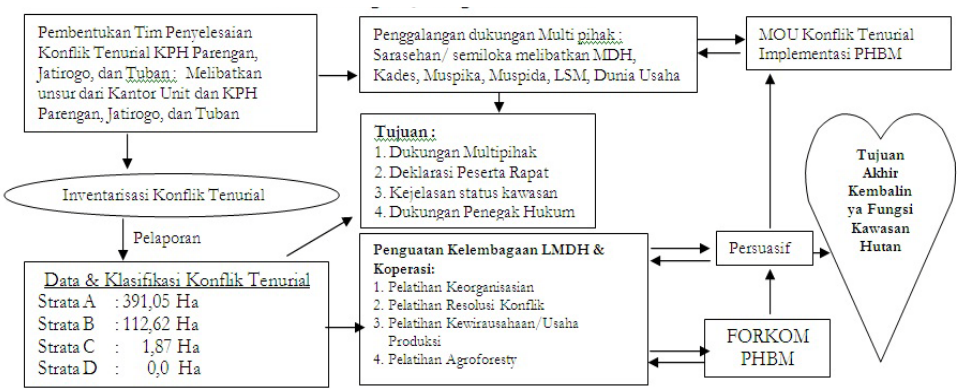

4.2.5.4.2. Pendekatan Kemasyarakatan *(Social Approach)*

Setelah dilakukan identifikasi oleh KRPH beserta mandor melakukan pendekatan dan penyadaran kepada masyarakat penggarap/yang memanfaatkan lahan tentang status kawasan hutan, tata aturan KPH menyangkut lahan yang digunakan pihak lain. Selain itu dengan melakukan pendekatan diharapkan permasalahan lahan tersebut diupayakan dapat diselesaikan dengan baik dengan cara mufakat.

Pendekatan dilakukan dengan cara perorangan atau kelompok baik dengan pesanggem maupun tokoh masyarakat dan aparat desa. Selain itu dengan melakukan pendekatan diharapkan dapat juga sebagai alat menggali keinginan masyarakat dan mengetahui akar permasalahan sehingga bisa dijadikan alat untuk penyelesaian masalah dan penentuan kebijakan lebih lanjut. Empat langkah yang perlu ditempuh adalah: (i). menyusun prosedur pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan kawasan hutan/tanah perusahaan dengan Masyarakat Desa Hutan atau para pihak yang berkepentingan (membangun upaya kolaborasi); (ii). Sosialisasi prosedur pemanfaatan/kerjasama pemanfaatan kawasan hutan/tanah perusahaan kepada Masyarakat Desa Hutan dan *multistake holder*; (iii). penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan dan petugas keamanan untuk meningkatkan pemahaman/penyadaran hukum; (iv). konsolidasi dengan pihak terkait seperti Pemerintahan Desa, Muspika, Muspida, Dinas dan Instansi terkait dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), LMDH, Perguruan Tinggi dan Multistake holder lainnya.

4.2.5.4.3. Sosialisasi

Sebagai tindak lanjut dari pendekatan dilakukan sosialisasi kepada segenap pesanggem dan penggarap liar serta Aparat Desa maupun Muspika tentang status dan fungsi kawasan serta dasar hukum penguasaan wilayah Perum Perhutani. Selain itu dengan melakukan sosialisasi diharapkan juga sebagai alat untuk menjaring/mengidentifikasi keinginan masyarakat secara luas dan memadukan dengan kebijakan manajemen untuk mencari solusi yang terbaik di dalam menyelesaikan permasalahan lahan serta membentuk opini dan alur pikir yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga bisa terbentuk kata mufakat. Apabila terjadi konflik tenurial juga diperlukan kegiatan manajemen resolusi konflik dengan melakukan negosiasi/perundingan maupun mediasi sehingga dapat dicapai kesepakatan dan mufakat.

4.2.5.4.4. Tindak Lanjut Hasil Sosialisasi

Untuk melaksanakan tindak lanjut hasil sosialisasi maka dilakukan enam hal sebagai berikut; (i). membuat perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani bersama dengan penggarap; (ii). Asper/KBKPH membuat laporan tertulis kepada Administratur tentang lokasi yang menjadi permasalahan atau sengketa; (iii). pemasangan plang larangan dan plang himbauan pada lokasi-lokasi rawan konflik; (iv). untuk penggarap liar yang telah panen dilakukan penutupan lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan dipasang plang larangan pengarapan lahan dilokasi tersebut; (v). menertibkan penggarap liar yang masih aktif dan diarahkan ke lokasi-lokasi yang bisa dilakukan pengelolaan hutan secara Tumpangsari serta mencegah mereka yang ingin masuk menggarap liar lahan di Perhutani; dan (vi). kerja sama dengan Aparat Desa dan Muspika untuk menyelesaikan permasalahan Tenurial untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan gejolak.

4.2.5.4.5. Pembuatan Kesepakatan

Hasil sosialisasi diwujudkan dengan penyusunan kesepakatan penyelesaian permasalahan tenurial dengan saling menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam kesepakatan dicantumkan bentuk penyelesaian permasalahan lahan, tata waktu penyelesaian,

aturan yang berlaku di dalam penanganan masalah tenurial. Batas berakhirnya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat.

4.2.5.4.6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring permasalahan terus menerus diperlukan untuk memper-oleh gambaran dan perkembangan detail petak permasalahan tenurial sebagai dasar penetapan dan *feed back* strategi yang ada dalam penanganan permasalahan. Bentuk monitoring dan evaluasi sebagai berikut: (i) penataan dan pengarsipan dokumen keagrariaan yang cermat dan rapi; (ii). penataan dan Pengarsipan Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Masalah Tenurial; (iii). penataan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, SOP, dan Arsip administrasi mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tenurial di dalam kawasan hutan dan tanah perusahaan; (iv). penataan Bahan Laporan; (v). pembuatan Kajian Tenurial yang komprehensif disesuaikan dengan tingkat kasus tenurial yang terjadi, dan rencana dan strategi penanganan dan penyelesaiannya; (vi). di tingkat KPH, perlunya Tim Kerja tiap bulanan membahas permasalahan tenurial dan langkah-langkah strategis penanganan dan penyelesaiannya; dan (vii). membuat target dan tata waktu penyelesaian masalah tenurial. Detil Rencana Tindak lanjut dalapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penanganan Konflik Tenurial Yang Dilakukan Oleh KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban

NO.	JENIS PENANGANAN	KEGIATAN
1	2	3
1	PREEMTIF	1. meningkatkan kegiatan komunikasi sosial, berupa pendekatan kemasyarakatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. 2. Implementasi PHBM, masyarakat Desa Sido-nganti perlu mendapatkan peningkatan kapasitas SDM berupa Pelatihan Kewirausahaan dan upaya menstimulasi kegiatan usaha produktif LMDH dalam upaya peningkat-an pendapatan masyarakat, seperti: Pembuatan hutan rakyat dan koperasi LMDH. 3. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan dengan LMDH dengan penanaman tanaman agribisnis/ agroindustri seperti porang.

		4. Koordinasi dengan jajaran Muspida/Muspika. 5. Mengadakan Penyuluhan hukum secara terpadu dengan pihak KAJARI dan POLRES TUBAN. 6. Mengadakan publikasi dan komunikasi dalam rangka membentuk opini publik dalam kegiatan penanganan dan penyelesaian konflik tenurial.
2	PREVENTIF	1. Pemasangan plang larangan merambah kawasan hutan. 7. Meningkatkan kegiatan Patroli Hutan baik Patroli Mandiri maupun Gabungan dengan Polri, terutama pada kawasan hutan yang rawan konflik tenurial (pembibrikan, okupasi, garapan liar) 2. Membuat surat pernyataan tentang pengakuan atas semua lahan garapan di kawasan hutan. 3. Inventarisasi Pal Batas yang hilang dan rusak di lokasi konflik tenurial dan diupayakan adanya pemasangan Pal yang baru. 4. Mengembangkan mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik tenurial melalui penanganan konflik dan alternatif resolusi konflik (negosiasi dan mediasi). 5. Meningkatkan komunikasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan eksternal Perhutani lainnya (media massa) guna mempercepat penyelesaian konflik tenurial.
3	PENEGAKAN HUKUM	1. Mengidentifikasi masalah tenurial dengan melakukan inventarisasi lokasi, permasalahan dan stratifikasi konflik tenurial. 2. Membuat surat himbauan kepada Kepala Desa guna mengingatkan masyarakatnya dalam pemanfaatan kawasan hutan guna mempercepat pengembalian fungsi hutan. 3. Melaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan terhadap kepemilikan sertifikasi di kawasan hutan. 4. Bekerjasama dengan instansi penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi terkait seperti BPN dalam rangka penyelesaian kasus tenurial strata C dan D.

4.2.6. Penguatan Kapasitas Sosial

Meskipun secara umum kapasitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar hutan di KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban relatif rendah dan marginal, akan tetapi masih memiliki potensi budaya yang dapat dibangkitkan dalam rangka penguatan modal sosial *(social capital)*, diantaranya saling percaya, pranata sosial yang masih diakui, kemauan untuk belajar, tingkat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapital sosial Masyarakat Desa Hutan dapat melalui proses pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan sosial (keberadaan LMDH dan Forum PHBM dibentuk dan diperkuat dengan peraturan desa) dan pendampingan masyarakat yang dipandu secara terpadu di dalam Implementasi PHBM. Proses yang memerlukan waktu dan biaya ini akan memberikan wawasan dan cara berpikir masyarakat sehingga dapat membuka akses terhadap informasi dan membebaskan masyarakat di sekitar hutan KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban dari keterbelakangan (pendidikan dan keterampilan) dan kemiskinan (mental dan ekonomi).

Program pengentasan kemiskinan memang seharusnya bukan hanya tanggung jawab Perum Perhutani, namun seharusnya juga di bawah koordinasi para pemangku kepentingan *(stake holders)* terutama Pemerintahan Kabupaten Tuban, program-program khusus untuk kesejahteraan masyarakat desa dapat disinkronisasi/sinergis dengan program-program yang dilaksanakan para pemangku kepentingan antara lain oleh Dinas, Badan, dan Instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Tuban. Bahwa kegiatan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan bantuan secara subsidi langsung kepada kelompok masyarakat miskin, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah pengelolaan sosial secara partisipatif, komprehensif, terencana dan sistematis yang mendorong proses pemberdayaan *(empowering)*, memberikan peluang *(enabling)*, dan memberikan perlindungan *(protection)*.

Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan implementasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban telah menginventarisir berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Sekitar Hutan, yang berbentuk paguyuban, atau kelompok masyarakat, yang secara umum disebut Kelompok Masyarakat Desa Hutan (KMDH). Tidak semua Kelompok Masyarakat Desa Hutan dapat langsung bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban.

Kelompok Masyarakat Desa Hutan yang belum memenuhi persyaratan diarahkan dan dibina oleh Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban, agar secara formal dapat menjalin kerjasama dalam berbagai aspek pengelolaan hutan. Empat persyaratan yang harus terpenuhi adalah: (i). anggotanya terdiri dari warga masyarakat desa hutan diutamakan yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan dan atau mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumber daya hutan; (ii). memiliki struktur organisasi, per-aturan dan mekanisme kerja, rencana kerja, rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hasil berbagi secara partisipatif; (iii). direkomendasi dan diajukan oleh Lembaga Pemerintahan Desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban; (iv). bersepakat bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);

Kelompok Masyarakat Desa Hutan yang memenuhi persyaratan berhak menerima hasil hutan kayu setelah melakukan perlindungan sumberdaya hutan yang menjadi tanggungjawabnya sekurang-kurangnya selama tiga tahun sejak disetujuinya perjanjian kerjasama. Hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu dimuat dalam perjanjian kerjasama yang disepakati dengan Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban. Dalam keadaan sangat khusus dengan pertimbang-an aspek keamanan tegakan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan dapat menerima haknya sebelum tiga tahun berdasarkan pertimbangan Administratur/KKPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban atas persetujuan Direksi Perum Perhutani.

Kelompok Masyarakat Desa Hutan memiliki sistem keanggotaan, kepemimpinan, dan bentuk organisasi yang sangat beragam. Untuk kemudahan pembinaan, koordinasi, dan monitoring pelaksanaan pekerjaan, bentuk kelembagaan Kelompok Masyarakat Desa Hutan yang dibina oleh Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban diarahkan menjadi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tanpa harus mematikan eksistensi kelompok dan dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah dan kekhasan sosial budaya setempat.

4.2.7. Pelaksanaan: Penguatan Kelembagaan LMDH, PBHM, dan Koperasi

Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka

Pengelolaan Sumberdaya Bersama Masyarakat (PHBM) dimulai dengan dua tahapan pra-kondisi sebagai berikut: (i). Pelaksanaan sosialisasi pembentukan/pengembangan LMDH dan keterkaitannya dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat di Perum Perhutani KPH Parengan, Jatirogo, dan Tuban. Kegiatan sosialisasi pembentukan/pengembangan LMDH bertujuan untuk memperkenalkan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat kepada semua pihak terkait. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten baik di wilayah Kabupaten Tuban; dan (ii). membangun kesepahaman *(bilateral matching institution)* tentang pengembangan LMDH dan PHBM kepada para pemangku kepentingan dalam menciptakan hubungan yang sinergis antara Perum Perhutani, Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), dunia usaha, masyarakat dan LSM.

Lima rencana aksi untuk penguatan LMDH, PHBM, dan Koperasi adalah: *Pertama,* mengidentifikasi kelembagaan. Langkah ini melakukan dengan identifikasi kelembagaan di desa adalah kegiatan inventarisasi kelembagaan yang ada di dukuh/desa baik lembaga formal, non formal maupun informal yang dapat menjadi mitra kerja dalam kegiatan. Sementara, identifikasi terhadap pihak pemangku kepentingan merupakan kegiatan inventarisasi terhadap kelompok/lembaga di desa dan kota dalam bentuk usaha kecil, koperasi dan perusahaan berbadan hukum yang dapat menjadi mitra usaha. Di Desa Sidonganti telah terbentuk LMDH "Sido Makmur" pada tanggal 26 September pada tahun 2006 dengan nomor pendirian No.3905.

Kedua, setelah kelembagaan yang ada di masyarakat teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan, mediasi, dan koordinasi untuk mendorong terbentuknya LMDH yang cikal-bakalnya dapat berasal dari organisasi yang sudah ada atau jika masyarakat menghendaki LMDH dapat dibentuk sebagai organisasi yang baru terlepas dari kelembagaan yang sudah ada sebelumnya di masyarakat. Pengembangan LMDH dipandang penting untuk me-wujudkan keberhasilan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) secara optimal. Pembentukan LMDH dapat dilakukan melalui empat tahapan sebagai berikut: (i). identifikasi profil desa dan potensi desa hutan dengan metode pendekatan secara partisipatif; (ii). sosialisasi kelompok Masyarakat Desa Hutan; (iii). pemantapan LMDH, Penjelasan AD/ART; dan (iv). pembentukan LMDH melalui rembug desa.

LMDH "Sido Makmur" *yang* telah terbentuk tahun 2006 sudah berlangsung selama 5 tahun lebih. Kondisi kelembagaan ini lemah,

nyaris tidak pernah pertemuan sejak pembentukannya. Organisasi tidak atau belum berjalan sebagaimana standar organisasi pada umumnya. Nama organisasi atau lembaga dan nama pengurus nyaris hanya eksis dalam tulisan yang tidak terlaksana dalam kenyataan.

Dalam *kondisi* LMDH "Sido Makmur" yang lemah ini seperti ini yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan antara lain: (i) penyegaran *(upgrading)* kepengurusan; administrasi dan organisasi; (ii). Resolusi konflik; (iii). Kewirausahaan/ usaha produktif; dan (iv); dan agroforesty.

Ketiga, selain mendorong pengembangan dan penguatan kelembagaan LMDH "Sido Makmur:" di Desa Sidonganti, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta selaras dalam pelaksanaan PHBM, perlu di-bentuk pula Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) di: (i). Tingkat Desa Sidonganti, (ii). Tingkat Kecamatan Kerek, Tingkat Kabupaten Tuban. Mekanisme FK PHBM di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan SK Gubernur, FK PHBM di Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan SK Bupati, di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan di Tingkat Desa oleh Kepala Desa.

Keempat, pembentukan Koperasi LMDH. Di Desa Sidonganti belum terbentuk Koperasi. Para pemangku kepentingan (stake holders), hendaknya melakukan pendekatan lebih intensif dan persuasif agar dapat terbentuk badan usaha seperti koperasi LMDH. Koperasi ini melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa Sidonganti. Seperti kebutuhan pertanian (bibit, pupuk, obat, alat pertanian), dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kelima, pembentukan Forkom (Forum Komunikasi) PHBM di Desa Sidonganti dengan Peraturan Desa. Melalui Forkom PBHM ini dapat dilakukan penguatan kelembagaan masyarakat di Desa Sidonganti.

4.3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

4.3.1. Pengantar

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan

manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Persoalan yang terjadi selama ini adalah implementasi Pengelola-an Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) belum berkorelasi positif terhadap keamanan hutan. Implementasi PHBM masih dipahami hanya sebatas Tumpangsari dan sharing ditambah lagi peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan belum berjalan dengan baik (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur:2011).

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Keputusan Dewas Perhutani nomor: 136/KPTS/DIR/2001). Maksud diterapkan sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) salah satunya adalah meningkatkan tanggung jawab serta peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keber-lanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Adapun untuk mencapai hal tersebut ditempuh dengan strategi meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumberdaya hutan.

Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan hutan adalah melalui pola PHBM. Pola ini ditengarai sudah ada sejak dulu, yakni representasi kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat di sekitar hutan. Akan tetapi, pola tersebut terpinggirkan dengan adanya pola kebijakan pengelolaan hutan berbasis negara *(state forest management)* yang marak terjadi pada era orde baru. Pola kebijakan ini cenderung eksploitatif sehingga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik, keterdesakan masyarakat asli. Dalam hal ini, PHBM muncul sebagai salah satu alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia yang mengalami pergeseran paradigma dari pengelolaan hutan berbasis negara ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat *(Community Based Forest Management)*.

Keterlibatan *stakeholder* dan masyarakat dalam pengamanan hutan dapat terwadahi dalam program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat). Sesuai dengan SK Direksi No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang PHBM menjelaskan bahwa PHBM suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi

dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan meliputi: (i) penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, (ii) pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan; serta (iii) perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. Sedangkan yang dimaksud dengan *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembang-nya PHBM, yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

4.3.2. Sejarah PHBM

Program PHBM di Perum Perhutani mulai dicanangkan tahun 2001. Sebenarnya program ini merupakan modifikasi dan tindak lanjut dari program pengelolaan sumberdaya hutan yang pernah diaplikasikan sebelumnya. Proyek "malu" (mantri hutan dan lurah) diciptakan tahun 1972, diikuti Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982, dan selanjutnya PMDH yang dilengkapi dengan Perhutanan Sosial (PS) pada tahun 1984. Kemudian PMDH dan PS dilengkapi lagi dengan Pembinaan Desa Hutan (PDH) pada tahun 1990, diteruskan lagi dengan PMDH terpadu pada tahun 1995, dan PHBM dengan tema "Sukses Tanaman dan Keamanan" tahun 1999.

Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa mempunyai beban tanggungjawab yang sangat besar terhadap kelestarian hutan. Termasuk KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban, pada saat ini berusaha memfasilitasi dan mewadahi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan, yaitu berupa kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan sebagai bentuk interaksi positif dimana partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutan selalu diutamakan. Sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) adalah bentuk interaksi Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan serta para pihak pemangku kepentingan (*stake holder*) yang mana dalam setiap kegiatannya senantiasa menerapkan prinsip berbagi peran, hak dan tanggungjawab dalam rangka mewujud-kan pengelolaan hutan yang lestari, yang ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/Dir/ 2001 dan untuk kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/Dir/2007, serta dilakukan perbaikan dengan

Keputusan direksi Perum Perhutani No. 862/KPTS/Dir/ 2009 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Ringkasan sejarah pengelolaan hutan khususnya di Pulau Jawa pada 40 tahun terakhir sejak tahun 1972 sampai dengan 2009, dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Sejarah Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa
Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2012

Kondisi sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa hutan di wilayah KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban yang sebagian besar penduduknya masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor

pertanian dan memanfaatkan hasil-hasil dari hutan, mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai SD sampai Perguruan tinggi. Sebagian besar masyarakat desa sekitar hutan mempunyai berlatar belakang pendidikan SD, bahkan ada juga yang SD saja tidak tamat. Terdapat sejumlah masyarakat yang sudah menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tingkat sekolah menengah SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi. Masyarakat dengan pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi cenderung enggan kembali ke wilayah desa tersebut yang hanya menyediakan lapangan kerja pada sektor pertanian. Sebagian kecil dari mereka yang bekerja sebagai PNS, juga buruh pabrik di perkotaan. Sedangkan untuk wanitanya terdapat juga yang mengadu nasib dengan bekerja sebagai TKI di luar negeri.

4.3.3. PHBM di Kabupaten Tuban

Perhutani khususnya KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban sebagai pihak yang ditugasi negara untuk mengelola hutan, telah ber-upaya membantu masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkat-kan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui peningkatan pen-dapatan masyarakat desa hutan, yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan seperti: penanaman tanaman pangan Tumpangsari, PLDT (Pemanfaatan Lahan di bawah Tegakan), *Sharing* atau bagi hasil PHBM dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), serta peningkatan usaha produktif. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pengelolaan hutan yang memberikan kontribusi langsung secara finansial bagi masyarakat desa sekitar hutan di areal Perhutani, berasal dari aktifitas sebagai tenaga kerja persemaian, penanaman, perawatan/pemeliharaan, peneresan dan penebangan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan bentuk kolaborasi antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan. Program tersebut selama ini telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Mendasarkan pada SK Direksi NO.136/KPTS/Dir/2001 tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilandasi oleh prinsip berbagi peran, hak dan tanggung jawab antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakehokders*) secara proporsional dalam pengelolan sumberdaya hutan, maka dibentuk suatu forum/lembaga di masing-

masing desa hutan. Melalui lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Sejak tahun 2004, di desa-desa yang kawasan hutannya termasuk dalam lingkup pengelolaan Perhutani, telah terbentuk lembaga formal yang lebih dikenal sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Lihat Lampiran 2, 3, dan 4).

Dari 62 desa hutan pada 11 kecamatan di Kabupaten Tuban, sampai saat ini telah terbentuk 160 LMDH—dari jumlah keseluruhan 202 LMDH—yang kesemuanya masuk kedalam wilayah KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban (Lihat Tabel 21). Berbagai program kerjasama antara LMDH dan Perhutani telah diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang telah diimplementasikan hingga saat ini. Realisasinya mulai dari kegiatan di dalam kawasan hutan yaitu; persemaian, tanaman, pemeliharaan, tebangan dan pengamanan wilayah hutan secara bersama-sama, Pengelolaan Lahan di bawah Tegakan (PLDT), *Sharing* produk PHBM, Tumpangsari dan kegiatan-kegiatan lainnya hingga fasilitasi pembentukan usaha perkoperasian dan berbagai program pelatihan. Melalui kerjasama tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, serta terwujudnya hubungan yang harmonis antara Perhutani dengan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah hutan. Sehingga kedepan terbentuk LMDH yang mandiri dan dapat berperan serta dalam pembangunan wilayah. Sampai Tahun 2011, di antara 202 LMDH yang sudah berstatus Mandiri berjumlah 5 LMDH yang kesemuanya berada di wilayah KPH Parengan (Lihat Tabel 21).

Terdapat empat bentuk kontribusi KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban terhadap pendapatan masyarakat dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan melalui PHBM, yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh dari sistem Tumpangsari yang berupa berbagai produk palawija baik yang langsung dimanfaatkan ataupun dijual. Disamping itu masyarakat juga diberikan kesempatan Memanfaatkan Lahan Di bawah Tegakan (PLDT) dengan pengembang-an berbagai tanaman umbi-umbian maupun berbagai tanaman obat-obatan (*empon-empon*).
2. Pendapatan yang bersumber dari keikutsertaan masyarakat sebagai tenaga kerja berbagai kegiatan pengelolaan hutan di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban, mulai dari kegiatan persemaian hingga kegiatan pemanenan/penebangan.
3. Pendapatan masyarakat melalui LMDH yang berupa hasil sharing dari produksi kayu hasil produksi KPH Parengan, KPH Jatirogo,

dan KPH Tuban sesuai dengan petak pangkuan masing-masing LMDH berdasarkan perjanjian dan mengacu peraturan yang ada.

4. Pendapatan masyarakat melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang disalurkan kepada pengusaha domestik, home industri, koperasi dan LMDH sebagai penguatan modal untuk pengembangan usaha kecil, walaupun hal ini berupa pinjaman lunak dan bukan merupakan pendapatan langsung, tetapi merupakan wujud kepekaan sosial Perum Perhutani KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Interaksi masyarakat desa hutan dengan kawasan hutan, terkait dengan aspek teknis pengelolaan hutan yaitu; sosial kemasyarakatan, ekonomi (tata niaga kayu), serta hukum dan penegakannya. Jika akses penduduk sekitar desa hutan masih terbuka dalam memanfaatkan hasil-hasil hutan berupa kayu bakar dan non kayu, serta terserapnya tenaga kerja mereka dalam pekerjaan-pekerjaan di bidang kehutanan, setidaknya akan membuka peluang ke arah peningkatan sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan. Namun jika masyarakat merasa kehilangan akses atas pemanfaatan sumberdaya hutan dan tidak terserapnya mereka dalam bidang-bidang pekerjaan produktif, kondisi tersebut akan membuka peluang terjadinya kerawanan hutan. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan harus ditopang oleh kegiatan-kegiatan yang lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Faktor-faktor tersebut tentunya akan semakin meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Foto 123, 124, dan 125 yakni pengambilan rencek atau kayu bakar, penanaman PLTD tanaman porang, dan Tumpangsari yang dilakukan oleh pesanggem merupkan bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa sekitar hutan, Perum Perhutani telah menerapkan sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), PLDT, Tumpangsari dan usaha produktif lembaga LMDH, yang diharapkan mampu membuka peluang bagi masyarakat desa hutan untuk dapat meningkat-kan pendapatan/penghasilan rumah tangga mereka. Jenis tanaman yang pada umumnya dibudidayakan oleh masyarakat desa

hutan pada program PLDT, antara lain: Porang, Tanaman Jarak, empon-empon dan lain-lain. Melalui program Tumpangsari yang diatur dengan perjanjian kerja sama antara Perhutani dengan penggarap lahan (petani *pesanggem*), diharapkan para petani dapat memperoleh pendapatan dari hasil panen tanaman yang dibudidayakan seperti padi gogo, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon, cabe, dan lain lain. Pesanggem yang terlibat dalam pengolahan lahan secara Tumpangsari di lahan Perhutani, diatur melalui kontrak lahan selama 3 tahun dan rata-rata mengolah lahan seluas 0,25 Ha/Org. Adapun untuk seluruh pendapatan yang diperoleh petani pesanggem dari hasil Tumpangsari ini merupakan hak para pesanggem, Perum Perhutani tidak mengambil keuntungan secara finansial, akan tetapi Perhutani memperoleh keuntungan berupa terpeliharanya tanaman pokok kehutanan (Jati).

Keterlibatan langsung Masyarakat Desa Hutan (MDH) pada kegiatan-kegiatan Unit Management, antara lain pada kegiatan: persemaian, penggarapan lahan (pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam), penanaman tanaman pokok, pemeliharaan tegakan, penjarangan, teresan, tebangan, dan penyaradan kayu. Profesi sebagai petani dan buruh tani, merupakan jenis mata pencaharian yang terkait langsung dengan aktifitas di hutan. Berikut gambaran masyarakat desa hutan yang terserap sebagai tenaga kerja (Persemaian, Tanaman, Pemeliharaan dan Tebangan) di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban.

4.3.4. Penyerapan Tenaga Kerja

Unit managemen KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban secara tidak langsung telah ikut memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan di bidang kehutanan. Keberadaan KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3.999 orang rata–rata per tahun yang bekerja dalam kegiatan-kegiatan kehutanan seperti persemaian, penanaman, pemeliharaan tegakan, penjarangan, teresan, tebangan, dan pengangkutan hasil hutan. Dengan adanya lapangan pekerjaan di bidang kehutanan ini, maka secara langsung ketiga KPH tersebut telah berkontribusi dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat desa sekitar hutan.

Selain pendapatan dari lahan andil maupun sebagai tenaga kerja, masyarakat juga mendapatkan tambahan pendapatan dari bagi hasil (*sharing*) dari kayu yang diproduksi oleh KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban pada petak-petak pangkuan LMDH. Hal tersebut merupakan wujud dari kerjasama sistem PHBM antara Perum Perhutani

KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban dengan masyarakat sekitar hutan melalui LMDH. *Sharing* yang didapatkan LMDH di ketiga KPH tersebut selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dimana dari tahun 2005 meningkat pada tahun 2006, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar LMDH yang terbentuk di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban belum memasuki umur perjanjian 3 tahun serta masih banyaknya lokasi kawasan hutan yang belum masuk kedalam petak pangkuan yang dikerjasamakan, sehingga berdasarkan ketetapan yang ada, LMDH tersebut belum berhak mendapatkan *sharing* penuh (Lihat Lampiran 4b).

LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada. Peran serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan sangat diharapkan dalam upaya pengamanan hutan dalam bidang keamanan, LMDH harus turut berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan dengan melaksanakan Patroli di hutan untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan. Namun fakta di lapangan peran anggota LMDH terhadap keamanan hutan pangkuannya banyak yang belum berjalan. Pengamanan hutan masih dilakukan oleh personel dari Perum Perhutani sendiri dan Polri untuk di Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mulyoagung dan Malo KPH Jatirogo.

Kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan memang masih jauh dari harapan. Walaupun LMDH telah juga difasilitasi pembentukan Koperasi LMDH dan diberikan wengkon di dalam kawasan hutan, namun optimalisasi lembaga yang berbadan hukum ini belum bahkan tidak maksimal. Tabel berikut adalah LMDH dan Koperasi LMDH dan jenis usaha yang telah difasilitasi Perum Perhutani dalam pembentukan-nya di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban.

Tabel 17. Nama LMDH Yang Sudah Berkoperasi di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban

NO.	KPH		NAMA LMDH	DESA, KECAMATAN, KABUPATEN	NO.BADAN HUKUM	JENIS USAHA
1	2		3	4	5	6
1	JATIROGO	1	SUMBER REJEKI	Kumpul Rejo, Bangilan Tuban	592.32/BH/020/414045/2005	Simpan Pinjam
		2	NGUDI LUHUR	Sidotentrem, Bangilan, Tuban	028/BH/XVI 28/414,045/2007	Simpan Pinjam
		3	KEDUNG ASRI	Kedungmakam, Jatirogo, Tuban	593,32/03/411,045/2001	Simpan Pinjam
2	PARENGAN	1	JATI MAS	Malo, Malo, Bojonegoro	05/BH/XVI.4/2008	Koperasi Serba Usaha
		2	SUMBER MAKMUR	Sukorejo, Malo, Bojonegoro	3F/BH/XVI,4/2008	Koperasi Serba Usaha
		3	WONO LESTARI	Mulyoagung, Singgahan, Tuban	008/PAD/XVI 28,414,045/2008	Koperasi Simpan Pinjam
3	TUBAN	1	Andhe-Andhe Lumut	Dadapan, Selokuro, Lamongan	518/BH/XVI.10/31/413.110/2008	
		2	Wono Sakti	Solokuro, Solokuro, Lamongan	518/BH/XVI.10/42/413.110/2008	
		3	Wono Lestari	Sendangharjo, Brondong, Lamongan	518/BH/XVI.10/70/413.110/2008	
		4	Hijau Lestari	Lembor, Laren, Lamongan	518/BH/XVI.10/ /413.110/2008	
		5	Barokah Sejati	Payaman, Payaman, Lamongan	518/BH/16.10/60	
	JUMLAH	11	LMDH		11	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 2012

Tabel 18. LMDH Yang Sudah PKS dan Kategorinya di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban Tahun 2009

No.	KPH	Jumlah LMDH sudah PKS	Kurang	sedang	Baik	Sangat baik
1.	Parengan	53	-	11	42	-
2.	Jatirogo	23	-	2	17	4
3.	Tuban	72	-	4	68	-
	JUMLAH	148	0	17	127	4

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Tahun 2010

Tabel 19. Daftar Nama-Nama LMDH Yang Mendapatkan *Sharing* Produksi Kayu Tebangan Tahun 2010 KPH Jatirogo

NO	NAMA LMDH	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	SHARING LMDH	PPH (15%)	PENRIMAAN BRSIH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wana B Lestari	Bate	Bangilan	Tuban	8,242,908	1,236,436	7,006,472	
2	Wono Makmur	Banjarworo	Bangilan	Tuban	8,572,997	1,285,950	7,287,047	
3	Wana Bangkit	Dikir	Tambakboyo	Tuban	9,513,919	1,427,088	8,086,831	
4	Wono Agung	Plajan	Tambakboyo	Tuban	8,169,336	1,225,400	6,943,936	
5	Tani Luhur	Jamprong	Kenduruan	Tuban	1,119,824	167,974	951,850	
6	Jati Mulyo	Bendolateng	Kenduruan	Tuban	917,078	137,562	779,516	
7	Wono Makmur	Wonocolo	Kedewan	Bojonegoro	2,019,558	302,934	1,716,624	
8	Sekar Jati	Sekaran	Jatirogo	Tuban	8,383,048	1,257,457	7,125,591	
9	Sumber Rejeki	Kumpul Rejo	Bangilan	Tuban	191,696	28,754	162,942	
10	Wana Tani Jaya	Dingil	Jatirogo	Tuban	13,291	1,994	11,297	
11	Wana Lestari	Ngulahan	Tambakboyo	Tuban	2,006,100	300,915	1,705,185	
12	Ngudi Luhur	Sidotentrem	Bangilan	Tuban	395,697	59,354	336,343	
Jumlah Total		**12 LMDH**	**5 Kecamatan**	**2 Kabupaten**	**49,545,452**	**7,431,818**	**42,113,634**	

Sumber: KPH Jatiirogo, 2012

Tabel 20. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Sharing Produksi Kayu Tebangan Tahun 2010 KPH Tuban

NO	BKPH	NAMA LMDH	ALAMAT			PETAK	JENIS TEBANGAN	TOTAL PERKAKAS (M3)	SHARING LMDH (Rp)	PAJAK (Rp)	NILAI BERSIH DITERIMA LMDH (Rp)	TANDA TANGAN
			DESA	KECAMATAN	KABUPATEN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jadi	Wono Subur	Gesikan	Grabakan	Tuban	22a1	A II	1,204.45	16,300,281	2,445,042	13,855,239	
2	Plumpang	Wono Makmur	Ngino	Semanding	Tuban	46a1	B 3	102.890	56,179	16,854	39,325	
		Wono Makmur	Ngino	Semanding	Tuban	58L	B 3	87.720	295,148	88,544	206,603	
		Selo Lumbung Rejo	Sumur Jalak	Plumpang	Tuban	62b	B 3	117.520	298,708	89,613	209,096	
		Wono Makmur	Gesing	Semanding	Tuban	81d2	B 3	63.680	190,271	28,541	161,730	
		Empu Supo	Dermawuharjo	Grabakan	Tuban	40b1	B 3	221.580	657,839	197,352	460,487	
3	Sundulan	Wono Asri	Sumberrejo	Widang	Tuban	8f	E	12.80	115,470	34,641	80,829	
		Wono Asri	Sumberrejo	Widang	Tuban	10a	E	10.06	103,915	31,174	72,740	
		Wono Asri	Sumberrejo	Widang	Tuban	8e1	E	2.47	55,718	16,715	39,003	
4	Jompong	Wono Lestari	Sendangharjo	Brondong	Lamongan	53c1	E	14.335	111,004	16,651	94,353	
		Wono Lestari	Sendangharjo	Brondong	Lamongan	42e2	B3	42.28	171,803	25,770	146,032	
		Wono Lestari	Sendangharjo	Brondong	Lamongan	43b2	B3	137.38	620,048	93,007	527,041	
		Ande-ande Lumut	Dadapan	Solokuro	Lamongan	55f10	E	3.31	38,389	5,758	32,630	
		Ande-ande Lumut	Dadapan	Solokuro	Lamongan	65a2	E	4.31	122,314	18,347	103,967	
		Ande-ande Lumut	Dadapan	Solokuro	Lamongan	64i	B3	730.81	3,509,379	526,407	2,982,972	
		Ande-ande Lumut	Dadapan	Solokuro	Lamongan	67f	B3	635.40	3,142,583	471,387	2,671,196	
		Hijau Lestari	Lembor	Brondong	Lamongan	34a3	B3	1,048.32	3,433,187	514,978	2,918,209	
		Wono Makmur	Gelap	Laren	Lamongan	45f	B3	158.48	495,947	148,784	347,163	
		Harapan Jaya	Plangwot	Laren	Lamongan	50g	B3	298.69	1,696,955	509,086	1,187,868	
5	Kranji	Wono Joyo	Dagan	Solokuro	Lamongan	76c	A	178.42	1,025,480	307,644	717,836	
		Wono Sakti	Solokuro	Solokuro	Lamongan	80a	E	188.95	1,449,667	217,450	1,232,217	
		Barokah Sejati	Payaman	Solokuro	Lamongan	73c1	B	3.05	10,772	3,232	7,541	
			JUMLAH					5,267.10	33,901,055	5,806,978	28,094,077	

Sumber: KPH Tuban, 2012

4.3.5. Upaya Strategis Perlindungan SDH

Hubungan antara kegiatan perlindungan sumber daya hutan dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak dapat dipisahkan. Kegiatan perlindungan SDH (Sumber Daya Hutan) dengan menerapkan kegiatan implementasi PHBM, ditujukan dalam rangka menjaga hubungan kemitraan yang baik antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan dan segenap multi stake holder. Strategi perlindungan SDH tersebut dilakukan secara terpadu dan berjenjang dengan tiga upaya: (i) preemtif; (ii). preventif; dan (iii). represif.

Pertama, preemptif, yaitu strategi penanganan gangguan keamanan hutan dengan melakukan kegiatan penyadaran kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mengubah NIAT seseorang, sekelompok orang atau masyarakat yang semula negatif menjadi positif. Pendekatan preemptif dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan pendidikan, pendekatan partisipatif dan kearifan budaya lokal. Wujud pendekatan ini antara lain penyediaan lapangan kerja (pekerjaan persemaian, tanaman, tebangan dll.), Komunikasi Sosial (Komsos), PHBM, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), bantuan sarana prasarana/saprodi kepada masyarakat, pendidikan lingkungan, studi banding LMDH, pembentukan kelompok belajar dan pendidikan dasar (SD dan TK), Bimbingan Belajar (SMP dan SMA/MA) yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, penyusunan program PHBM bersama dengan masyarakat/ multistakeholder.

Kedua, preventif, yaitu usaha penanganan gangguan terhadap eksistensi hutan dengan melakukan kegiatan PENCEGAHAN. Kegiatan ini bertujuan membatasi KESEMPATAN seseorang, sekelompok orang atau masyarakat agar tidak melakukan tindakan negatif/pidana hutan/pencurian pohon. Kegiatan di lapangan yang termasuk dalam kegiatan preventif yaitu melakukan penjagaan di pos-pos jaga, patroli secara mobil/perondaan, PTM (Patroli Tunggal Mandiri), penyanggongan, patroli gabungan dengan LMDH maupun dengan aparat Kepolisian, koordinasi dengan Muspika/Muspida, asistensi/supervisi perusahaan kayu bersama Dinas Kehutanan dan Polres, serta menggugah partisipasi LMDH dengan kegiatan Pamswakarsa.

Ketiga, represif, yaitu upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumber daya hutan melalui tindakan baik sendiri maupun bekerjasama dengan aparat kepolisian, dan instansi terkait dengan mengoptimalkan penegakan supremasi hukum dalam penyelesaian

perkara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada seseorang, sekelompok atau masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya dalam mengganggu eksistensi hutan. Langkah represif ini merupakan langkah terakhir, setelah langkah Preemtif dan Preventif, dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi keamanan hutan yang kondusif.

4.3.6. Upaya Strategis PHBM dan Komunikasi Sosial

Keterlibatan stakeholder dan masyarakat dalam kegiatan pengaman-an hutan dapat terwadahi dalam program PHBM dan kegiatan Komunikasi Sosial, dimana PHBM dan Komunikasi Sosial secara filosofis berkeingin-an mengajak masyarakat untuk mengelola hutan dengan prinsip berbagi, berbagi peran/tanggung jawab/ruang dll, yang sebenarnya sudah merupakan strategi yang sangat bagus guna mengatasi beberapa akar permasalahan gangguan keamanan hutan. Namun dalam implementasi-nya, masyarakat yang diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terkadang bukanlah orang-orang yang secara langsung berinteraksi dengan hutan sehingga tak jarang terjadinya miskomunikasi dalam penerapan program-program perusahaan di lapangan. Oleh karena itu perlunya lima upaya sebagai berikut: (i). Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) belum dipahami secara benar oleh Petugas Perum Perhutani dan Masyarakat sekitar hutan, maka harus mengadakan sosialisasi dan internalisasi PHBM kepada Internal dan Eksternal; (ii). Pembentukan LMDH yang dalam hal ini sebagai Mitra Kerja Perhutani, haruslah benar-benar representasi dari para penggarap dalam kawasan hutan; (iii). Diharapkan bahwa seluruh pesanggem mengetahui secara jelas hak-hak dan kewajiban-kewajibannya pada obyek yang dilakukan kerja sama; (iv). Petugas Perhutani selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua obyek kerjasama PHBM, agar pelaksanaan di lapangan selalu mengindahkan peraturan-peraturan maupun isi Perjanjian Kerjasama (PKS PHBM), sehingga meminimalisir terjadinya konflik seperti konflik tenurial dll; (v). Penerapan mekanisme kerjasama haruslah mencantumkan sanksi bagi pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Juga adanya reward yang diberikan dengan berbasis kepada seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan.

Keberhasilan implementasi PHBM di masing–masing daerah memang tidak bisa disamakan. Beberapa daerah implementasi PHBM cukup efektif dalam upaya pengamanan hutan, namun masih banyak pula daerah yang kurang berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program PHBM.

Oleh karena itu perlu 13 upaya untuk memperbaiki implementasi PHBM yakni: (i). Pemetaan LMDH, melakukan identifikasi LMDH berdasarkan karakteristik wilayah, program-program kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan, agroekosistem/agroekonomi, prospek pemasaran dll; (ii). Peningkatan Fungsi LMDH; (iii). Tujuan yang ingin dicapai dengan Program PHBM antara lain: (1) membangkitkan rasa tanggung jawab semua pemangku kepentingan terhadap fungsi dan manfaat hutan, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan; (iv). Keberadaan LMDH hendaknya ditekankan untuk meraih tujuan pokok tersebut. LMDH jangan hanya sebatas organisasi saja tetapi harus pula memiliki kegiatan yang kaya fungsi untuk mencapai kelestarian hutan; (v). Revitalisasi LMDH; (vi). Program PHBM seyogyanya lebih difokuskan dan diperkuat dengan basis partisipasi aktif membangun dan rasa memiliki dari semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam operasional-isasinya perlu diupayakan koordinasi dan keterpaduan kerja antar semua pihak; (vii). Pengembangan kemampuan *(capacity building)* dan kelembagaan (*institutional building*) masyarakat petani merupakan hal yang patut mendapatkan perhatian. Implementasinya, prinsip ketatalaksanaan kolaboratif partisipatif *(participatory collaborative management)* mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan perlu dijadikan pedoman dalam program PHBM agar dapat berjalan efektif dan efisien; (viii). Program unggulan; (ix). Pengembangan program unggulan bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan seperti membuat program-program peningkatan produktifitas lahan, contoh: pengembangan budidaya komoditi tahan naungan. Program unggulan di luar kawasan seperti pengembangan peternakan domba dengan sistem bagi hasil. Upaya ini disinergikan dengan Program Dinas Peternakan seperti penggemukan domba. Program unggulan lainnya seperti pembentukan koperasi simpan-pinjam dan usaha pemasaran pupuk bagi anggota LMDH; (x). Kolaborasi dengan Bidang Keamanan; (xi). Melibatkan LMDH dalam inventarisasi sumber daya hutan di dalam petak pangkuannya. Patroli bersama Perhutani dan LMDH dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan hutan. Kegiatan-kegiatan ini semua dilakukan untuk meningkat-kan peran LMDH turut mengamankan petak hutan wengkonnya; (xii). Pendampingan kepada LMDH secara intensif; (xiii). Keberhasilan kegiatan Perlindungan SDH kuncinya terletak di dalam pengawalan tanaman sampai akhir daur. Pengawasan melekat perlu dilakukan dengan mengadakan pendampingan oleh

Perhutani terhadap LMDH sebagai Mitra Kerja atau melakukan kegiatan Komunikasi Sosial secara intensif. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh LMDH sesuai dengan program kerja Perhutani dan termonitor dengan baik.

Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan/Komunikasi Sosial kepada LMDH adalah sebagai berikut: (i). Datang ke LMDH. Hal ini dilakukan guna perkenalan dan pendalaman dengan mendekatkan hubungan emosi, dalam tahap ini bertujuan memperbaiki hubungan baik/harmonisasi; (ii). Tinggal bersama. Hal ini dilakukan guna mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan riel yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan kolaborasi dengan Perhutani. Petugas Perhutani menempatkan sebagai fasilitator dan inovator, sehingga dapat menggugah masyarakat untuk bekerjasama dengan Perhutani secara kolaboratif; dan (iii). Pelaksanaan Program Kerjasama dengan pola PHBM. Dalam rangka solusi dari meningkatnya intensitas dan frekuensi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan, maka salah satu langkah kolaborasi adalah pelaksanaan Agroforestry di kawasan hutan Perhutani.

4.3.7. Pelaksanaan: Forum Komunikasi PHBM

PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya kesejah-teraan masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan. PHBM juga merupakan media dalam rangka mengatasi gangguan keamanan hutan. Forum Komunikasi (Forkom) PHBM merupakan suatu kelembagaan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan berbagai hal untuk optimalnya pencapaian tujuan pelestarian tanaman hutan dan kesejahteraan masyarakat dalam program PHBM. Di Kabupaten Tuban, belum terbentuk Forkom PHBM di tingkat Kabupaten, begitu pula di tingkat, kecamatan, dan desa. Provinsi Jawa Timur telah membentuk Forkom PHBM ini. Oleh sebab itu, signifikan memperhatikan kritik yang dilontar-kan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Perum Perhutani tentang pentingnya pembentukan Forkom PHBM ini dalam rangka pembenahan agar bisa lebih efektif menyusul banyaknya keluhan masyarakat sekitar hutan atas program itu, padahal 9,81 juta jiwa penduduk Jatim berada disekitar hutan[1]. Menurut Gubernur, tingkat efektifitasan pengelolaan PHBM ini rendah. Ditaksir mencapai

[1] http://www.bisnis.com/articles/perhutani-jatim-diminta-benahi-phbm-agar-efektif, di akses 4 Maret 2012, jam 10.02

sekitar angka 25%-30%. Masyarakat menilai kepentingannya tidak banyak tertampung dengan program PHBM. Karena program itu (PHBM) lebih berorientasi pada tujuan Perhutani *an sich* (Lihat Lampiran 20)

Terbentuknya Forkom PHBM di Kabupaten Tuban merupakan topik utama yang dibahas oleh 60-an ketua LMDH yang diselenggarakan di "Mangrove Center" pada tanggal 8 Januari 2012 (Lihat Foto 110 dan 111). Kegiatan ini dimotori dan difasilitasi oleh Ali Manshur, ketua "Mangrove Center". Mereka bersepakat untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pada para pembina LMDH di tiga KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban.

Dalam persiapan pembentukan Forkom PHBM itu mereka bersepakat akan menghadirkan 700-an orang yang antara lain terdiri atas 5 orang anggota pengurus untuk masing-masing LMDH. Kesepakatan yang dicapai antara lain jumlah kontribusi yang ditanggung masing-masing LMDH, pembentukan panitia kecil yang mewakili forkom LMKD yang antara lain bertugas untuk mengkomunikasikan kepada "Bapak"nya masing di KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban.

Saat menyampaikan sambutan, KSS-PHBM dari Kantor KPH Tuban, Bapak Syachul Rochman menyatakan bahwa kehadirannya sesungguhnya tidak diundang. Namun terpanggil untuk hadir saat mem-peroleh informasi dalam kaitannya dengan pembentukan Forkom PHBM yang bagian dari Tupoksi—Tugas Pokok dan Fungsi—nya. Dalam sambutannya juga ditegaskan bahwa merupakan tugas kita bersama untuk melestarikan hutan dan memakmurkan masyarakat. "Di Tuban ini, jangan sampai terjadi lahan dan tanamannya tidak menjadi hutan dan hutannya justru berubah menjadi tegalan," yang disambut tertawa oleh segenap para hadirin. Pada kesempatan ini Bapak Sachurrahman juga menyatakan kesediaannya untuk mem-berikan dukungan dana yang disambut tepuk tangan dari hampir seluruh hadirin.

Aspirasi yang tumbuh dari bawah *(bottom up)* seperti ini sebaiknya segera direspons positif oleh para pelaksana dan penentu strategi-kebijakan di Perum Perhutani. Langkah-langkah strategis yang sebaiknya dilakukan oleh Perum Perhutani adalah: (i). Koordinasi internal di tiga KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban; (ii). Komunikasi dan koordinasi lebih detil kepada pengurus Forkom LMDH; (iii). Meng-komunikasikan kepada para pemangku kepentingan lainnya di kawasan Tuban, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan/perusahaan swasta; (iv). Menyiapkan secara lebih sistematis dan terencana bagi terbentuknya Forkom PHBM Kabupaten Tuban dengan

melibatkan multi pemangku kepentingan; (v). Menetapkan penjadwalan pembentukan Forkom PHBM.

Respon Bupati/Wakil Bupati Tuban dalam rencana pembentukan Forkom PHBM Kabupaten Tuban ini adalah "siap melaksanakan. Para Kepala KPH di Kabupaten Tuban adalah adik-adik saya". Maksudnya, ia menjelaskan kedekatan dan keakrabannya sehubungan dengan para pejabat di lingkungan KPH Tuban dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur adalah adik kelas beliau saat kuliah di IPB (Institut Pertanian Bogor).[2]

4.4. Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

4.4.1. Penguatan Kelembagaan: LMDH dan Koperasi

Kebijakan Perum Perhutani yang ditetapkan pada tahun 1996 dalam Keputusan Direksi Nomor 1837/Dir/1996 tentang Penerapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan, di 23 KPH Provinsi Jawa Timur telah terbentuk sejumlah 1.745 LMDH sampai tahun 2011. Jumlah tersebut mengalami penurunan angka dibandingkan pada tahun 2010 yang berjumlah 1449 LMDH. Dari jumlah LMDH di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 tersebut sejumlah 7 (0,40%) LMDH berstatus pemula, 469 (26,87%) berstatus muda, 1206 (69,11%) berstatus madya, dan 67 (3,83%) berstatus mandiri (lihat *Lampiran 1*). Dari jumlah tersebut, LMDH di lingkungan tiga KPH Jatirogo, KPH Parengan, dan KPH Tuban dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Dengan perincian LMDH di lingkungan KPH Jatirogo berjumlah 27 pada tahun 2010 dan 29 LMDH pada tahun 2011. LMDH di KPH Tuban berjumlah 72 tahun 2010 dan 51 LMDH pada tahun 2011. Melalui data tersebut, terdapat 5 LMDH yang berstatus mandiri di KPH Parengan (Lihat Tabel 21.) Secara lebih terperinci, ketiga KPH yang LMDH berlokasi di wilayah administratif Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut, Lihat lampiran 2, 3, dan 4.

[2] Audiensi dengan Bupati/Wakil Bupati Tuban, Selasa 20 Maret 2012 di Kantor Bupati Tuban. Peneliti juga menyampaikan aspirasi para ketua Forkom LMDH di lingkungan KPH Tuban, KPH Jatigoro, dan KPH Parengan yang telah berkeinginan untuk menghadap untuk beraudiensi dan konsultasi kepada Bupati Tuban, dalam rangka pembentukan Forkom PHBM Kabupaten Tuban, yang sampai saat itu belum juga diberikan waktu untuk menghadap.

Tabel 21. Perbandingan, Perkembangan, Kriteria LMDH di KPH Jatirogo, KPH Parengan, dan KPH Tuban

No.	KPH	TAHUN									
		2010					2011				
		Pemula	Muda	Madya	Mandiri	Jumlah	Pemula	Muda	Madya	Mandiri	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Jatirogo	-	12	15	-	27	-	14	15	-	29
2	Parengan	-	3	50	-	53	1	10	106	5	122
3	Tuban	1	35	36	-	72	-	18	33	-	51
JUMLAH		1	50	101	-	152	1	42	154	5	202

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2012, Diolah.

Memperhatikan data LMDH di Jawa Timur yang umumnya masih dalam status pemula, muda, dan madya, sesungguhnya dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas bangunan kapasitas *(capacity building)* LMDH-LMDH tersebut. Hal tersebut juga terungkap dalam diskusi Forkom (Forum Komunikasi) LMDH se-Kabupaten Tuban meliputi Forkom LMDH di KPH Tuban, KPH Jatirogo, dan KPH Parengan yang diselenggarakan, hadir 60-an ketua LMDH, pada tanggal 8 Januari 2012 yang lalu (Lihat foto 110 dan 111). Pada diskusi tersebut dijelaskan, bahwa LMDH harus lebih kuat dengan terbentuknya Forkom PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Kabupaten Tuban. Mayoritas LMDH ini sudah berbadan hukum tetap, mayoritas dari jumlah itu sudah memiliki Koperasi LMDH (Lihat Lampiran 2 dan 3). Namun umumnya belum memiliki keberdayaan yang memadai. Di antara sebabnya adalah umumnya para pengurus LMDH itu berketer-batasan latar belakang pendidikan, keterbatasan ekonomi yang mencolok, juga keterampilan berorganisasi. Mereka berharapan agar 'bapak' LMDH ini yakni KPH lebih memperhatikan LMDH melalui pengurus-pengurusnya. Pelatihan-pelatihan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di setiap LMDH agar kualitas SDM pengurusnya semakin memadai. Penguatan kepada kelembagaan LMDH melalui pengurus-pengurusnya seperti itu diharapkan dapat menguatkan kelembagaan masyarakat. Penguatan kelembagaan di masyarakat diharapkan dapat mencapai sukses melestarikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Dalam tabel 21 di atas terdapat perkembangan yang terjadi pada tahun 2011, yang pada tahun ini telah menghasilkan 5 LMDH yang berstatus mandiri. Status kemandirian dari lima LMDH tersebut penting untuk dijadikan media pembelajaran bagi LMDH lainnya yang

berstatus madya, muda, apalagi yang masih pemula. Media pembelajaran itu berpeluang untuk dilakukan, sehubungan dengan lokasi dan jarak yang relatif terjangkau yakni di lingkungan Kabupaten Tuban, sehingga dapat dijangkau oleh alat transportasi sederhana misalnya Sepeda Motor untuk sampai ke lokasi itu.

Meskipun masyarakat desa sudah difasilitasi terbentuknya LMDH dan Koperasi LMDH, dinilai oleh pengurus Forkom LMDH di lingkungan KPH Tuban, sebagai tidak ada hasilnya. "Buktinya sampai sekarang tidak ada hasil. Masih tetap saja", katanya dalam diskusi dengan peneliti seusai acara Forkom itu. Namun ketika peneliti melakukan cek kepada para ketua di sejumlah LMDH, tidaklah begitu. "Kami sudah difasilitasi dengan sejumlah pelatihan antara lain pembuatan pupuk kompos yang hasilnya dibeli oleh Perhutani." "Hanya saja", lanjutnya, "produk kami hanya dibeli dalam jumlah tertentu saja di awal tahun. Sedangkan di bulan-bulan berikutnya Perhutani tidak membeli pupuk yang kami produksi." Ujar Pak Tarto, ketua LMDH "Wono Mulyo" saat berdiskusi di Desa Guwoterus (Lihat Foto 13, 14, dan 15). Sementara Pak Momon Suparman, Ketua LMDH "Wono Lestari," bukti kemanfaatan pelatihan-pelatihan yang diselenggara-kan oleh dinas dan instansi pemerintah terkait adalah tentang budidaya dan pemeliharaan ikan di air sungai yang di desa itu, yang airnya ter-sedia cukup melimpah. Pernah dilakukan dua tahun sebelumya, dan cukup berhasil. Namun karena pengelolaannya di bawah kewenangan desa, yang melibatkan banyak orang, maka keberhasilan itu menjadi terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Keberlanjutan dalam melaksanakan kegiatan seperti itu yang diakui oleh Pak Momon sebagai kekurangan dirinya dalam mengembangkan masyarakat. Diperlukan tim pengelola yang kuat dan berkomitmen tinggi, merupakan solusi dalam pengem-bangan dan penguatan masyarakat.

"Bagaimana kami bisa memandirikan masyarakat, kalau kami sendiri belum mandiri", kata Pak Sumari, Ketua LMDH "Wono Bangkit" di halaman depan Pos PTM 16 BKBH Ngulahan KPH Jatirogo dalam FGD tanggal 25 Januari 2012, yang disepakati oleh dua orang ketua LMDH lainnya, yakni Bapak Jait, Ketua LMDH "Wono Lestari" dan Bapak Sudjati, Ketua LMDH "Gemulung Jaya" (Lihat foto 44, 45, 46). Agar dapat memandirikan masyarakat, faktor utama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, anggota LMDH harus memiliki unit produksi berbasiskan lahan pertanian dan atau terutama pada lahan persil yang dikelola oleh Perum Perhutani. Pada diskusi tersebut, jenis tanaman

yang visibel untuk ditanam anggota LMDH adalah tanaman Kayu Putih berikut pendirian Pabrik MKP (Minyak Kayu Putih). Ketiga ketua LMDH itu bersepakat untuk melaksanakan gagasan tersebut. Ketika peneliti mengecek keyakinannya tentang program tersebut, dengan pertanyaan, "Khan panen daun Kayu Putih, membutuhkan waktu 5 tahun. Jika ditanam tahun 2012 berarti daunnya baru dapat dipanen tahun 2017. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keseharian, bagaimana?" secara tegas, dikatakan Pak Jati, "khan masih dapat melakukan pertanian dengan menanam Polowijo".

Ide penanaman pohon Kayu Putih digulirkan kembali oleh Wakil ADM di KPH Jatirogo pada pertengahan Januari 2012. Adalah Ir. Anang Tejo Anggoro, Wakil ADM itu, yang telah mengudang para tokoh masyarakat di tiga desa kritis itu. Mereka yang diundang dan hadir adalah para Kepala Desanya yakni Sidonganti, Desa Trantang, dan Desa Gemulung beserta LMDH di sekitar wilayah itu. Mereka hadir semua dan menyampaikan gagasannya tentang ide penanaman Kayu Putih itu. Kajian lebih terperinci tentang kelayakan penanaman dan pengolahan Kayu Putih juga telah dilakukan oleh KPH Parengan (Lihat Lampiran 6).

Dalam pandangan menejemen Perum Perhutani menyatakan bahwa program untuk tanaman kayu putih di kawasan Desa Sidonganti dan sekitarnya, sudah ada beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, Perum Perhutani telah membuat program pemberdayaan masyarakat di sana melalui tanaman ini. Namun, karena kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat tersebut kurang intensif, maka perlu untuk diperbaiki dan dibuat pengadaan baru lagi," kata Kepala Seksi Komunikasi Sosial Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Mubarok N.A. Sigit, setelah berkunjung ke KPH Jatirogo dan Parengan pada hari Kamis (02/02/2012)[3].

Tindakan lanjutan untuk segera merealisasikan program pemberdaya-an masyarakat tersebut, Perhutani KPH Jatirogo sendiri juga telah melakukan beberapa komunikasi dengan para tokoh masyarakat di rumah salah satu di Desa Gemulung, Kecamatan Tambakboyo. Semua tokoh elemen masyarakat tersebut, menurut Anang Tejo Anggono, Wakil Administratur Perhutani KPH Jatirogo, hadir untuk berkomunikasi dan menginginkan tanaman jenis kayu putih segera direalisir dalam waktu yang tidak lama. Berdasar data di Perhutani KPH Parengan, saat ini tanaman kayu putih yang berada di

[3] http://berita.maiwanews.com/ antisipasi-pembalakan-warga-diberi-garapan-kayu-putih-25098.html. Diakses Minggu , 8 April 2012 jam 14.12.

beberapa petak-petak hutan di wilayah BKPH Mulyoagung masih terdapat ribuan tanaman jenis ini dengan kondisi masih bisa untuk dimanfaatkan.[4]

Saat dikonfirmasi tentang masalah ini, salah satu tokoh masyarakat asal dusun Bangkok, Desa Gemulung, Kecamatan Tambakboyo, membenarkan bahwa sikap Perhutani sudah banyak berubah dan segera memberdayakan masyarakatnya. "Kami sangat antusias dengan keinginan yang telah deal dengan mereka. Itu cita-cita kami agar timbul kepedulian terhadap hutan sekitar kami. Kami sudah lama ingin hutan di sekeliling kami hijau kembali," tutur Mbah Jati, yang juga ketua LMDH "Gemulung Jaya" saat hadir dalam pertemuan di desa tersebut (Lebih terperinci tentang fesibilitas tanaman kayu putih dapat dibaca pada Lampiran 6).

Perum Perhutani KPH Parengan dalam pengelolaan hutan dengan tanaman kayu putih di sekitar pangkuan desa Sidonganti sebagai *buffer zone* pada tahun 2010 telah direncanakan seluas 250,8 Ha, yang sudah realisasi seluas 156,2 Ha. Masih sisa 94,6 Ha, dilanjutkan pelaksanaan penanaman pada tahun 2010 dengan jarak tanam 6 x 1 meter agar terdapat ruang yang longgar bagi para penggarap untuk tanaman Tumpangsari mereka.

Upaya menjadikan LMDH mandiri setelah dibentuk LMDH "Sido Makmur" di desa Sidonganti melalui pemilihan secara voting ternyata Bapak Ahmad mendapatkan suara terbanyak mengalahkan dua calon lainnya. Ahmad terpilih menjadi ketua LMDH 11 Agustus 2006 yang pada perkembangannya juga terpilih sebagai Kepala Desa Sidonganti. Perum Perhutani KPH Parengan telah memberikan pembinaan dan pendampingan dengan sosialisasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), penyuluhan kehutanan, pertanian, memberikan pelatihan managemen LMDH, pelatihan usaha prodoktif kepemimpinan, peternakan dan perkoperasian. Sejak tahun 2006 telah diberikan dana Sharing produksi kayu: (i). tahun 2006 berjumlah Rp. 723.559,- dan (ii). tahun 2009 berjumlah Rp. 13.205.495,- (iii). Diberi pinjaman lunak dana PKBL sebesar Rp. 5.000.000,- dan (iv) beberapa peluang kerja membuat kompos, memborong kerja persiapan tanaman, mengangkut bibit dan produksi kayu. Di lokasi petak-petak hutan yang berada di sekitar Desa Sidonganti juga sering digunakan untuk praktek/pelatihan lapangan oleh siswa siswi SMK Kehutanan "Wali Songo" Gomang Tuban.

[4] *Ibid*

Badan Hukum Koperasi dengan maksud diharapkan LMDH "Sido Makmur" desa Sidonganti cepat bisa mandiri. Penguatan kelembagaan LMDH ini juga dapat dilakukan dengan penyusunan demplot (*Demonstrasi* dan *Plotting*) dengan membuat areal hutan percontohan pada masing-masing LMDH. Percontohan ini dipandang penting sehubungan dengan gagalnya penanaman hutan terutama di wilayah Kabupaten Tuban bagian Barat, yang sampai sekarang tidak bisa tumbuh hutannya. Terdapat pertanyaan besar, sampai kapan kegagalan ini boleh berlangsung. Yang terjadi adalah arel "gundul" entah sampai kapan kegagalan ini dilakukan tanpa batas penyelesaian (Lihat foto-foto 29, 30, 47, 51, 52, 85. 91, 92, 97).

Hutan percontohan menjadi bagian tema dalam diskusi dengan masyarakat di desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, pada 1 Februari 2012. Jenis tanaman yang lebih pendek umurnya untuk panen adalah tanaman Sengon yang dapat panen antara usia 8 sampai 10 tahun. Tidak harus semua lahan persil yang ditanami pohon Sengon itu, tetapi sebagai percontohan cukuplah beberapa petak pada masing-masing LMDH. "Di petak lahan yang mana yang boleh ditanami pohon Sengon itu?" Tanya saya. Mereka sempat berpikir, dan ketika saya tawarkan di lahan yang dikelola penanam (penyanggem)nya yang juga anggota pengurus LMDH. Saat dijumlahkan di antara 10 anggota pengurus LMDH, menurut ketua LMDH "Wonoasri" Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Tuban, empat orang pengurus yang sekaligus sebagai pengurus LMDH adalah dapat menyetujuinya. "Bagaimana caranya?" Tanya peneliti. "Saya akan sampaikan kepada para anggota pengurus" kata Pak Mustak, ketua LMDH ini, didampingi Pak Tosim, TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) di wilayah KPH Tuban Barat, dan para staf lainnya (lihat Foto 82, 83, dan 84).

Bagaimana caranya agar tanaman itu tidak dirusak oleh masyarakat?. Ketika peneliti tawarkan agar melibatkan para penanam (pesanggem) sejak dari awal perencanaan sampai kepada monev (monitoring dan evaluasi). Sejak dari perencanaan, para pesanggem sudah dilibatkan dalam pembuatan bibit pohon Sengon. Setelah berfikir sejenak, kemudian memberikan tanggapan bahwa sepertinya dengan pola seperti itu me-mungkinkan sekali para pesanggem itu mempunyai rasa memiliki tanaman dan karenanya juga merasa terpanggil untuk juga turut menjaga dan atau merawatnya. Masyarakat juga dilibatkan dalam penyediaan pupuk kandang dan kompos yang peruntukannya adalah untuk memberi-kan pupuk kepada tanaman yang sudah ditanamnya. Kondisi yang demikian itu, berbeda secara diametral apabila para

pesanggem dan buruh tani di lokasi desa itu 'hanya" dipakai sebagai tenaga kerja (buruh) diminta untuk menanam suatu tanaman, sedangkan bibitnya disediakan oleh Perum Perhutani.

Model penguatan masyarakat melalui kelembagaan LMDH seperti ini yang diharapkan dapat dilakukan oleh para pemangku kewenangan *(stake holders)* di lingkungan Kabupaten Tuban. Secara bertahap dan konsisten, pemangku kewenangan itu memberikan kesempat-an kepada masyarakat untuk belajar mandiri, dengan membuat bibit, pupuk, tanaman hutan. Baik tanaman hutan rakyat maupun hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

4.4.2. *Enabling, Empowering*, dan *Protecting*

Pemberdayaan dalam penelitian ini diartikan sebagai (i) *enabling* (penciptaan lingkungan); (ii) *empowering* (penguatan), dan (iii) *protecting* (perlindungan) masyarakat bukan sekedar mengajak mereka untuk ikut terlibat secara aktif (partisipasi dan mobilisasi) dalam perencanaan dan pelaksanaan program, melainkan juga bangkitnya semangat untuk memiliki dan mengontrol seluruh aktivitas program. Ketiga unsur pemberdayaan tersebut bukanlah merupakan bagian yang terpisah namun merupakan bagian yang saling mengkait dan menguatkan. Salah satu dari ketiga unsur itu terlepas menjadi timpang dalam pelaksana-annya.

Bagaimana peranan pihak luar dari masyarakat yang hendak memberdayakan dirinya sendiri tersebut? Pihak luar hendaknya semakin menyadari penempatan posisi dirinya yang hanya berperan sebagai fasilitator. Bukan lagi sebagai regulator yang sekaligus adalah operator yang sama sekali menempatkan masyarakat hanyalah sebagai obyek penderita. Regulasi telah menegaskan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Implementasi di masyarakat hendaknya dapat terbebas dari bayang-bayang dominasi dari lembaga eksekutif baik dari Perum Perhutani, Muspida, dan Muspika.

Sudah saatnya para "pembina", yang diberikan amanat oleh Negara dalam melaksanakan tugasnya menyadari peran penting para aktor di level paling bawah yakni di pedesaan khususnya desa-desa di lingkungan kawasan hutan itu untuk juga secara ikhlas menempatkan posisi para aktor sebagai subyek dalam penyusunan program pemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat. Masyarakat adalah pemilik dan penentu program itu sendiri. Melalui pemberdayaan masyarakat semacam ini tidak saja, semua pihak telah melakukan penyebaran nilai (*value transmitting)*, melainkan juga penciptaan nilai (*value creating*) (Sutrisno, 1997).

Dalam rangka penanganan permasalahan gangguan keamanan hutan, maka diperlukan penyusunan langkah-langkah konsepsional strategis semacam RIP (Rencana Induk Pengembangan), atau peta jalan (*road map*) yang berisi rencana dan target penyelesaian masalah dalam mengatasi gangguan keamanan hutan. Rencana dan target penyelesaian haruslah melibatkan *stakeholder* lainnya sesuai dengan level kewenangan secara komprehensif. Para Stakeholders itu antara lain terdiri dari fihak eksekutif- legislatif-yudikatif, pemerintah terdiri dari Perum Perhutani dan Pemda (Kabupaten Tuban dan Pemprov Jatim, antara lain Dinas Kehutanan, Pertanian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penyuluh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja), Dunia Usaha, dan Masyarakat (Forum LMDH), dan LSM peduli kemandirian masyarakat dan lingkungan hidup. Penanganan permasalahan gangguan keamanan hutan harus berangkat dari permasalahan yang mendasar sejak dari hulu sampai hilir.

Memperhatikan faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya gangguan keamanan hutan, maka model kearifan lokal dalam penguatan atau pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di lingkungan kawasan Desa Sidonganti hendaknya mempertimbangkan lima hal sebagai berikut: (a) isu strategis atau visi yang hendak dicapai dalam P3 (*people*, *planet*, dan *product*); (b). faktor-faktor penyebab; (c) strategi untuk mengatasi kendala tersebut; (d). rencana aksi; dan (e). pelaksana sebagai *leading sector* untuk mengawal, memfasilitasi kegiatan sampai meraih keberhasilan *(out come)* dari rangkaian target yang ditetapkan. Komponen *Road map* kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dapat dilihat pada tabel 22.

4.4.2.1. *Enabling:* Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Pemberdayaan dalam pengertian *enabling* (penciptaan lingkungan) dilakukan Perum Perhutani dengan membangkitkan semangat untuk bersama dalam pelaksanaan program PHBM dalam merencanakan, melaksanakan dan mengontrol aktivitas program. *Enabling* berarti tergeraknya niat baik untuk bersama masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kegiatan yang dilakukan Perum Perhutani melalui KPH adalah: (i) mengkomunikasikan dan mendiskusikan dengan Forkom LMDH dalam penyusunan program Tahunan, semesteran, triwulan dalam pengelolaan SDH; (ii). Mendiskusikan bersama Forkom LMDH tentang problem-problem dan penyusunan solusi dalam pengelolaan SDH; (iii), mendialogkan penyusunan zonasi pengelolaan SDH (Zona

Ekologi, Zona Enonomi, dan Zona Bisnis) di Kabupaten Tuban; (iv). Mendialogkan pola dan bentuk Demplot (Demonstrasi dan Ploting) pengelolaan SDH; (v). pembuatan persemaian bibit bersama LMDH atau kelompok tani hutan; (vi). Penentuan jenis tanaman FGS *(Fast Growing Species)*, seperti tanaman Sengon, Jabon, dan lain-lain; dan (vii). Mendialogkan penerapan sistem *Agro Foresty*.

4.4.2.2. *Empowering:* Kelembagaan dan Koperasi

Pemberdayaan dalam pengertian *empowering* (penguatan) masyarakat dilakukan agar mereka difasilitasi untuk terlibat lebih aktif (partisipasi dan mobilisasi) dalam perencanaan, pelaksanaan dan program BHBM. Perum Perhutani telah memfasilitasi terbentuknya LMDH "Sido Makmur" pada tahun 2006 dan telah berbadan hukum nomor pendirian No.3905. Setelah terbentuk, sebaiknya dilakukan penguatan-penguatan dengan sejumlah pelatihan dan pendampingan antara lain: (i) organisasi dan kepengurusan; (ii). Pelatihan resolusi dan rekonsiliasi konflik; (iii). Kewirausahaan dan usaha produktif; (iv). Pelatihan agro foresty.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan menfasilitasi pembentukan Koperasi LMDH di Desa Sidonganti dengan kegiatan-kegiatan serba usaha dengan penyediaan bahan-bahan dan peralatan pertanian. Fasilitasi pembentukan koperasi di Desa Sidonganti sangat tidak disarankan dengan kegiatan Simpan Pinjam dalam jangka pendek dan menengah. Kebudayaan masyarakat Sidonganti belum kondusif melaksanakan kegiatan simpan pinjam ini. Masyarakat lebih banyak meminjamnya dari pada menyimpannya. Kebutuhan pertanian yang disediakan dan dikelola Koperasi Serba Usaha ini adalah penyediaan bibit, obat, pupuk tanaman Tumpangsari atau tanaman hutan dan peralatan pertanian lainnya. Dimungkinkan juga memfasilitasi kegiatan industri kecil dan rumah tangga yang mengolah berbagai kegiatan industry berbahan baku dari kekayaan lokal.

4.4.2.3. *Protecting:* Usaha Kreatif dan Produktif

Pemberdayaan dalam pengertian *protecting* (perlindungan) oleh masyarakat dan para pemangku kewenangan yang juga mengajak masyarakat ini untuk ikut terlibat secara aktif (partisipasi dan mobilisasi) dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan. Pelibatan dalam perlindungan juga dilakukan untuk mengontrol aktivitas program.

Perlidungan dalam pengertian perlindungan ini adalah pemfasilitasan berbagai kreasi dan produksi masyarakat Desa Sidonganti, hendaknya

dapat dilengkapi dengan fasilitas distribusi dan pemasarannya. Produksi yang telah dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu langkah maju yang patut memperoleh penghargaan. Penghargaan yang konkrit adalah penyediaan pembeli(*buyers*)nya.

SDM (Sumber Daya Manusia) di Desa Sidonganti yang potensial untuk dikembangkan hendaknya memperoleh pemberdayaan dari segenap pemangku kepentingan agar dapat memperoleh layanan pendidikan sejak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi.

4.4.3. Masyarakat Berdaya: Pendekatan Hati dan Perut

Dua pendekatan dan atau strategi jitu yang tidak boleh dilupakan untuk dilakukan oleh siapapun yang berkehendak untuk memberdayakan masyarakat adalah pendekatan hati dan pendekatan perut. Dua pendekatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan hati dan pendekatan perut tersebut pernah terbukti berhasil mengubah *mind set* (pola pikir) dan perilaku masyarakat di kawasan "segitiga emas" (*golden triangle*) di pegunungan sekitar perbatasan Thailand-Burma-Laos. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini telah turun-temurun menjadi pelaku (aktor) utama dalam pemasok 70% lebih kebutuhan Opium dunia. Keberhasilan strategi merebut hati dan mengisi perut ini telah berhasil melenyapkan ladang opium yang diganti dengan menghadirkan berjuta wisatawan ke lokasi tersebut (*Jawa Pos*, 14-18 Januari 2009).

Bagaimana menerapkan pendekatan hati dan perut tersebut pada masyarakat di kawasan Desa Sidonganti ini?

Sampai pada awal tahun 2012, nyaris, tidak satupun orang dan atau lembaga apalagi aparat yang mau berhubungan dengan masyarakat desa Sidonganti. Masyarakat di sekitar desa itu juga pernah mempertanya-kan kehadiran kami di desa tersebut, yang tinggal bersama mereka sampai hampir satu pekan. "Untuk apa?" Tanyanya. "Bisa jadi anda adalah korban berikutnya. Waspada dan hati-hati, atas barang bawaan Anda" sergah teman lainnya, dengan mengacungkan telunjuk untuk menunjuk kepada kendaraan yang kami bawa.

"Untung masih cabang pohon, bukan kaki anda", salah seorang petugas Perhutani mencontohkan tanggapan sebagian aktor di desa itu ketika diingatkan agar tidak memotong atau merusak tanaman atau cabangnya. Pernyataan seperti itu membuat kecut dan "keder" bagi siapapun yang bertugas di kawasan Sidonganti. Sementara petugas dari kepolisian saat ditelepon oleh Perhutani untuk melaksanakan kegiatan

patroli atau operasi hampir selalu diikuti oleh konfirmasi tempat, "kemana?" "wahh…. Sedang banyak kegiatan", kata petugas di kepolisian itu ketika disebutkan lokasi patroli itu adalah desa Sidonganti.

Hampir kesemua petugas Perhutani menyatakan "percuma", dan "tidak ada gunanya" untuk memperhatikan dan membantu Sidonganti. Pesimisme semacam itu sudah sampai pada kesimpulan "Sulit mengubah karaker masyarakat Sidonganti". Dengan demikian, sudah tertutuplah, segala kemungkinan dalam upaya untuk memperbaiki masyarakat Sidonganti. Perkecualian adalah KPH Parengan melalui Wakil Kepala Adminstratur Deddy yang menyatakan secara tegas perlu memperhati-kan atau mempedulikan masyarakat Sidonganti[5].

Perhatian, sebagaimana yang dinyatakan oleh KPH Parengan tersebut, menurut peneliti, sesungguhnya masih mengindikasikan terbukanya peluang untuk mengubah watak dan perilaku masyarakat. Masih terdapat secarcah harapan untuk dapat memperbaiki masyarakat Sidonganti. Sekecil apapun persentasenya. Dalam perspektif tersebut sesungguhnya pernyataan "sulit" yang dilontarkan oleh sejumlah kalangan di kawasan Kabupaten Tuban, hendaknya dihapus dari kamus kehidupannya. Pernyataan tersebut hendaknya diganti dengan "tidak mudah". Perbedaan pernyataan "tidak mudah" ini cenderung menggunakan paradigma optimism dan *khusnudhhon* (berprasangka baik) kepada setiap orang. Namanya orang atau manusia, hatinya dapat diubah dengan sentuhan dan cara yang tepat. Sehingga dapat terbuka dan menjadi sebab mereka berubah arah untuk berperilaku baik.

Pendekatan hati berarti pendekatan dari hati ke hati. Masyarakat Sidonganti harus didekati dari hati ke hati ini agar teridentifikasi dan tereksplorasi segala kehendak dan kemauan dasar mereka yang dilanjutkan dengan membangun komitmen untuk melakukan perubahan. Perubah-an yang mendasar hanya dapat dilakukan oleh para aktor dari dalam. Mengintegrasikan kehendak para aktor di kawasan tersebut merupakan kunci dari perubahan. Sejumlah aktor utama di desa itu berasal dari klan atau marga yang berbeda dan selalu dalam posisi berkompetisi. Problem pribadi dimasa lampau terbawa dan diusung sampai kepada generasi anak, cucu, dan menantu laki-laki. Kalangan perempuan mendukung konstruksi sosial semacam itu. Kondisi demikian harus dicairkan dan selesaikan secara tuntas dengan cara konsiliasi dan mediasi[6]. Keberhasilan mengintigrasikan konflik internal di Desa

[5] Wawancara pada 2 Januari 2012

[6] Dahrendorf, 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society.* Stanford University Press.

Sidonganti merupakan dasar dari perbaikan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kompetisi adalah merupakan sesuatu yang alami dan semakin optimal bila terarah kepada pembentukan karakter utama (*prime and good character*) semisal terpuji, prestasi, berperilaku terbaik, perbaikan terus menerus. *Stakeholders* sebaiknya terus melaksanakan fungsi fasilitator dan negosiator serta *role model* dalam kegiatan pemberdaya-an ini.

Bersamaan dengan pendekatan hati tersebut, harus pula dilakukan pendekatan perut. Maksudnya, perbaikan karakter di masyarakat desa juga disertai dengan perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar mayoritas warga masyarakat di desa Sidonganti. Tabel 5 menjelaskan tentang mata pencaharian penduduk yang berusia produktif (kerja) di desa Sidonganti berjumlah 97% buruh tani dan petani serta lainnya jasa perdagangan. Pemberdayaan ekonomi hendaknya berbasis pada budaya pertanian.

Kegiatan pertanian yang layak dipertimbangkan untuk dibudidayakan adalah berbagai tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek keseharian (tanaman palawija dan berbagai hortikultura), jangka menengah (tanaman kayu putih), jangka menengah dan panjang (tanaman Sengon, Jati Stek Pucuk).

Industri dari berbagai skala, baik besar, terutama menengah, dan kecil hendaknya segera direalisasi di lingkungan Desa Sidonganti. Industri hendaknya berbasis pada sumberdaya alam dan produk pertanian serta peternakan yang tersedia di lingkungan Sidonganti. Misalnya industri pengolahan jagung dan kacang tanah. Industri pengolahan itu meliputi pengolahan jagung, pohon dan daunnya pasca panen (raya). Begitu pula industri pengolahan kacang, pasca panen hendaknya dapat dilakukan pengolahan oleh orang lokal, baik buah kacangnya maupun pengolahan batang dan daunnya untuk makanan ternak dan atau pupuk kompos. Industri kerajinan tangan berbahan daun pandan dan pohon bambu juga potensial dikembang-kan di Desa Sidonganti. Begitu pula industri pengolahan buah nangka. Kedua produk ini tersedia cukup melimpah di desa ini.

4.4.4. Hutan Terjaga: Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH)

Kelestarian lingkungan alam merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan ini. Memelihara dan menjaganya berarti kita memelihara kehidupan itu sendiri. Air (dalam bentuk konkrit yang kelihatan mata)

dan oksigen (dalam bentuk abstrak yang tidak kelihatan mata) sebagai bagian dari lingkungan alam, sangatlah dibutuhkan oleh kehidupan tanaman, hewan, dan terutama oleh manusia. Tersedianya air yang cukup dan tidak tercemar merupakan kebutuhan kita semua untuk mewujud-kan, meningkatkan jumlah dan kualitasnya, juga melestarikannya. Untuk mewujudkan ketersediaan air melalui mata air di sejumlah lokasi, kita harus menanam pohon baik pohon atau hutan lindung, maupun pohon atau hutan tanaman industri.

Pelestarian dan perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. PP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 46 s/d 51 serta pasal 77 dan pasal 80 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kegiatan perlindungan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi dan produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pasal 1). Kegiatan perlindungan di wilayah yang dikelola Perhutani, dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Perum Perhutani.

PP No. 72 tahun 2010 juga menegaskan yang dimaksud dengan kegiatan penyelenggaraan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa berhubungan dengan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani meliputi: (i) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (ii) pemanfaatan hutan, (iii) rehabilitasi dan reklamasi hutan, (iii) perlindungan dan konservasi alam, (iv) pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, (v) diklat di bidang kehutanan, (vi) pengembangan *agroforestry*, (vii) membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/atau hutan tanaman rakyat, (viii) perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain. Kondisi pengelolaan hutan saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal sehingga sistem perlindungan perlu penguatan.

Dalam perspektif empiris, masyarakat di lingkungan hutan sangat membutuhkan volume air dengan kualitas air bersih tidak tercemar dalam jumlah yang harus lebih dari cukup. Desa-desa di kawasan

Sidonganti, Trantang, dan Gemulung, sangat merasakan betapa berharganya air. Kebutuhan mendasar tersebut dirasakan baik pada masa penghujan, lebih-lebih pada masa kemarau. Sumber air yang tersedia di Dukuh Soco Desa Sidonganti setiap hari dipergunakan masyarakat sebagai sumber utama penyediaan air bersih (Lihat foto 54-59, 93-98). Setiap hari para warga masyarakat di Sidonganti menggunakannya untuk kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus). Warga masyarakat juga mengangkut air dari sumber (mata) air itu untuk di bawa ke rumah-rumah tempat tinggal mereka. Tidak kurang dari 3 jurigen ukuran 20 liter diangkut dengan cara menggendong dan atau mengangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor ke tempat tinggal mereka. Kebutuhan air akan semakin meningkat minimal berjumlah lima jurigen besar apabila jumlah anggota keluarga bertambah misalnya mempunyai seorang anak bayi. Kondisi yang demikian dilakukan oleh warga Sidonganti tidak saja berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan sejak tahun 70-an sampai sekarang. Hippam (Himpunan Pengusaha Air) yang telah memasang pompa air dan pipa-pipanya di desa Sidonganti juga belum berhasil mengucurkan air sehubungan debit minimal yang dibutuhkan tidak terpenuhi jumlahnya. Air merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi di samping untuk memenuhi kebutuhan perut (pangan), terutama juga sandang, dan papan (perumahan).

Menyadari kebutuhan air yang secara langsung dirasakan oleh warga masyarakat, sudah selayaknya menyelesaikan permasalahan itu dari akar (hulu)nya yakni harus melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di kawasan itu. Sukses menanam berarti telah berkontribusi kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bahkan dunia dalam konteks penyediaan, air dan sekaligus oksigen. Penanaman pohon juga berfungsi untuk penanggulangan erosi, banjir saat musim hujan dan tanah longsor, dan kekeringan di musim kemarau. Gerakan menanam milyaran pohon dengan demikian merupakan suatu yang relevan dan signifikan maknanya yang tidak dapat ditunda lagi untuk dilakukan juga di kawasan Desa Sidonganti.

Kesadaran untuk menanam pohon dengan demikian merupakan kebutuhan yang tidak boleh ditunda pelaksanaan dan keberhasilannya. Semua fihak melalui *stakeholders* dan tokoh masyarakat hendaknya mempunyai keyakinan bahwa Kabupaten Tuban harus berhasil melaksanakan program penghutanan kembali. Melalui penghutanan kembali dari lahan "gundul" berarti akan mencapai maksud "tuban" sesungguhnya yakni "*metu banyune*" (bahasa Jawa yang berarti keluar

airnya). Masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban dapat mengakses kebutuhan air dengan jumlah yang memadai dan bebas dari pencemaran.

Penghutanan kembali lahan-lahan dapat dilaksanakan secara *top down* melalui Perum Perhutani yang telah diberikan kewenangan oleh Negara yang pelaksananya dilakukan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan). Penghutanan juga harus dilakukan melalui gerakan *bottom up* gerakan penanaman hutan rakyat dan hutan "partisipatif". Di sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban, hutan rakyat telah dilakukan oleh sejumlah komponen masyarakat. Salah seorang perangkat desa "Bapak Kamituwo" (begitu orang biasa memanggil) di Desa Trantang telah menanami lahan pertaniannya dengan pohon jati berjumlah 400-an pohon dan telah berusia enam tahun. Sejumlah masyarakat juga telah melakukan penanaman pohon jati (lihat foto 6 dan 7). Penanaman hutan rakyat ini hendaknya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama pada saat dan pasca panen, dalam kaitannya dengan perijinan yang dalam Protap (Prosedur dan Pentahapan)nya harus melampaui sekian jumlah meja, sejak dari tingkat desa, Muspika, Muspida sampai dengan rekomendasi Bupati. Protap seperti ini dirasakan kurang kondusif dalam memberikan dukungan dan perlindungan *(protecting)* kepada masyarakat dalam program hutan rakyat.

3.4.5. Penataan Zonasi

Desa Sidonganti merupakan bagian dari kawasan Tuban Barat yang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir kondisi hutannya dalam keadaan "gundul". Program penanaman pohon jati juga terus dilaksanakan oleh KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban. Namun tanaman pohon jati itu tidak dapat tumbuh alias "gagal". Gagalnya tanaman itu untuk hidup, tumbuh dan berkembang, umumnya disebabkan oleh perusakan yang dilakukan orang dan atau hewan piaraan di kawasan Sidonganti.

Perusakan kepada tanaman yang dikelola Perhutani digolongkan dalam tiga jenis yakni: (i). perusakan kepada tanaman pohon jati yang baru saja ditanam; (ii). Perusakan yang dilakukan kepada tanaman yang sudah tumbuh dan hidup sampai berumur lebih tiga tahun; dan (iii). Perusakan yang dilakukan kepada pohon jati yang sudah besar. Jenis perusakan yang ketiga ini oleh Perhutani disebut sebagai pencurian. Perusakan tanaman pohon jati yang dikelola oleh Perum Perhutani disebut "gangguan keamanan pencurian hutan" (Lihat tabel 4 dan 5). "Apakah tidak mengerti bahwa perusakan itu melanggar peraturan atau melawan hukum"? tanya peneliti kepada tokoh pemuda yang juga ustadz—menjadi khotib pada saat sholat jumat—di desa Sidonganti.

"Mereka juga tahu itu. Tetapi, ya itulah. Masyarakat disini kurang memiliki kesadaran tentang kewajibannya, dan sekaligus mengedepankan hak-haknya." Jawabnya lebih lanjut. Maksud dari perilaku perusakan kepada tanaman pohon jati tersebut oleh para pelakunya adalah (i). pemanfaatan kayu dan (ii). pemanfaatan lahan.

Pertama, memanfaatkan kayunya (untuk pagar di jalan, dan atau untuk bahan kayu bakar. Pemanfatan kayu di hutan dengan cara *merencek* dan atau mengambil kayunya telah diakui oleh Mustak ketua LMDH "Wono Asri" di Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek. Desa ini berbatasan dengan Desa Sidonganti kecamatan yang sama. "Selama masih ada kayu (di hutan), maka masyarakat akan terus menggunakannya sebagai kayu bakar." Kata Mustak saat dilaksanakan FGD di Desa Tengger Wetan pada awal Februari 2012. "Bagaimana dengan bahan bakar LPG *(Liquified Petroleum Gas)*," tanya peneliti pada saat FGD itu. "Masyarakat di sini masih takut menggunakan LPG untuk memasak", sergahnya lebih lanjut untuk menjelaskan penolakan masyarakat dalam menggunakan LPG sebagai bahan bakar dalam memasak makanan.

Kedua, pemanfaatan lahan di lokasi Perhutani itu dimaksudkan agar dapat terus ditanami tanaman pertanian "Tumpangsari" oleh para pesanggem (penggarap lahan di areal Perhutani). Dengan melakukan perusakan tanaman pohon jati itu para pelakunya dapat melaksanakan kegiatan penanaman Tumpangsari secara terus menerus, tidak seperti yang diharapkan dalam program penanaman ini oleh Perhutani yakni sampai pohon jati berusia tiga tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan program penanaman PLDT (Pemanfaatan Lahan Di bawah Tegakan) dengan tanaman jenis empon-empon.

Mengapa para "pesanggem" itu melakukan perusakan kepada tanaman tersebut? Budaya untuk mempertahankan subsistensi pertanian dan penyediaan terutama kebutuhan pangan *(food security)* bagi warga di kawasan Desa Sidonganti adalah jawabannya. Masyarakat di kawasan ini masih dilanda euforia "lapar lahan" bersamaan dengan ketersediaan lahan di wilayah itu yang dikelola oleh Perhutani. Lapar lahan dan ketergantungan kepada lahan Perhutani seperti ini secara bertahap perlu dilepaskan. Tegasnya, harus dilakukan pemutusan matarantai-nya. Untuk memutus matarantai ketergantungan kepada lahan Perhutani hendaknya disusun rancangan (design) tata kelola Sumber Daya Hutan (SDH). Tata kelola SDH di kawasan Desa Sidonganti dan umumnya di wilayah Kabupaten Tuban bagian barat adalah dengan

menetapkan tatakelola tiga zona yakni (i) zona ekologi; (ii) zona ekonomi-bisnis; dan (iii) zona sosial.

3.4.5.1. Zona Ekologi

Zona ekologi berlokasi di semua areal baik di lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani maupun lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Sidonganti. Zona ekologi difokuskan pada areal yang terdapat dan potensial untuk penyediaan air dan sumber air. Desa Sidonganti adalah salah satu dari 62 desa yang berada di 7 kecamatan dari total 20 kecamatan di Kabupaten Tuban, yang mengalami krisis air bersih[7] (*Tempo Interaktif,* 18 Juni 2008). Krisis ini diperkirakan terus meluas mengingat sejumlah mata air yang rata-rata berlokasi di pegunungan kapur airnya mulai menyusut.

Di Kabupaten Tuban, tujuh kecamatan yang mengalami krisis air bersih itu sebagian besar berada di Kecamatan Plumpang, Kenduruan, Kerek, Parengan, Plumpang, Grabakan, Semanding dan Bancar. Di beberapa kecamatan lainnya seperti Rengel, sebagian desanya juga mengalami krisis air.

Desa-desa di Kecamatan Plumpang, yang mengalami krisis air bersih, antara lain Desa Magersari, Sumberagung, Penidon, Ngrayong, Plumpang. Kecamatan Semanding adalah Desa Ngino, Nambangan, Jadi, Prunggahan Kulon dan Desa Gesing. Desa-desa di Kecamatan Merakurak yang mengalami krisis air adalah Desa Tuwiri Wetan dan Kulon, dan Senori. Di Kecamatan Kerek adalah Desa Sidonganti, Trantang, Baji, Trantang, Margorejo, Desa Gedikan, Grabakan, Waleran, Banyubang, dan Sidonganti. Adapun di Kecamatan Parengan, desa-desa yang mengalami krisis air adalah Desa Sugihwaras, Ponco, dan Parangbatu.

Untuk mengatasi krisis air ini, gerakan penanaman pohon di kawasan Tuban sesungguhnya juga telah dilaksanakan oleh Asper Sekaran Perum Perhutani KPH Jatirogo. Dalam gerakan ini, kepada masyarakat dibagikan bibit pohon Trembesi yang ditanam di beberapa lingkungan sumber mata air yang sebelumnya memang berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air. Asperan Sekaran dalam kegiatan ini bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang secara tulus dan suka rela hendak menyelamatkan sumber mata air di

[7] http://sokotuban.blogspot.com/2008/06/62-desa-di-tuban-krisis-air-bersih. html diakses Jumat 6 April 2012 jam 18.35.

Jatirogo," ujar Franky (43) pemerhati lingkungan dari LSM AMPDH (Aliansi Masyarakat Peduli dan Hutan), asal desa Kedungmakam.[8]

PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Tuban merupakan perusahaan terbesar di wilayah Tuban, selama tahun 2009 hingga tahun 2010, juga melakukan penghijaun dan penanaman total sebanyak 370 ribu pohon yang ditanam di daerah sekitar wilayah pabrik semen di Tuban. Penghijauan tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk menghijaukan lingkungan. BUMN ini juga telah melakukan penghijauan dengan penanam sebanyak 44 ribu pohon disekitar *gloryhole* dan 5 ribu pohon di *green belt* pabrik semen di Tuban. Setiap tahunnya Semen Gresik telah mengucurkan dana sebesar Rp 80 miliar untuk dana CSR (*Corporate Sosial Responcibility)*. Sedangkan untuk alokasi dana lingkungan itu sekitar Rp 10 miliar tiap tahunnya.[9]

Para pemangku kepentingan di semua level (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional) hendaknya terus berkomitmen untuk penciptaan dan penyediaan air dalam jumlah yang terus bertambah dalam pengertian kuantitas dan kualitas sejalan jumlah penduduk dan binatang piaraan yang juga terus bertambah. Sumber air yang tersedia di Dukuh Soco Desa Sidonganti (lihat foto 118 dan 122) harus ditambah debitnya dengan cara meningkatkan pelestarian tanaman hutan. Tanaman pohon yang telah tumbuh dan berkembang di areal itu, sebaiknya diperluas untuk penyediaan air yang lebih dari cukup.

HIPAM (Himpunan Pengelola Air Minum-*Community Managed Water System*) yang telah memasang sumur dan pipa di Desa Sidonganti tahun 2011 dan belum dapat beroperasi disebabkan oleh kurang atau tidak tersedianya mata air dalam jumlah yang memadai. Fakta ini, merupakan pelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dan kebijakan termasuk Perum Perhutani.

Gagalnya mengakses debit air dalam kuantitas yang lebih dari cukup, dari titik sumber yang dibor sampai lebih dari kedalaman 130 meter di Desa Sidonganti di tahun 2011 sesungguhnya tidak hanya disebabkan oleh masalah teknis—misalnya penetapan titik lokasi pengeboran, yang sudah melibatkan para ahli geologi dan spiritual—namun yang juga tidak boleh dilupakan adalah masalah substansial yang dirunut dari asal usulnya yakni hulu. Untuk maksud tersebut

---

8 http://berita.maiwanews.com/asper-sekaran-dan-masyarakat-gelar-aksi-tanam-ribuan-trembesi-24279.html diakses Jumat, 6 April 2012 jam 18.54.

9 http://berita.maiwanews.com/kucurkan-rp-10-miliar-dan-tanam-370-ribu-pohon-di-gloryhole-dan-green-belt-pabrik-14206.html. diakses Jumat, 6 April 2012 jam 19.10.

pengelolaan zona ekologi dan konservasi dengan penanaman hutan lindung merupakan bagian prioritas yang harus diprogramkan dan dilaksanakan oleh Perum Perhutani.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) di Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu, dirasakan urgen untuk dilakukan koordinasi oleh para pemangku kepentingan (*stake holders*) di Kabupaten Tuban agar dapat melaksanakan sinergitas tugasnya dalam menjaga planet bumi, melestarikan hutan dan menjaga tatanan lingkungan hidup terutama lingkungan alam untuk penyediaan air (oksigen), menjaga tanah dan hutan dari berbagai ancaman erosi, longsor, dan banjir.

Hutan lindung (*protection forest*) merupakan tanaman di kawasan hutan yang lokasinya ditetapkan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat tertentu dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan berfungsi untuk perlindungan ekologis—terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah—tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Amanat tentang hal ini telah dinyatakan dalam Undang-undang RI no 41/1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan:

> *„Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah."*

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan antara lain di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan *(catchment area),* di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

Dalam hal ini, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai *kawasan hutan* dalam pengertian di atas adalah: *„...wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."*

Para pemangku kepentingan hendaknya dapat menetapkan zona ekologi pada level kawasan desa, kawasan kecamatan dan kawasan kabupaten di wilayah Tuban khususnya Tuban Bagian Barat. Penataan dan penetapan jarak zona ekologi di level kawasan Desa Sidonganti tidak dapat ditentukan dengan ukuran jarak (km) dengan Desa Sidonganti. Penetapannya ditentukan dalam kaitannya dengan penyediaan serta potensinya kepada penyediaan air. KPH Parengan telah mengidentifikasi jumlah sumber mata air, sendang, waduk,

bendungan yang masih tersedia di wilayah hutan. Sumber air itu masih mengalir sepanjang tahun maupun yang mengalir pada saat musim penghujan saja (Lihat Lampiran 15).

Penataan zona ekologi juga menyongsong dilaksanakannya kebijakan "moratorium hutan" yang telah digagas di level nasional dan internasional pada satu dekade terakhir untuk melestarikan tanaman hutan[10].

3.4.5.2. Zona Bisnis

Zona bisnis yang juga sering disebut sebagai zona ekonomi, berlokasi di areal hutan atau kawasan inti dalam pengelolaan SDH (Sumber Daya Hutan) Perum Perhutani. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban hendaknya disusun detilnya sampai pada level kecamatan dan desa. Zona bisnis ini ditetapkan untuk melaksanakan fungsi produksi tanaman hutan.

Lokasi penetapan zona bisnis ini ditentukan jaraknya dengan wilayah Desa Sidonganti lebih dari 3 km. Jenis tanaman di zona bisnis yang memungkinkan ditanam bersama warga masyarakat adalah pohon tanaman yang tergolong dalam FGS (*Fast Growing Species*) antara lain pohon Jati Stek Pucuk (JSP), Sengon (*Albasia)*, Akasia (*mangium, crasicarpa, auriculiformis*), Ekaliptus (*pellita, urophylla, alba, grandis*), Mindi, Gmelina, Suren, Jabon, dll. Jenis-jenis tanaman FGS sebagian merupakan jenis eksotik yaitu jenis tanaman yang tumbuh diluar habitat aslinya (Anonim, 2007).

Pohon jati stek pucuk memiliki tiga keunggulan yakni (i). lebih cepat tumbuh dan membesar; (ii). pencabangan cenderung jarang dan (iii). usia panen lebih cepat. Disarankan agar pohon jati pucuk ini dipanen pada umur lebih dari 10 tahun, walaupun pada umur 5 atau 7 tahun sudah terlihat besar. Saran tersebut dimaksudkan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas kayunya.

LSM Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) "Tunggak Semi" berlokasi di Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban, merupakan salah satu komunitas masyarakat yang telah peduli kepada lingkungan dan membudidayakan tanaman jati stek pucuk (Lihat foto 80, 135, 136, dan 137). Budidaya ini dilakukan dengan melakukan pembibitan, setelah pengurusnya melaksanakan pembelajaran di Puslitbang Perhutani Cepu pada tahun 2011. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh warga

[10] http://cetak.kompas.com/read/2011/02/28/04291882/bunuh.diri.dengan.moratorium.hutan. Diakses, Sabtu 7 April 2012 jam 07.28.

masyarakat ini perlu memperoleh dukungan dalam rangka mencapai percepatan pelaksanakan program P3 (*People, Planet,* dan *Product*) terutama hutan lestari. Tunggak Semi merupakan LSM yang peduli kepada pelestarian tanaman hutan rakyat.

Pohon sengon (*Albasia*) merupakan jenis tanaman keras yang mempunyai kelebihan cepat tumbuh, mudah perawatan dan cepat panen dalam waktu sekitar 10 tahunan. Waktu 10 tahun ini merupa-kan waktu yang lebih pendek (1/3) dibandingkan dengan tanaman pohon jati konvensional yang mencapai waktu sampai lebih dari 30 tahun.

Penataan zona bisnis juga dilakukan dengan demplot (demonstrasi dan ploting) dalam penanaman pohon jenis FGS ini. Melalui demplot ini dilakukan pemilahan sejumlah areal lahan yang ditanami tanaman jenis FGS. Dengan kata lain, hanya areal tertentu dari lahan yang dikelola Perum Perhutani yang ditanami tanaman jenis FGS. Tegasnya tidak semua lahan di areal Perhutani ini ditanami tanaman jenis FGS. Teknis penanaman dapat mengacu pada pola yang berpedoman pada PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

3.4.5.3. Zona Sosial

Zona sosial berlokasi di areal hutan dalam pengelolaan SDH (Sumber Daya Hutan) Perum Perhutani dengan jarak sekitar 1-3 km dari kawasan masyarakat Desa Sidonganti. Dalam zona sosial itu ditetapkan untuk melaksanakan fungsi sosial di kawasan yang memiliki karakter tekanan sosial yang tinggi seperti Desa Sidonganti.

Di zona sosial ini dilakukan penanaman selingan dengan tanaman jenis FGS (*Fast Growing Species*), tanaman buah, dan tanaman Kayu Putih (*Melaleuca Leucadendron L.)*. Di sela-sela tanaman itu pesanggem dapat memanfaatkan untuk melaksanakan pertanian Tumpangsari (jagung, kacang, kacang hijau, dan kedelai) dan penanaman empon-empon (umbi tanaman untuk jamu).

Kayu Putih merupakan salah satu komoditi kehutanan yang pernah digunakan dalam reboisasi lahan-lahan tidak produktif terutama di Pulau Jawa. Kegiatan ini telah dilaksanakan di sejumlah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani. Di KPH Gundih, Jawa Tengah penanaman Kayu Putih dilakukan sejak tahun 1964 pada lahan bekas tanaman pohon Jati.

KPH Tuban, KPH Parengan, dan KPH Jatirogo telah melakukan penanaman Kayu Putih (KP) yang luasnya 1.342,9 Hektar tahun 2009 yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan lebih dari 4.000 ton/tahun daun kayu putih. Hasrat untuk menanam lagi KP ini bangkit kembali terutama dari KPH Jatirogo untuk meningkatkan

pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah di kawasan tersebut, dan segera dapat mengakhiri tindakan perusakan hutan.[11] KPH Tuban dalam *Project Statement*nya telah menganalisis usaha pendirian Pabrik MKP, yaitu Perhitungan NPV s/d 5 tahun sebesar Rp. 3.455.550.000, dan BCR sejumlah 1,39, dan IRR nya sebesar 0,1957 atau IRR nya sebesar 19,57%.

Kemanfaatan langsung penanaman KP di lahan Perhutani dalam zona sosial ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan kegiatan tanam Tumpangsari yang sampai lebih dari tiga tahun. Kayu Putih yang ditanam di zona itu ketinggiannya mencapai 1 ½ meter yang di sekitarnya dapat ditanam tanaman Tumpangsari dan empon-empon. Dalam waktu 4-5 tahun daun KP dapat dipanen. Masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pemanenan dan pengangkutan daun KP. Pendapatan masyarakat dapat semakin ditingkatkan dalam pelibatan proses penyulingan Minyak Kayu Putih. Sudah saatnya diberikan dukungan dalam pendirian pabrik MKP di desa-desa sekitar hutan di wilayah KPH Parengan, KPH Jatirogo, dan KPH Tuban. Pabrik MKP yang dimaksudkan adalah level menengah dan kecil berbentuk portable (yang dapat dipindahkan ke tempat lain) yang visiable untuk pemrosesan MKP dilihat dalam kaitannya dengan ketersedia-an air bersih, aksesibilitas dan keamanan.

Kewaspadaan yang perlu dicermati dalam kegiatan penanaman KP ini di lingkungan Perum Perhutani adalah produktivitas daun kayu putih yang masih rendah dan cenderung menurun. Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan pengelolaan hutan kayu putih di BKPH Sukun KPH Madiun adalah produktivitas daunnya yang masih rendah (1,83 ton/ha/tahun) dan derajat kesempurnaan tegakan (DKN) yang berkisar antara 0,21 dan 0,81 (2003). Pada kondisi normal, produksi biomassa kayu putih rata-rata 5,2 ton/ha, tetapi akhir-akhir ini telah terjadi penurunan hingga di bawah 2 ton/ha (kasus di KPH Gundih). Penyebab menurunnya produksi tersebut diduga karena kesuburan lahan yang menurun.

Degradasi lahan antara lain dapat disebabkan erosi tanah dan penguras-an hara melalui pemanenan tegakan tanpa upaya reklamasi dan pengembalian hara yang memadai. Erosi dapat mempercepat tanah menjadi tandus dan kritis, sehingga erosi merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam pengolahan lahan kering. Tingginya tingkat erosi dapat disebabkan oleh pengolahan lahan yang tidak

[11] http://berita.maiwanews.com/antisipasi-pembalakan-warga-diberi-garapan-kayu-putih-25098.html. diakses Sabtu, 7 April 2012 jam 08.36.

memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah. Degradasi lahan menyebabkan turunnya produktivitas tanah. Upaya untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan penerapan konservasi tanah dan pemupukan. Pada tahap awal perlu diidentifikasi kondisi tapak pada kondisi eksisting, sehingga dapat digunakan sebagai acuan tindakan silvikultur yang akan diterapkan.[12]

Diperlukan *grand design* di KPH Parengan, KPH Tuban, KPH Jatirogo dimana kawasan penyangga/*buffer zone* (zona sosial) Desa Sidonganti agar dapat ditanami tanaman Tumpangsari terus-menerus, maka Rencana Pengembangan Tanaman Kayu Putih dan Pendirian Pabrik Minyak Kayu Putih di KPH Tuban perlu ditangani secara lebih serius. Pendirian pabrik MKP di KPH Tuban secara ekonomi dan finansial sangat feasible. Pendirian pabrik MKP dimaksudkan juga agar dapat meningkatkan efisiensi biaya transportasi dan percontohan konkrit di kawasan Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Pendirian pabrik MKP dapat meningkatkan penghasilan dan menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar hutan dan menambah penghasilan perusahaan secara berkelanjutan, serta dapat merehabilitasi lahan-lahan yang kritis.

Pendirian Pabrik penyulingan Kayu Putih semacam ini juga telah di lakukan di KPH Mojokerto dan KPH Banyumas Barat Kabupaten Cilacap. Di KPH Banyumas Barat Kabupaten Cilacap pendirian pabrik MKP peresmiannya dilakukan oleh Bupati Cilacap pada tahun 2009. [13]

Tabel 22. Road Map Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Komunitas Lokal di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

No	Isu-isu Strategis	Faktor Penyebab	Kendala	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksan/ Keterangan
1	Masyarakat - eksternal	1) krisis mult dimensi	Petugas/aparat yang terkontaminasi"/"tercemar" dalam penegakan kebaikan/keberanan	Memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, moralitas	Pendidikan formal, informal, non formal, dan pelatihan	
	- internal	2) sosial budaya	mata pencaharian	Enomomi-Industri	Pendirian Pabrik/industri	

[12] http://www.puslitbangsdh.perumperhutani.com/?page=terminal&line=1 Diakses Jumat, 6 April 2012 jam 21.44.

[13] http://www.kphbanyumasbarat.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=1. Diakses hari Sabtu, 7 April 2012 jam 08.09. Pendirian pabrik MKP di KPH Banyumas Barat ini dilaksanakan atas kerjasama kemitraan antara LMDH "Rawakuna" dengan Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dan PT Holcim Indonesia.

		kehidupan masya-rakat;			skala kecil dan menengah
		3) gangguan penyakit Masya-rakat;	tidak merasa sakit	Pendekatan/ metode	Ilmu Pengetahuan-Teknologi
		4) politik-regulasi;	Komitmen eksekutif-legislatif-yudikatif dan lembaga masyarakat	Audiensi, inisiasi, dialog, dan komunikasi	- Peraturan/ - perundangan dan penegakan hukum
		5) ekonomi.	Terbatasnya SD (Sumber Daya) lahan dan SD Manusia	Pelatihan	Demplot/ Percontohan bibit dan agroforesty
2.	Pelestarian Lingkungan dan Penataan Zonasi (Ekologi, Ekonomi, dan Bisnis)	Jangka Pendek	- Kurang Komunikasi-koordinasi - Lemahnya komitmen	Fasilitasi pembibitan dan penanaman	Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara
		Jangka Menengah	Lemahnya komitmen	Fasilitasi pembibitan dan penanaman	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara
		Jangka Panjang	Lemahnya komitmen dan penetapan visi	Pelatihan dan fasilitasi	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara
3.	Produksi	- Tidak pernah tumbuh huta (Wilayah Tuban Barat)	Lemahnya komitmen dan penetapan visi, misi, dan strategi	Pelatihan dan fasilitasi	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara

Sumber: Data Lapangan

4.4.6. Pengembangan Jaringan *(Networking)*

Penyusunan model pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan komunitas Lokal di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban mengharuskan terbangunnya *(cultural engineering)* hubungan jaringan sosial (*networking*) dalam meningkatkan penguatan kelembagaan yang memerankan masyarakat lokal sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrol aktivitas program pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bangunan jaringan yang terbentuk itu menempatkan para pemangku kepentingan sebagai pemegang peran utama untuk menegas-

kan komitmennya sebagai fasilitator, negosiator, dan motivator dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidonganti. Adapun pada pemangku kepentingan yang terliput dalam kaitan jaringan sosial tersebut adalah: (i) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait; (ii). Badan Usaha Nasional PT Semen Gresik; (iii). Penegak Hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman; (iv). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4.4.6.1. Peranan Pemda dan Instansi Terkait

Model pemberdayaan yang efektif adalah disusun dari bawah *(bottom up)* dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan dengan "lebih mem-perhatikan secara khusus" kawasan Sidonganti sebagai bagian dari Kawasan Tuban Barat termasuk Kecamatan Kerek yang lahannya telah "gundul" dari tanaman hutan sejak 30 tahun terakhir.

Peranan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tuban adalah menanamkan kembali *(re-embeded)* keberdayaan dan harga diri, serta martabat masyarakat Sidonganti dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan terpadu melalui Pemerintahan Desa, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), BPD (Badan Musyawarah Desa), LPM/LKMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna/Kelompok Pemuda dan kelompok usaha.

Menumbuhkembangkan kembali keberdayaan, harga diri, dan martabat masyarakat Sidonganti dilakukan dengan delapan cara yakni:

1. Pemda Tuban (Biro Administrasi Pemerintahan) hendaknya segera mengangkat, melengkapi, menetapkan para petugas/perangkat desa di Desa Sidonganti yang sudah kosong (tidak terisi) sejak beberapa tahun sampai sekarang;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban segera menetapkan Kepala Sekolah, Guru, dan petugas di SD Inpres Sidonganti dengan orang-orang terbaik yang memiliki kualifikasi dan dedikasi, serta moralitas mulia yang tinggi untuk menjadi percontohan (role model) bagi pengembangan karakter masyarakat;
3. Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera meningkatkan kapasitas di Koperasi Desa dan usaha lainnya dengan pelatihan organisasi dan keterampilan UKM;
4. Dinas Pertanian segera melaksanakan program-program dan pelatihan KBR (Kebun Bibit Rakyat), Pupuk Kompos, dan pengolahan hasil pertanian (jagung, kacang, dll);
5. Dinas Pertanian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Perhutani dan PT Semen Gresik menetapkan zona (Kawasan) Ekologi,

Ekonomi, dan Bisnis di Kecamatan Kerek khususnya dan Kabupaten Tuban secara umumnya;
6. Dinas Pariwisata menetapkan Kawasan Wisata (eko wisata) dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kerek khususnya dan Kabupaten Tuban secara umumnya;
7. Pemkab segera membentuk Forum Komunikasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa-desa di Tuban.
8. Pemkab segera mengkonkritkan kelanjutan program CSR sejumlah instansi yang melibatkan perusahaan Negara (Perum), Pemerintah dan Perusahaan swasta nasional di Kabupaten Tuban.

4.4.6.2. Peranan PT Semen Gresik

Peranan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik sebagai perusahaan Milik Negara (BUMN) terbesar di Kabupaten Tuban, melaksanakan operasi kegiatan eksplorasinya di Kecamatan Kerek adalah menanam-kan kembali *(re-embeded)* keberdayaan dan harga diri, serta martabat masyarakat Sidonganti dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan terpadu melalui Pemerintahan Desa dan kelembagaan yang telah berkembang di Desa Sidonganti. Kondisi demikian patut memperoleh perhatian agar pengembangan perusahaan PT Semen Gresik memperoleh dukungan yang positif dari masyarakat khususnya masyarakat Desa Sidonganti.

Menumbuhkembangkan kembali keberdayaan, harga diri, dan martabat masyarakat Sidonganti dilakukan dengan dukungan PT Semen Gresik melalui program CSRnya di Kecamatan Kerek dengan menyertakan juga Desa Sidonganti sebagai bagian dari wilayah binaan *(ring)* untuk pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Desa Sidonganti tidaklah termasuk dari sebelas desa di Kecamatan Kerek yang termasuk wilayah binaan (ring) I PT Semen Gresik di Tuban. Meskipun demikian, dana CSRnya siap dialokasikan ke Desa Sidonganti, apabila kegiatan tersebut merupakan kebijakan dari Pemda Kabupaten Tuban. Program yang dapat dialokasikan adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan CSR[14].

[14] Wawancara dengan Kepala Bina Lingkungan PT Semen Gresik (SG) di Tuban, Kamis 8 Maret 2012, di Kantor Utama PT SG di Kecamatan Kerek Tuban.

4.4.6.3. Peranan Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari kunci terciptanya tatanan masyarakat (order) yang tertib, aman dan terkendali. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan di ranah penegak hukum yang terdiri dari unsur lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan bagian penting dalam rangka menanamkan kembali *(re-embeded)* keberdayaan masyarakat Desa Sidonganti. Penegakan hukum dilakukan secara preemtif, preventive dan repressif. (i). Cara preemtif dilakukan dengan, penyuluhan tentang kesadaran hukum; (ii). Cara preventif dilakukan dengan kegiatan patroli intensif, peningkatan kinerja personil internal, dan kerjasama dengan LMDH; Pembinaan pemeriksaan rutin terhadap industri kayu/mebel secara bersama dengan instansi terkait; Koordinasi dengan instansi dan aparat terkait dalam rangka penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku pencurian (*illegal loging);* dan (III), cara represif dilakukan dengan kegiatan operasi bersama POLRI dan Perum Perhutani terhadap penadah maupun pengguna kayu curian; dan juga membangun opini publik (pencitraan) untuk memberantas pencurian kayu.

4.4.6.4. Peranan LSM

Penguatan kelembagaan masyarakat di Desa Sidonganti juga dengan melibatkan secara aktif peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi massa, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, asosiasi nirlaba, dan komponen kelompok masyarakat yang peduli pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur masyarakat ini dilibatkan untuk mendiskusikan isu-isu pokok pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (sebab, mekanisme, jaringan, akibat, korban, kerugian) dalam pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya.

LSM diharapkan dapat menggerakkan program kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat mendasarkan pada pengalaman, pengetahu-an, dan organisasi yang sudah terstruktur dan terbiasa dalam kegiatan advokasi, berjaringan luas, dan komitmen jelas. LSM memiliki kompetensi yang tinggi untuk menjangkau beragam lapisan untuk menggerakkan masyarakat. LSM juga berkemampuan untuk melihat masalah secara menyeluruh dan berkemampuan pula untuk menumbuh-kembangkan ke-percayaan masyarakat dalam menemukan harga diri dan martabat-nya.

***

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sidonganti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas—yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya, dan terutama moral. Krisis multidimensi sebagai faktor eksternal yang dominan merupakan menyebabkan anomali pada masyarakat yang nyaris tidak dapat lagi membedakan perilaku baik dan tidak baik. Ibarat sakit, maka kondisinya sedang akut dan kritis yang perlu dilakukan "opname" kebudayaan.
2. Penduduk Desa Sidonganti berjumlah 4.330 jiwa, terdiri dari 1500 KK dengan perincian 702 KK sebagai Pra Sejahtera; 800 KK Keluarga Sejahtera I; 50 KK Keluarga Sejahtera II; 02 KK Keluarga Sejahtera III; 3 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50 % KK Desa Sidonganti adalah keluarga miskin. Penduduk berusia produktif (20–49 tahun) berjumlah 1.912 jiwa (hampir 60 %), yang 97,44%nya bermatapencahari-an petani dan buruh dengan luas lahan 0,2 h/KK, sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi pada lahan persil yang dikelola Perhutani.
3. Faktor eksternal yang mempengaruhi keberdayaan dan pemberdaya-an masyarakat Desa Sidonganti untuk dapat mengurangi keter-gantungannya kepada lahan Perhutani adalah peran para pemangku kepentingan *(stake holders)* yang terdiri dari Pemda, Perum Perhutani, dunia usaha, dan masyarakat baik dalam level lokal, regional, maupun nasional.
4. Faktor internal yang mempengaruhi keberdayaan dan pemberdaya-an masyarakat Desa Sidonganti organisasi dan kelembagaan adalah peran Pemerintahan Desa, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), BPD (Badan Musyawarah Desa), LPM/LKMD (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat), PKK, dan Organisasi Pemuda/Karang Taruna, dan kelompok usaha.

5. Keamanan (KAM) hutan: Tren pencurian kayu selama beberapa tahun terakhir khususnya di KPH Tuban, telah menimbulkan dampak yang cukup nyata terhadap aspek lingkungan, sosial dan keuangan Perum Perhutani. Penetapan stratifikasi A, B, C, dan D pencurian kayu dapat memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian serta penentuan tingkat efektifitasnya.
6. Tenurial: akar permasalahan tenurial yang timbul di KPH Parengan, Jatirogo dan Tuban adalah disebabkan oleh: (i). Upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan*: food security*) masyarakat akibat tekanan ekonomi dan sosial yang makin tinggi *(social economis distress);* (ii). Terdapat *gap* dan gagap komunikasi antara Perhutani dengan masyarakat dan ruang kelola masyarakat pada sumberdaya hutan yang belum optimal. Di Desa Sidonganti yang intens disebabkan adanya faktor *socio-history* yakni kurang harmonisnya hubungan antara masyarakat dan (petugas) Perhutani. Oleh sebab itu strategi penanganan permasalahan tenurial dengan langkah pendekatan partisipatif sosio-kultural. Pelaksanaannya pendekatan ini hendaknya dilakukan secara terintegrasi dalam pengelolaan sosial secara partisipatif, komprehensif, dan terencana secara sistematis yakni (i). mendorong proses pemberdayaan *(empowering);* (ii). memberikan peluang *(enabling)*, dan (iii). memberikan perlindungan *(protection)*.
7. Pengelolaan SDH (Sumber Daya Hutan) di kawasan Desa Sidonganti ditetapkan manajemen zonasi yang terdiri atas: (i). Zona ekologi; (ii). Zona ekonomi/bisnis; dan zona sosial. Zona ekologi ditetap-kan di seluruh wilayah lahan Perhutani dan masyarakat yang dimaksudkan untuk memproduksi dan menjaga debit air dan mata air. Pada zona ekonomi/bisnis ditetapkan di areal lebih dari 3 km dari wilayah desa dengan tanaman FGS. Pada zona sosial ditetapkan di areal sampai 3 km dengan tanaman buah-buahan dan kayu putih.
8. Model pemberdayaan masyarakat yang efektif di sekitar kawasan hutan adalah dilakukan dengan meningkatkan penguatan kelembaga-an di masyarakat desa sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrol seluruh aktivitas program. Para pemangku kepentingan *(stake holders)* di berbagai level memerankan posisi dan komitmen sebagai fasilitator, nego-siator, dan motivator.

9. Pelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir dengan berbagai demplot di lahan perhutani melalui penamanan pohon FGS *(Fast Growing Species)* semacam sengon, jabon, karet, serta kayu putih sesuai dengan peruntukan lahan. Penanaman kayu putih disertai penyediaan sarana produksi dan penyaluran-penyerapan hasil produksi-nya.
10. Bangunan jaringan *(networking)* yang telah tersedia dan terbentuk menempatkan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai pemegang peran utama untuk menegaskan komitmennya sebagai fasilitator, negosiator, dan motivator dalam pemberdayaan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidonganti. Adapun pada pemangku kepentingan yang terliput dalam kaitan jaringan sosial tersebut adalah: (i) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait; (ii). Badan Usaha Nasional PT Semen Gresik; (iii). Penegak Hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman; (iv). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

5.2. Saran

1. Krisis multidimensi yang terjadi di masyarakat Desa Sidonganti hendaknya segera disikapi oleh pada pemangku kepentingan *(stake holders)* yakni Pemda, Perum Perhutani, dunia usaha, dan masyarakat, secara sistemik dari hulu sampai ke hilir, untuk menegaskan komitmen dan koordinasi yang sinergis dalam men-sejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan dari bawah *(bottom up)*. Peran para pemangku kepentingan itu adalah untuk memutus matarantai kemiskinan, kebodohan, dan kepercayaan *(trust)*.
2. Pemberdayaan dari bawah *(bottom up)* dilakukan dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di Pemerintahan Desa, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), BPD (Badan Musyawarah Desa), LPM/LKMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), KPM (Kader Pember-dayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna/Kelompok Pemuda, dan kelompok usaha.
3. Pengurangan ketergantungannya kepada lahan hutan hendaknya dilakukan sejumlah pelatihan berkelanjutan dan pendampingan untuk memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, dan ketidak-percayaan (*untrust*) dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan

2001 *Berpihak pada Manusia: Paradigma Nasional Pembangunan Orde Baru.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adam, Sugayo Jawama dan Imam Fuji Raharjo

2007 *Dialog Hutan Jawa: Mengurai Makna Filosofis PHBM.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agusyanto, Ruddy

2007 *Jaringan Sosial dalam Organisasi.* Jakarta: Rajawali Press.

Arifin, Hadi Susilo dkk

2009 *Analisis Lanskap Agroforestri: Konsep, Metode, dan Pengelolaan Agroforestri Skala Lanskap dengan Studi Kasus Indonesia, Filipina, Laos, Thailand, dan Vietnam.* Bogor: IPB Press.

Asdak, Chay

2010 *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____

2012 *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Cernea, M. Michael.

1988 *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan,* terjemah-an Blasius Bengo Teku,. Jakarta: UI Press.

Chambers, Robert.

1987 *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang,* terjemahan Pepet Sudradjat. Jakarta: LP3ES.

Dahrendorf,

1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society.* Stanford University Press.

Darwin, Muhajir dan Pande Made Kutanegara (Editor)
2010 *Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance.* Yogyakarta: Media Wacana.

Fakih, Mansour.
2008 *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Fandeli, Chafid., Kaharuddin, dan Mukhlison
2004 *Perhutanan Kota.* Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Faturochman, dkk. (Editor)
2007 *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: Pusat Studi Kepen-dudukan dan Kebijakan.

Geertz, Clifford.
1976 *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.* Jakarta: Bhratara.

Hayami Yujiro dan Masao Kikuchi.
1987 *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Terjemahan Zahara D. Noer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hariyanto, Bambang
2012 *Komedikus Erektus: Dagelan Republik Semangkin Kacau Balau.* Bandung: Imania.

Hertiarto
2004 *Tesis* S-2. "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Jegong, Kabupaten Blora)." Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Hidayat, Herman (Penyunting)
2011 *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda.* Jakarta: LIPI Pres dan Yayasan Obor Indonesia.

Hidayat, Herman

2011 *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Ngrumat Bondo Uutomo dan Yayasan Obor Indonesia.

Indriyanto
2010 *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Iskandar, Untung
2001 *Kehutanan: Menapak Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Debut Press.

Iskandar, Untung
2001 *Kehutanan Menapak Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Debut Press.

_____
1999a *Kerjasama Internasional Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

_____
1999b *Dialog Kehutanan dalam Wacana Global*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Kartodihardjo, H *et al*.
2006a *Daya Dukung Pulau Jawa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

_____
2006b *Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan : Telaah Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan*. Bogor: IDEALS.

King, Victor T., dan William D. Wilder
2012 *Antropologi Modern Asia Tenggara: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Listiyono Santoso dan Mohammad Adib (Editor)
2011 *Pendidikan Karakter untuk Penguatan Wawasan Bangsa dan Jatidiri Mahasiswa Universitas Airlangga*. Surabaya: Airlangga University Press.

Mangunjaya, Fachruddin M., dan Ahmad Sudirman Abbas

2009 *Khasanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mulyono, Slamet
2003 *Istilah Ekonomi Kehutanan*. Samarinda: Kerjasama Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan Bigraf Publishing.

Maschab, Mashuri.
1994 "Menuju Pembangunan Pedesaan yang Partisipatif", dalam buku yang disunting oleh Parsudi Suparlan *Pembangunan Yang Terpadu dan Berkesinambungan,* Jakarta: BALITBANGSOS-DEPSOS RI**,** hal. 54-62.

Mochtar, Hilmy
2011 *Politik Lokal dan Industrialisasi: Politik Mobilisasi Dukungan Pembangunan Industri Semen Tuban*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Mustain
2007 *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mubyarto.
1984 *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK-UGM

Mubyarto dan Kartodirdjo, Sartono.
1988 *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mubyarto, dkk.
1992 *Desa dan Perhutanan Sosial. Kajian Sosial-Antropologis di Propinsi Jambi*. Yogyakarta: P3PK-UGM

Mubyarto, dkk.
1993 *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK-UGM.

Penny, DH.
1990 *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*, terjemahan Ace Partadiredja. Jakarta: UI-Press.

Prasetyo, Budi

2009a *Politik di Desa: Partisipasi Masyarakat dalam PPMPWD*. Surabaya: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama.

Prasetyo, Budi

2009b *Pemberdayaan Masyarakat: Pembangunan Manusia dalam Politik Lokal*. Surabaya: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama.

Purwita, Cipta, Harianto , Bonar M. Sinaga dan Hariadi Kartodihardjo

2009 *Analisis Keragaan Ekonomi Rumahtangga: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Pangalengan Bandung Selatan*. Bandung: IPB.

Reintjes, c., b. Haverkort, A.W. Bayer.

1999 *Pertanian Masa Depan: Pengantar untuk Pertanian Berkelanjut-an dengan Input Luar Rendah*. (Terjemahan Y. Sukoco). Yogyakarta: Kanisius.

Rianse, Usman dan Abdi

2010 *Agroforestri: Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bandung: Alfabeta.

Rudyansjah, Tony

2009 *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan: Sebuah Kajian tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.

Ruf, Francois dan Frederic Lancon (Penerjemah: Yoddang

2005 *Studi Regional dan Sektoral: Dari Sistem Tebas dan Bakar ke Peremajaan Kembali (Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.

Safi'i

2011 *Ampih Miskin: Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Averoes Press.

Sagala, Porkas

2008 *Mengelola Lahan Kehutanan: yang Benar yang Selama Ini Salah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Scott, James. C.
1993 *Perlawanan Kaum Tani*. Budi Kusworo, et. al. (Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Simon, Hasanu
2006 *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simon, Hasanu
2007 *Metode Inventore Hutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

———
2010 *Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Hutan Timber Management (Jilid IA)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simon, Josias
2012 *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasinya*. Bandug: Karya Putra Darwati.

Singarimbun, Masri dan D.H. Penny.
1976 *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa,* terjemahan Sulaiman Krisnandi. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Soehoed, W.P.
1994 "Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan", dalam buku yang disunting oleh Parsudi Suparlan *Pembangunan Yang Terpadu dan Berkesinambung-an,* Jakarta:BALITBANGSOS-DEPSOS RI**,** hal. 34-53.

Soedjito, Herwasoso dkk (Editor)
2009 *Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: LIPI Pres dan Yayasan Obor Indonesia.

Soemarwoto, Otto
2008 *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Soeradji, Budi.

1993 "Fenomena Kemiskinan di Indonesia Pasca PJPT I", makalah pada Seminar sehari tentang *Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Dalam Menikmati Hasil Pembangunan* diselenggarakan oleh Fak. Ekonomi Universitas DR. Moestopo (Beragama), Jakarta 24 Juli 1993.

Suryo, Djoko, dkk.

1985 *Gaya Hidup Masyarakat Jawa Pedesaan. Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya*. Jakarta: Depdikbud.

Sutaryono

2008 *Pemberdayaan Setengah Hati : Sub Ordinasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan*. Klaten Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Lapera Pustaka Utama.

Sutrisno, Loekman.

1997 *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Tjokrowinoto, Moeljarto.

2001 *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Trenggono, Heppi

2011 *Menjadi Bandsa Pintar*. Surabaya: Insan Cendekia.

Universitas Brawijaya dan Pemprov Jawa Timur

2011 "Kajian Penyusunan Kebijakan Peran Serta Masya-rakat Desa Hutan Terhadap Pengelolaan dan Keamanan Tahura R. Soeryo Menuju Hutan Lestari". *Laporan Akhir*. Malang: Universitas Brawijaya dan Pemprov Jawa Timur.

Uphoff, Norman.

1988 "Menyesuaikan Proyek pada Manusia", dalam *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan. Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*, Michael Cernea (ed.). Jakarta: UI Press, hal. 461-510.

Widianto, Mohamad Dan Mubarak N. A. Sigit

2011 "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Perspektif Upaya Mengatasi Masalah Keamanan Hutan". *Laporan.* Biro Perlindungan SDH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur,

Widodo, Triyogo

2006. *Tesis* S-2. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Sekitar Hutan melalui Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat". Bogor: Sekolah Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor.

Yasman, Irsyal dkk

2009 *Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim: Bahan untuk Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Umum.* Jakarta: Yayasan Resource Development Center.

***

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-foto

Foto 1. Kantor KPH Parengan di Kota Bojonegoro
Foto 2. Kantor KPH Bojonegoro
Foto 3. Dengan Waka ADM di Kantor KPH Parengan Bojonegoro
Foto 4. Peta Lokasi "Daerah Rawan" (Tanda Merah) Keamanan Hutan Kabupaten Tuban Di Ruang Waka ADM Parengan KabupatenTuban
Foto 5. "Segitiga Emas" Desa Sidonganti, Trantang, dan Gemulung Kecamatan Kerek di Ruang Waka ADM Parengan Kabupaten Tuban
Foto 6. Hutan Rakyat dengan Tanaman Pohon Jati

Foto 07. Hutan Rakyat dengan Tanaman Pohon Jati
Foto 08. TPK Ngogro KBM Pemasaran Kayu 2 Bojonegoro
Foto 09. Kayu Gelondongan di TPK Ngogro KBM Pemasaran Kayu 2 Bojonegoro
Foto 10. Tanaman Hutan di TPK Ngogro KBM Pemasaran Kayu 2 Bojonegoro
Foto 11. Kantor BKPH Mulyoagung KPH Parengan
Foto 12. Kantor BKPH Mulyoagung KPH Parengan

Foto 13. Diskusi dengan Ketua LMDH "Wono Mulyo" Pak Tarto dan LMDH "Wono Lestari" Pak Momon di Desa Guwoterus

Foto 14. Diskusi dengan Ketua LMDH "Wono Mulyo" Pak Tarto dan LMDH "Wono Lestari" Pak Momon Dan Kasi Komsos Mubarrak Sigit, MM. di Desa Guwoterus

Foto 15. Foto Bersama Seusai Diskusi dengan Ketua LMDH "Wono Mulyo" Pak Tarto dan LMDH "Wono Lestari" Pak Momon dan Kasi Komsos Mubarrak Sigit, MM. di Desa Guwoterus Asperan Mulyoagung

Foto 16. Palang Pintu di Perhutani Wilayah LMDH Guwoterus Mulyoagung

Foto 17. Tanaman Pohon Jati di LMDH Guwoterus Asperan Mulyoagung

Foto 18. Pos Penjagaan yang Dirusak oleh Kawanan Pencuri Kayu Jati di Asperan Mulyoagung

Foto 19. Masih "Hangat" Bekas Pohon yang sudah Dirobohkan Kawanan Pencuri Kayu Jati di Asperan Mulyoagung (200 m dari Pos Penjagaan yang Dirusak) di Asperan Mulyoagung (200 m dari Pos Penjagaan yang Dirusak)
Foto 20. Tunggak Pohon Jati yang Baru saja Dilakukan Pemotongan oleh Kawanan Pencuri Kayu Jati
Foto 21. PTM 4 di di Asperan Mulyoagung
Foto 22. Seorang Polisi sedang Bertugas (Mencatat Setiap Peristriwa) di PTM 4 Asperan Mulyoagung
Foto 23. Pohon-pohon Jati yang dipotong/Dirusak di PTM 4 Asperan Mulyoagung
Foto 24. Pohon-pohon Jati yang dipotong/Dirusak di PTM 4 Asperan Mulyoagung

Foto 25. Pohon-pohon Jati yang dipotong/Dirusak di PTM 4 Asperan Mulyoagung
Foto 26. Dilakukan "Pembersihan" Setelah pemotongan/Perusakan Pohon Jati di PTM 4 Asperan Mulyoagung
Foto 27. Dilakukan "Pembersihan" Setelah Pemotongan/Perusakan Pohon Jati di PTM 4 Asperan Mulyoagung
Foto 28. Dilakukan "Pembersihan" Setelah Pemotongan/Perusakan Pohon Jati di PTM 4 Asperan Mulyoagung
Foto 29. Areal Perhutani yang "Gundul" dan Tanaman Jagung Asperan Mulyoagung
Foto 30. Areal Perhutani yang "Gundul" dan Tanaman Jagung Asperan Mulyoagung

Foto 31. Tanaman Hutan Lindung Asperan Mulyoagung
Foto 32. Tanaman Jagung yang 3 Pekan Lagi Panen Raya di Asperan Mulyoagung (1 Feb 2012)
Foto 33. Petunjuk Jalan ke Desa Tegal Rejo Gegunung di Asperan Mulyoagung
Foto 34. Halaman Kantor KPH Jatirogo
Foto 35. Motto: KPH Jatirogo
Foto 36. Peresmian Gedung KPH Jatirogo oleh Gubernur Jawa Timur Mohammad Noer Tahun 1974

Foto 37. Berfoto bersama Pak Adm KPH Jatirogo Seusai diskusi tentang "Hutan Rakyat" dan "Hutan Partisipatif" di Ruang Kantornya 11 Januari 2012

Foto 38. Masyarakat Berdaya Hutan Terjaga

Foto 39. Sertifikasi Hutan untuk Kelestarian Lingkungan

Foto 40. Diskusi dengan Bapak Sarju di Kantor Asper Ngolahan KPH Jatirogo

Foto 41. Tempat Diskusi di Kantor BKPH Bahoro KPH Jatirogo

Foto 42 "Lacak Balak Legalitas Kayu" di Kantor BKPH Bahoro KPH Jatirogo

Foto 44. Diskusi dengan Ketua LMDH "Wono Lestari" Bapak Jait, "Gemulung Jaya" Bapak Sudjati, dan "Wono Bangkit" Bapak Sumari di Depan Pos PTM 16 BKBH Ngulahan KPH Jatirogo

Foto 45.Diskusi dengan Ketua LMDH "Wono Lestari" Bapak Jait, "Gemulung Jaya" Bapak Sudjati, dan "Wono Bangkit" Bapak Sumari di Depan Pos PTM 16 BKBH Ngulahan KPH Jatirogo

Foto 46.Foto Bersama Seusai Diskusi di Depan Pos PTM 16 BKBH Ngulahan KPH Jatirogo

Foto 47.Areal Perbukitan yang "Gundul" di Desa Gemulung PTM 16 BKBH Ngulahan KPH Jatirogo

Foto 48.KBR (Kebun Bibit Rakyat) di Desa Gemulung KPH Jatirogo

Foto 49.Papan Naman KBR (Kebun Bibit Rakyat) di Desa Gemulung KPH Jatirogo

Foto 50. 50.000 Batang Bibit Pohon Jati di KBR (Kebun Bibit Rakyat) di Desa Gemulung KPH Jatirogo

Foto 51. Dukuh Gesikan (Sebelum Bukit) Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 52. Bukit Berkapur di Dukuh Gesikan Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 53. Lapangan Olah Raga dan Para Pemuda yang Sedang Sepak Bola di Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 54. Papan Pelarangan Perusakan Ekosistem di Lingkungan Tujuh Mata Air di Desa Gemulung Kecamatan Kerek
Foto 55. Satu Diantara Tujuh Mata Air di Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 56. Kondisi Lingkungan Alam di Sekitar Mata Air di Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 57. Sumber air di Nglirip 11 Januari 2012
Foto 58. Sumber air di Nglirip 11 Januari 2012
Foto 59. Pemompaan Air di Sumber Air di Nglirip 11 Januari 2012
Foto 60. Tanaman Hutan di Lokasi Sumber Air di Nglirip 11 Januari 2012
Foto 61. Sumber Air di samping Jalan Raya Nglirip 11 Januari 2012
Foto 62. Hutan Jati di Kawasan KPH Jatirogo

Foto 63. Posko Terpadu Penyelamatan Hutan dan Sumber Mata Air Nglirip Diresmikan oleh Dandim 29 Maret 2008
Foto 64. Posko Terpadu Penyelamatan Hutan dan Sumber Mata Air Nglirip Diresmikan oleh Dandim 29 Maret 2008
Foto 65. Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
Foto 66. Kantor Desa Montong Sekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
Foto 67. Kantor KPH Tuban
Foto 68. Spanduk Pendaftara "Saka Wanabakti" Cabang Tuban di Kantor KPH Tuban

Foto 69: ADM (Ir. Uud Haryadi Yogasara) , Waka Adm (Mada Yuwono Hadhi), Kasi Komsos (Mubarrak Sigit, MM.), peneliti dan staf lainnya setelah Berdikusi tantang "Demplot Tanaman Hutan" di Kantor KPH Tuban
Foto 70. Kasi PSDH Bapak Agus di Halaman Kantor KPH Tuban
Foto 71. Kantor Mapolres Tuban di Tuban
Foto 72. Visi dan Misi Perum Perhutani di Kantor KPH Tuban
Foto 73. Pencanangan Gerakan Reboisasi dan Panen Raya Jagung Perum Perhutani KPH Tuban oleh Bupati Tuban Tahun 2005
Foto 74. Kantor Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 75. Koramil di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 76. Nasi Jagung di "Warunge Cak Wi" Kecamatan Kerek Tuban
Foto 77. "Warunge Cak Wi" Kecamatan Kerek Tuban
Foto 78. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban (di Kantor Kecamatan Kerek)
Foto 79. Panca Siap di Kantor Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 80. Pohon Jati "stek Pucuk" Percontohan di Asperan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 81. Penyiapan Bibit Kacang di Desa Tengger Wetan Kerek Kabupaten Tuban untuk ditanam Seusai Panen Jagung (1 Februai 2012)
Foto 82. Suasana FGD di LMDH "Wonoasri" Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Tuban
Foto 83. Suasana FGD di LMDH "Wonoasri" Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Tuban
Foto 84. Bersama Seusai FGD di LMDH "Wonoasri" Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Tuban
Foto 85. Areal Tanah "Gundul" tanpa tanaman hutan di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 86. Kolam Penampungan Sumber Air "Silowo"di Merakurak

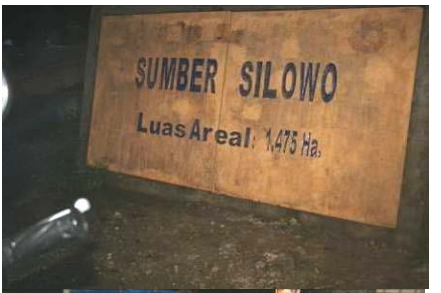

Foto 87. Sumber Air "Silowo"di Merakurak
Foto 88. Kolam Penampungan Air di Sumber Air "Silowo"di Merakurak
Foto 89. Helikopter di Aliran Sungai dari Sumber Air "Silowo"di Merakurak
Foto 90. Perusahaan Penggergajian Kayu di Wilayah Kecamatan Kerek
Foto 91. Kantor Desa Trantang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Foto 92. Desa Gemulung di Latar Perbukitan yang "Gundul" Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 93. Desa Gemulung di Latar Perbukitan yang "Gundul" Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 94. Warga yang menimba Air di Sumur Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 95. Warga yang menimba Air di Sumur Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 96. Warga yang Menggendong Jerigen Berisi Air ke Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 97. Warga yang Menggendong Jerigen Berisi Air ke Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 98. Warga yang Menggendong Jerigen Berisi Air ke Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 98. Warga yang Menggendong Jerigen Berisi Air ke Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 99. Kantor/Balai Desa Gemulung

Foto 100. Seorang Ibu sedang Menyuapi Anaknya Disaksikan oleh Ibu-ibu lainnyadi Desa Gemulung

Foto 101. Bersama Bapak Sujati, Ketua LMDH "Gemulung Jaya" di Kediamannya seusai Diskusi di Desa Gemulung Foto 102. Bersama Ketua "Cagar Alam" Bapak Edy Toyibi (Berbaju Garis-garis) Seusai Diskusi di Kediamannya Tuban

Foto 102. Mapolsek Kerek Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Foto 103.SMK Negeri 3 di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
Foto 104."Mangrove Center" Jl. Tuban Semarang KM 9 Jenu Kabupaten Tuban
Foto 105.Peresmian Bank Benih Mangrove dan "Mangrove Center" 31 Desember 2011 Jl. Tuban Semarang KM 9 Jenu
Foto 106.Pembibitan Mangrove di "Mangrove Center" Jl. Tuban Semarang KM 9 Jenu Kabupaten Tuban
Foto 107. Pembibitan Mangrove di "Mangrove Center" Jl. Tuban Semarang KM 9 Jenu Kabupaten Tuban
Foto 108.Pembibitan "Cemara Laut" di "Mangrove Center" Jl. Tuban Semarang KM 9 Jenu Kabupaten Tuban

Foto 109. Forkom LMDH KPH Tuban, KPH Jatirogo, dan LMDH Parengan Sedang Berdiskusi tentang Pentingnya Dibentuk Forkom PHBM di Kabupaten Tuban Diselenggarakan di "Mangrove Center" 8 Januari 2011Jl. Tuban Semarang KM 9 Jenu Kabupaten Tuban

Foto 110. Foto Bersama Seusai Berdiskusi tentang Pentingnya Dibentuk Forkom PHBM di Kabupaten Tuban Diselenggarakan di "Mangrove Center" 8 Januari 2011 Jl. Tuban Semarang KM 9 (Desa) Jenu

Foto 111. Tatanan Kayu untuk Bahan Bakar di "Warung Rajungan" di Tuban

Foto 112. Kantor Camat Grabagan Tuban

Foto 113. Kantor/Mapolsek Rengel Tuban

Foto 114. Jembatan dan Aliran Bengawan Solo

Foto 115. Lokasi Sumber Air di Dukuh Soco Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Tuban
Foto 116. Pondok Berdalin "Melati" dan Rumah Dinas Bidan Desa Sidonganti
Foto 117. Kantor Desa dan BPD Desa Sidonganti
Foto 118. Papan Kegiatan "PNPM" Desa Sidonganti
Foto 119. Seorang Warga Menata Jurigen berisi Air dari Sumber di Soco Desa Sidonganti
Foto 120. Pengambil Rencek/Kayu Bakar

Foto 121. PLDT Porang
Foto 122. Petani Hutan/Pesanggem
Foto 123. Kegiatan persemaian Bibit Jati
Foto 124. Kegiatan Persemaian Bibit Jati
Foto 125. Kegiatan Tebangan
Foto 126. Komitmen KPH Parengan dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Foto 127 dan 128. Perambahan Kawasan Hutan Lindung Krawak Sebelum dilaksanakan penanaman

Foto 129 dan 130. Kondisi Saat ini setelah Dilakukan Penanaman Bebas dari Perambahan

Foto 131. Pencurian dengan Stratifikasi A, dari Ukuran Tunggak (± 85 cm) dan Bekas Potongan Ukurn 12 x12 cm , Panjang 2,5 m, Diperkirakan untuk Tiang Bangunan Rumah.

Foto 132. Nashir, Ketua LSM "Tunggak Semi" Menunjukan Pucuk Jati Sebagai Bahan Baku Pembibitan *Pohon Jati Stek Pucuk* di Lahan Persemaiannya di Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban.

Foto 133. Pembibitan *Pohon Jati Stek Pucuk* di Lahan Persemaian di Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban.
Foto 134. Pembibitan *Pohon Jati Stek Pucuk* di Lahan Persemaian di Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban.
Foto 135. Empon-empon (Umbi Tanaman untuk Jamu) yang Dijemur oleh Pengelolanya
Foto 136. Penanaman Tumpangsari Jagung yang Dipanen di Areal Perhutani KPH Tuban (2/2/2012).
Foto 137. Backdrop Pola Tanam Sidonganti

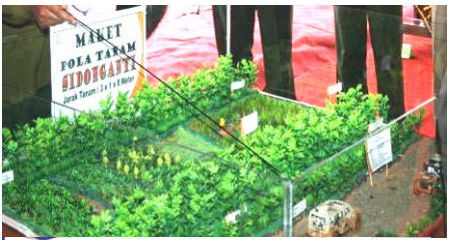

Foto 138 dan 139. Maket "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8", Dijelaskan oleh Petugas di Depan Bupati, Muspida Tuban, DPRD Tuban, Kepala Pengadilan Negeri Tuban, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban. serta Pimpinan Perhutani Unit II Jawa Timur Rabu 18 April 2012

Foto 140 dan 141. "Komitmen Bersama" Masyarakat Desa Sidonganti , Muspika, dan KPH Parengan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur di samping Kiri *Backdrop* Peresmian "Pola Tanam Sidonganti".

Foto 142. Adminstratur Parengan Oscar Maukar memberikan Sambutan saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti"

Foto 143. Pesan dan Kesan Bapak Rasip, Wakil Masyarakat Sidonganti saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012.

Foto 143. Sambutan Waka Unit II Ir. Lukman Imam Syafii pada Peresmian "Pola Tanam Sidonganti"

Foto 144. Sambutan Bupati Tuban K.H. Fathul Huda pada Peresmian Pola Tanam Sidonganti

Foto 145. Sambutan Bupati Tuban K.H. Huda pada Peresmian Pola Tanam Sidonganti

Foto 146. Audiens Masyarakat Sidonganti saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" Rabu 18 April 2012

Foto 147. Audiens Masyarakat Sidonganti saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" Rabu 18 April 2012

Foto 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, Audiens Masyarakat Sidonganti saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" Rabu 18 April 2012

Foto 156. Audiens Masyarakat Sidonganti saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" Rabu 18 April 2012

Foto 157, 158. Audiens Masyarakat Sidonganti saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" Rabu 18 April 2012
Foto 159. Kaum Wanita dan Anak-anak yang Hadir dan Menyaksikan Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012
Foto 160. Audien Pesanggem dan Undangan Warga Sidonganti yang Hadir dan Menyaksikan Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012
Foto 161. Penanaman Pohon Jati ("JPP Stek Pucuk") oleh Bupati Tuban saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012

Foto 162-165. Penanaman Pohon Jati ("JPP Stek Pucuk") oleh Karo Perencanaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur saat Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012

Foto 166. Waka Adm. KPH Parengan Ir. Deddy Memberikan Penjelasan kepada Peneliti tentang Penanaman Pohon di Bulan April Saat Musim Hujan Sedah Mulai Selesai.

Foto 167. Wakil Kepala Unit II didampingi Administratus KPH Parengan Memberikan Keterangan kepada Wartawan seusai Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012

Foto 178. Adminstratus dan Waka Adm. Parengan, Jatirogo dan Tuban seusai Peresmian "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8" di petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012

Foto 179. "Pola Tanam Sidonganti" 3-1-8": Mewujudkan masyarakat Sejahtera dan Perhutani Jaya, saat Peresmian di Petak 4b KPH Parengan Rabu 18 April 2012

Foto 180. Kayu Gelondongan yang Diangkut dengan Kendaraan Bak Terbuka di Kawasan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Foto 181. Foto Bersama Ir. Priyo Anggodo, Kepala Seksi Kehutanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tuban, Seusai Wawancara tentang KBR (Kebun Bibit Rakyat) di Kantornya.

Foto bersama masyarakat Sidonganti

April 2012

DESA SIDONGANTI

I. KEADAAN UMUM

Desa Sidonganti termasuk dalam wilayah Kec. Kerek Kab. Tuban yang dikelilingi oleh hutan dengan batas Desa :

Sebelah Utara : Tengger Kec. Kerek Kab. Tuban

Sebelah Selatan : Mulyoagung Kec. Singgahan Kab. Tuban

Sebelah Barat : Tuwiwiyan Kec. Bangilan Kab. Tuban

Sebelah Timur : Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban

II. KEADAAN SOSIAL, EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT

- Kondisi daerah Sidonganti termasuk daerah kering. Yang mempunyai lingkungannya tandus dan gersang.
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sidonganti dibawah standart hidup layak dan tergantung pada usaha pertanian serta peternakan. Lahan yang di miliki masyarakat Sidonganti dan sekitarnya terbatas dan mengakibatkan masyarakat bercocok tanam di lahan hutan.
- Persepsi masyarakat Sidonganti dengan adanya indek pembangunan manusia, perlu mendapat perhatian di bidang pendidikan, kesehatan (air bersih), pemantapan akidah dengan pembangunan masjid dan kesempatan kerja untuk masyarakat Sidonganti.

III. PERMASALAHAN

- Mayoritas masyarakat ini bekerja sebagai petani, dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kebutuhan masyarakat semakin tinggi dan lahan pertanian mereka sangat sempit. Untuk itu sasaran mereka adalah merambah hutan dengan penggarapan liar secara besar-besaran dan permanen yang mengakibatkan banyak tanaman hutan yang gagal terus menerus.

IV. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- Mengadakan konsolidasi di tingkat KPH pada tanggal 7 Maret 2012.
- Mengadakan pertemuan di Balai Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban tanggal 27 Maret 2012.
- Penandatanganan kesepakatan bersama dengan tokoh masyarakat Sidonganti, Muspika.
- Pertemuan kedua dilaksanakan di Kantor BKPH Mulyoagung dengan kesepakatan pola tanam 3 x 1 x 8 M yang diberi nama "POLA TANAM SIDONGANTI "

Penyerahan MOU ADM Parengan Kepada Kepala desa Sidonganti

GAMBAR POLA TANAM SIDONGANTI :

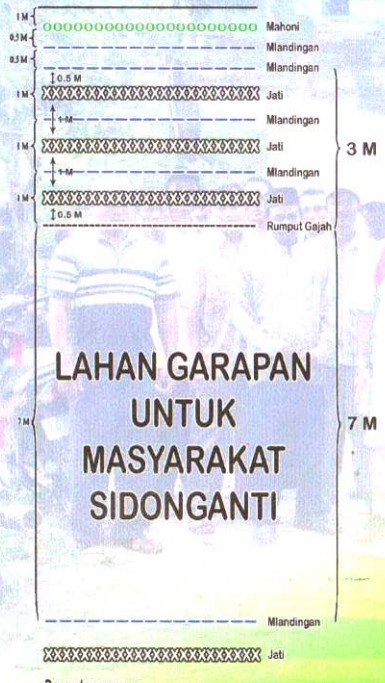

Penandatanganan kesepakatan kerja sama Perhutani KPH Parengan dengan masyarakat Sidonganti Tgl. 27 Maret 2012

POLA LONGKRONGAN (PENJARANGAN) :

- Longkrongan I : Umur 5 tahun dengan 100% untuk masyarakat / LMDH.
- Longkrongan II : Umur 10 tahun dengan 25% untuk masyarakat / LMDH.
- Longkrongan III : Umur 15 tahun dengan 25% untuk masyarakat / LMDH.
- Daur 20 tahun harus ada jumlah pohon tumbuh per hektar 1.080 pohon dengan bagi hasil tebangan kayu sebesar : 25% untuk masyarakat/LMDH.

Diharapkan dengan sistem yang baru ini masyarakat bisa menggarap lahan hutan lebih longgar, bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan pada akhirnya tidak menggangu hutan lagi.

Foto hasil kesepakatan bersama masyarakat Sidonganti

Warga Setuju Diberi Garapan

■ KPH TUBAN

Peristiwa berdarah dengan tertembak dan tertangkapnya Tabri bin Modi, warga asal Desa Sidonganti di hutan petak 3, RPH Mulyoagung, BKPH Mulyoagung, masuk Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, yang proses penangkapannya dilumpuhkan dengan penembakan ke arah kaki tersangka oleh Anggota Polsek Singgahan, beberapa waktu lalu membuat pihak menejemen Perhutani KPH Parengan dan KPH Jatirogo menegaskan akan segera memberdayakan masyarakat yang tinggal di wilayah di kawasan tersebut, dan segera mengakhiri tindakan perusakan hutan.

"Program untuk tanaman kayu putih di kawasan Desa Sidonganti dan sekitarnya, sudah ada beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, Perum Perhutani telah membuat program pemberdayaan masyarakat disana melalui tanaman ini. Namun, karena kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat tersebut kurang intensif, maka perlu untuk diperbaiki dan dibuat pengadaan baru lagi," kata Kepala Seksi Komunikasi Sosial KPH Jatirogo dan Parengan, Mubarok N.A. Sigit, melalui telpon genggamnya, Kamis (02/02/2012).

Dikatakan, tindakan lanjutan untuk segera merealisasikan program pemberdayaan masyarakat tersebut Perhutani KPH Jatirogo sendiri juga telah melakukan beberapa komunikasi dengan para tokoh masyarakat di rumah salah di Desa Gemulung, Kecamatan Tambakboyo.

Semua tokoh elemen masyarakat tersebut, menurut Anang Tejo Anggono, Shut, Wakil Administratur Perhutani KPH Jatirogo, hampir semua hadir untuk berkomunikasi dan menginginkan tanaman jenis kayu putih segera direalisasikan dalam waktu yang tidak lama.

Berdasarkan *data base* di Perhutani KPH Parengan disebutkan, saat ini tanaman kayu putih yang berada di beberapa petak-petak hutan di wilayah BKPH Mu

Sumber: Bina, Edisi 13-Maret 2012/Thn.XXXIX, Hal 22-23.

lyogung masih terdapat ribuan tanaman jenis ini dengan kondisi masih bisa untuk dimanfaatkan namun pemelihraan yang intensiv, karena dalam kondisi diganggu oleh hama rayab.

"Rata-rata telah rusak dan perlu perawatan yang lebih banyak perhatian dan ada solusinya untuk memulyakan menjadi tanaman yang akan diprogamkan jika ini menjadi pilihan mereka," ungkap Rudi Hartono, Asper BKPH mulyogung, KPH Parengan, saat dikonfirmasi BINA dikantornya, Rabu, (29/02).

Saat dikonfirmasi tentang masalah ini, salah satu tokoh asal dusun Bangkok Desa Gemulung, Kecamatan Tambakboyo, Mbah Jati, membenarkan bahwa sikap Perhutani sudah banyak berubah dan segera memberdayakan masyarakatnya.

"Kami sangat antusias dengan keinginan yang telah deal dengan mereka. Itu cita-cita kami agar timbul kepedulian terhadap hutan sekitar kami. Kami sudah lama ingin hutan disekeliling kami hijau kembali," tutur kala pertemuan di desa tersebut.

Agenda ini juga telah dibicarakan saat ada pertemuan dengan Drs. H. Mohammad Adib, MA, Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, ketika mengajak beberapa tokoh masyarakat ini di Pos PTM 16, BKPH Ngulahan.

Saat ditemui BINA di kantornya, Sigit Mubarok membenarkan bahwa kegiatan dosen tersebut adalah saksi komunikasi sosial antara warga yang di segitiga emas dan langsung bertatap muka bersama dengan Asper Ngulahan, Sarju dan Asper Bahoro, Juprıyanto.

■ Slamet Riyadi

Adib saat berkomunikasi dengan warga dan pihak Perhutani. Disaksikan Kasi Komsos Unit II Jatim, Sigit Mubaraok.

Sumber: *Bina,* Edisi 13-Maret 2012/Thn.XXXIX, Hal 22-23.

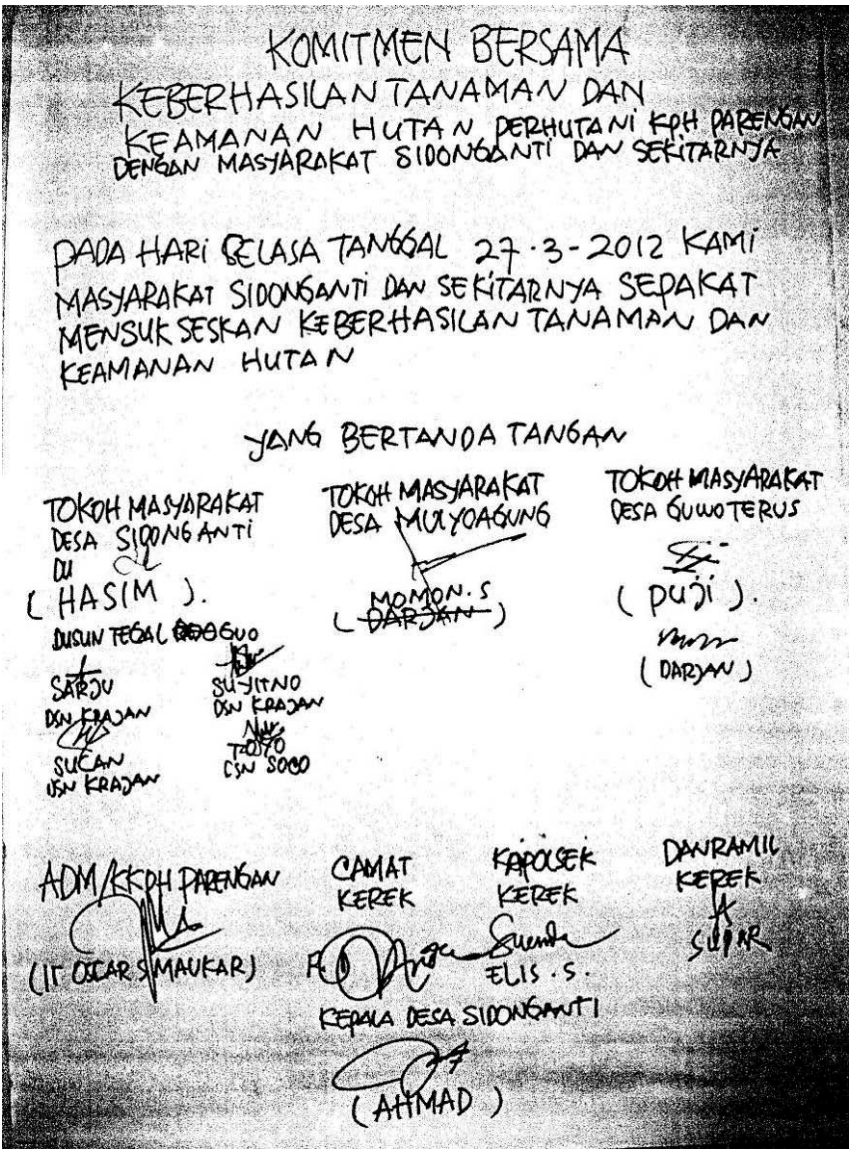

KOMITMEN BERSAMA
KEBERHASILAN TANAMAN DAN
KEAMANAN HUTAN PERHUTANI KPH PARENGAN
DENGAN MASYARAKAT SIDONGANTI DAN SEKITARNYA

PADA HARI SELASA TANGGAL 27-3-2012 KAMI
MASYARAKAT SIDONGANTI DAN SEKITARNYA SEPAKAT
MENSUKSESKAN KEBERHASILAN TANAMAN DAN
KEAMANAN HUTAN

YANG BERTANDA TANGAN

TOKOH MASYARAKAT
DESA SIDONGANTI
(HASIM).

DUSUN TEGAL
SARJU
DSN KRAJAN
SUCAN
DSN KRAJAN

SUYITNO
DSN KRAJAN
TOTO
DSN SOGO

TOKOH MASYARAKAT
DESA MULYOAGUNG
(DARJAN)

TOKOH MASYARAKAT
DESA GUWOTERUS
(PUJI).
(DARYAN)

ADM/KKPH PARENGAN
(IR OSCAR SIMAUKAR)

CAMAT
KEREK

KAPOLSEK
KEREK
ELIS . S .

DANRAMIL
KEREK

KEPALA DESA SIDONGANTI
(AHMAD)

Dokumentasi tgl. 27 Maret 2012, di Balai Desa Sidonganti

Lampiran 2. Desa Pangkuan Hutan Perum Perhutani Unit Ii Jawa Timur KPH Tuban S/D Bulan Desember 2011

NO	KPH/BKPH/RPH	Desa/Kec/Kab	NAMA LMDH	NAMA KETUA	Jumlah Anggota LMDH (Orang)	LUAS HUTAN PANGKUAN (Ha)	Tahun Pembentukan LMDH	Badan Hukum/ Akta Notaris (No perjanjian)	Badan Hukum/ Akta Notaris (No pendirian)	Kriteria LMDH
1	2	3	6		7	7	8	9	11	12
1	Tuban/ Kerek Padasan	Padasan Kerek Tuban	Wono Joyo	SUMIYAR	330	148.7	2003	12 tgl 08/03/2005	40 tgl26/07/2003	Pemula
2	Tuban/ Kerek Padasan	Pucangan Montong Tuban	Wono Lestari jaya	KADARKO	578	602.4	2005	106 tgl30/12/2005	02 tgl03/10/005	Pemula
3	Tuban/ Kerek Ngionde	Tengger watan Kerek Tuban	Wono Asri	MUSTAK	180	225.1	2007	234 tgl27/06/2008	4784 tgl22/11/2007	Pemula
4	Tuban/ Kerek Ngionde	Wolu Tengah Kerek Tuban	Jati Lestari	KASMILAN	237	47.7	2003	46 tgl27/01/2006	32 tgl26/07/2003	Pemula
5	Tuban/ Kerek Ngionde	Temayang Kerek Tuban	Wono Asri	RADJIT	170	138.1	2003	45 tgl19/12/2006	43 tgl26/07/2003	Pemula
6	Tuban/ Kerek Simbatan	Jarorejo Kerek Tuban	Wono Dewi Arum	MURDJIANTO	325	266.2	2008	31 tgl20/02/2008	18 tgl14/02/2008	Pemula
7	Tuban/ Kerek Simbatan	Hargoretno Kerek Tuban	Wono Arum	SULAEMAN	300	216.1	2006	44tgl19/12/2006	58 tgl18/92006	Pemula
8	Tuban/ Kerek Gaji	Mliwang Kerek Tuban	Jati Makmur	SUMARDI	387	423.4	2003	49tgl19/12/2006	37 tgl26/07/2003	Pemula
9	Tuban/ Kerek Gaji	Kasiman Kerek Tuban	Wono Agung	KAMIT	58	174.6	2008	30 tgl20/02/2008	17 tgl14/2/2008	Pemula
10	Tuban/ Kerek Gaji	Kedungrejo Kerek Tuban	Wono Rejo	SUMARI	105	393.7	2008	112 tgl30/01/2009	90 tgl24/12/2008	Pemula
11	Tuban/ Kerek Gaji	Tlogowaru Merakurak Tuban	Tlogo Wono	WANCI	215	69.6	2008	111 tgl30/01/2009	91 tgl24/12/2008	Pemula
12	Tuban/ Kerek Sugihan	Temaji Jenu Tuban	Jati Unggul	SATRUP	157	216.2	2003	43 tgl19/12/2006	41 tgl26/7/2003	Pemula
13	Tuban/ Kerek Sugihan	Sumurgeneng Jenu Tuban	Wono Kaseping	AMAN	185	200.4	2006	50 tgl19/12/2006	57 tgl18/2/2006	Pemula
14	Tuban/ Kerek Sugihan	Toho Merakurak Tuban	Wono Asri	KAIJAN	165	271.6	2007	66 tgl31/01/2007	36 tgl18/01/2007	Pemula
15	Tuban/ Kerek Sugihan	Suwalan Jenu Tuban	Wono Wiji Sejahtera	SUWARNO	227	71.8	2008	32 tgl20/02/2008	19 tgl14/2/2008	Pemula
16	Tuban/ Kerek Sugihan	Sugihan Merakurak Tuban	Wono Makmur	SUGENG	87	237.3	2008	29 tgl20/02/2008	16 tgl14/2/2008	Pemula
17	Tuban/ Merakurak Bacok	Talun Montong Tuban	Jenggolo manik	DRS. SAIFULLAH	125	93.3	2003	17 tgl09/03/2005	46 tgl28/7/2003	Pemula
18	Tuban/ Merakurak Bacok	Tegalrejo Merakurak Tuban	Wono Lestari	M.MUZAIYIN	459	399.9	2005	105 tgl30/12/2005	01 tgl3/10/2005	Pemula
19	Tuban/ Merakurak Kebonagung	Jerak Montong Tuban	Bongak Permai	SUBAKIR	616	964.4	2003	48 tgl19/12/2006	47 tgl28/7/2003	Pemula
20	Tuban/ Merakurak Merakurak	Tuwiri wetan Merakurak Tuban	Wono Mulyo	TASMURI	183	493.0	2003	42 tgl19/12/2006	42 tgl26/7/2003	Pemula
21	Tuban/ Merakurak Merakurak	Tahulu Merakurak Tuban	Sri Rejeki	JOKOWONO	163	218.9	2006	47 tgl19/12/2006	59 tgl18/9/2006	Pemula
22	Tuban/ Merakurak Merakurak	Kapu Merakurak Tuban	Wono Suco Tani	TAROM	215	287.8	2006	46 tgl19/12/2006	56 tgl18/9/2006	Pemula
23	Tuban/ Jadi Jadi	Jadi Semanding Tuban	Sumber Makmur	DASIR	1,560	1196.2	2003	70 tgl23/12/2006	45 tgl28/7/2003	Pemula
24	Tuban/ Jadi Gesikan	Gesikan Grabakan (Rengel) Tuban	Wono Subur	ROHMAD	1,301	577.2	2005	13 tgl03/12/2005	39 tgl26/7/2005	Pemula
25	Tuban/ Jadi Gesikan	Waleran Gesikan Tuban	Wono Lestari	GUNARYO	800	592.9	2003	2 tgl01/02/2007	30 tgl26/07/2003	Pemula
26	Tuban/ Jadi Bogor	Brunggahan Kulon Semanding Tuban	Bukun Santoso	WASITO	750	468.2	2003	66 tgl23/12/2006	38 ygl26/7/2003	Pemula
27	Tuban/ Jadi Sambungrejo	Bektibanjo Semanding Tuban	Wono Agung	JUPLIN	760	549.4	2003	65 tgl23/12/2006	48 tgl28/7/2003	Pemula
28	Tuban/ Jadi Sambungrejo	Sambungrejo Semanding Tuban	Wono Ngrembeko	PARYUGIN	250	248.8	2003	71 tgl23/12/2006	72 tgl28/11/2006	Pemula
29	Tuban/ Jadi Kasyan	Dermawuhanjo Grabakan Tuban	Empu Supo	JOYOWAGE	262	850.0	2006	72 tgl23/12/2006	20 tgl25/7/2006	Pemula
30	Tuban/ Plumpang Pakah	Sumberagung Plumpang Tuban	Sumber Agung	IR. SUWANDI	150	1196.2	2003	-	31 tgl26/7/2003	Pemula
31	Tuban/ Plumpang Pakah	Genaharjo Semanding Tuban	Wono Indah	RASIO	40	125.2	2008	45 tgl30/04/2008	11 tgl04/04/2008	Pemula
32	Tuban/ Plumpang Suruhan	Pakis Grabakan Tuban	Tlogo Mulyo	KARTONO	150	128.4	2008	46 tgl30/04/2008	10 tgl4/4/2008	Pemula
33	Tuban/ Plumpang Suruhan	Kesamben Plumpang Tuban	Jati Makmur	MADARI	69	132.6	2003	1 tgl 01/03/2007	34 tgl26/7/2003	Pemula
34	Tuban/ Plumpang Ngentbe	Mgino Semanding Tuban	Wono Makmur	MATORI	250	713.1	2005	103 tgl30/12/2006	4 tgl14/11/2005	Pemula
35	Tuban/ Plumpang Ngentbe	Sumurjalak Plumpang Tuban	Selo Lumbung Rejo	LASDAM	110	265.7	2006	4 tgl 01/02/2007	73 tgl28/11/2006	Pemula
36	Tuban/ Plumpang Rengel	Grabakan Grabakan Tuban	Wono Asri	EDY SURIYANTO	300	128.2	2006	67 tgl23/12/2006	19 tgl10/10/2006	Pemula
37	Tuban/ Plumpang Rengel	Rengel/ rengel Tuban	Rengel Jaya	SIYAT	85	146.9	2008	43 tgl30/04/2008	8 tgl4/4/2008	Pemula
38	Tuban/ Plumpang Rengel	Maibit Rengel Tuban	Lanjar Maibit Hutan Jaya	PAMUJIHARTO	105	125.7	2008	47 tgl30/04/2008	09 tgl4/4/2008	Pemula
39	Tuban/ Plumpang Rengel	Banyubang Grabakan Tuban	Banyubang	SLAMET	340	86.7	2006	68 tgl23/12/2006	26 tgl14/12/2006	Pemula
40	Tuban/ Sundulan Ngimbang	Ngimbang Palang Tuban	Ngimbang Makmur	MUNANDAR	200	433.1	2003	-	44 tgl26/7/2003	Pemula
41	Tuban/ Sundulan Ngimbang	Gesing Semanding Tuban	Wono makmur	SUHARNO	75	453.1	2006	69 tgl23/12/2006	18 tgl10/10/2006	Pemula
42	Tuban/ Sundulan Sigarak	Mnohanjo Widang Tuban	Wono Langgeng	PARMAN	50	46.8	2003	-	33 tgl26/7/2003	Pemula
43	Tuban/ Sundulan Sigarak	Sumberrejo Widang Tuban	Wono Asri	MOPID	75	469.5	2005	104 tgl30/12/2005	67 tgl22/12/2005	Pemula
44	Tuban/ Sundulan Wangun	Wangun Palang Tuban	Wono Lestari	SUPARJO	75	76.4	2008	44 tgl30/04/2008	07tgl4/4/2008	Pemula

				SUMANTRI B.A						
45	Tuban/ Sumdulan Kepodang	Ketambul Palang Tuban	Maju Lestari	HASAN	125	439.4	2008	-	35 tgl26/7/2008	Pemula
46	Tuban/ Sumdulan Kujung	Kujung Widang Tuban	Reksa Buwono	LAMRAN	100	1195.7	2003	-	36 tgl26/7/2003	Pemula
47	Tuban/ Sumdulan Kujung	Mulangi Widang Tuban	Wono Lestari Jaya	SANTO	52	120.5	2008	111 tgl28/02/2009	13 tgl7/4/2008	Pemula
48	Tuban/ Sumdulan Kepodang	Blogorejo Brondong Lamongan	Wono Bahagio	KHOENADI	155	287.7	2008	18 tgl15/05/2008	06 tgl4/4/2008	Pemula
49	Tuban/ Jompong Gelap	Gelap Laren Lamongan	Wono Makmur	CHUSNUL CHOSIN	53	683.8	2006	13 tgl30/08/2006	12 tgl26/7/2006	Pemula
50	Tuban/ Jompong Gelap	Dateng Laren Lamongan	Sumber Urip	KASMUDAR	-	271.5	-	-	-	Pemula
51	Tuban/ Jompong Gampang	Blangwot Laren Lamongan	Harapan Jaya	H. MUKDAR	98	614.2	2003	13 tgl 20/12/2004	13 tgl26/7/2003	Pemula
52	Tuban/ Jompong Gampang	Gampang Laren Lamongan	Wono Asri	H. KUSNAN	72	369.7	2006	-	13 tgl30/12/2006	Pemula
53	Tuban/ Jompong Siman	Sumberagung Brondong Lamongan	Wono Jalasi	KARTAJI	-	1335.4	-	-	-	Pemula
54	Tuban/ Jompong Siman	Dadapan Solokuro Lamongan	Anda - Anda Lumut	RUSLAN	87	93.8	2003	14 tgl20/12/2004	11 tgl26/7/2003	Pemula
55	Tuban/ Jompong Dadapan	Tenggulun Solokuro Lamongan	Kali Cendri	MOCH. KHASAN	-	97.2	-	-	-	Pemula
56	Tuban/ Jompong Dadapan	Tebluru Solokuro Lamongan	Watu Telo	H. KASTAR	25	123.5	2007	-	07 tgl15/2/2007	Pemula
57	Tuban/ Jompong Lembor	Lambor Brondong Lamongan	Hijau Lestari	KASMUANAM	86	611.0	2003	14 tgl30/08/2006	14 tgl26/7/2003	Pemula
58	Tuban/ Jompong Lembor	Sendanghajo Brondong Lamongan	Wono Lestari	MATISKAN	78	1094.6	2006	16 tgl30/08/2006	15 tgl26/07/2003	Pemula
59	Tuban/ Jompong Pambon	Sedayulawas Brondong Lamongan	Ragas rejo	SUTOPO	-	219.3	-	-	-	Pemula
60	Tuban/ Jompong Pambon	Brengkok Brondong Lamongan	Bakti Pertiwi	H. MUSLIM S.Pd	-	177.0	-	-	-	Pemula
61	Tuban/ Kranji Kranji	Dagan Solokuro Lamongan	Wono Joyo	MOH ILHAM	82	352.3	2002	08 tgl30/08/2006	8 tgl26/7/2003	Pemula
62	Tuban/ Kranji Kranji	Sendangagung Paciran Lamongan	Wono Selo	MAKIM	32	57.2	2007	-	06 tgl14/2/2007	Pemula
63	Tuban/ Kranji Solokuro	Payaman Solokuro Lamongan	Barokah Sejati	MAHIN KASUN	140	396.3	2003	12 tgl30/08/2006	10 tgl26/7/2003	Pemula
64	Tuban/ Kranji Solokuro	Solokuro Solokuro Lamongan	Wono Sakti	ABDUL HADI	67	515.2	2007	17 tgl30/08/2006	01 tgl8/6/2007	Pemula
65	Tuban/ Kranji Solokuro	Takerharjo Solokuro Lamongan	Sudjiharjo	HASYIM MIRUN	35	174.5	2007	-	09 tgl9/3/2007	Pemula
66	Tuban/ Kranji Panceng	Suroyiti Panceng Gresik	Suhur Wono rejo	SUMANTRI	28	225.2	2003	-	09 tgl26/7/2003	Pemula
67	Tuban/ Kranji Panceng	Prupuh Panceng Gresik	Sumber Lestari	ABDUL PATAH	-	94.1	-	-	-	Pemula
68	Tuban/ Kranji Panceng	Wotan Panceng Gresik	Sumber Makmur	SHOMADI	-	296.0	-	-	-	Pemula
69	Tuban/ Kranji Panceng	Ketanen Panceng Gresik	Suhur Jaya	MUCLISIN	-	5.8	-	-	-	Pemula
70	Tuban/ Kranji Panceng	Sukodono Panceng Gresik	Wono Asri	ASKURI	-	21.7	-	-	-	Pemula
71	Tuban/ Kranji Panceng	Cangaan Panceng Gresik	Wono Lestari	SUMARI	-	243.3	-	-	-	Pemula
72	Tuban/ Kranji Panceng	Siwalan Panceng Gresik	Selo Jaya	AHMAD SAIKUN	-	79.9	-	-	-	Pemula
www.win2.ca@										
	JUMLAH				14,539	25366.3				

Sumber: Perum Perhutani KPH Tuban, 2012

KETERANGAN:

LMDH BERAKTE NOTARIS (PKS) = 51 LMDH

LMDH YANG BELUM BERAKTE NOTARIS (PKS) = 21 LMDH

JUMLAH TOTAL LMDH = 72 LMDH

Lampiran 3. LMDH di KPH Jatirogo

NO	NAMA LMDH	NAMA KOP LMDH	DESA	KEC	KAB	NAMA		AKTE	AKTE	No Bdn Hukum	Jenis Usaha
						KETUA LMDH	KET.KMDH	PENDIRIAN	P K S	KOPERASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JATI MULYO	MULYO ASIH	BENDOLATENG	KENDURUAN	TUBAN	SUMIYARTO	PARIMIN	02/II/Tgl 24022005	07/V/Tgl 30/05/2006	010A/BH/XVI.28414.055/2010	HOME INDUSTRI SAPROTAN
2	WANA BINA LESTARI	WANA BINA LESTARI	BATE	BANGILAN	TUBAN	SUMARJAN	SUMARJAN	13/II/Tgl 24022005	13/V/Tgl 30/05/2006	008A/BH/XVI.28414.055/2010	PETERNAKAN & KSP
3	NGUDI LUHUR	NGUDI LUHUR	SIDOENTREM	BANGILAN	TUBAN	SUWADI	SOEJADI	12/II/Tgl 24022005	I2/V/Tgl 30/05/2006	028/BH/XVI.28414.045/2007	SAPROTAN & KSP
4	KEDUNG ASRI	KEDUNG ASRI	KEDUNGMAKAM	JATIROGO	TUBAN	DARMANI	FRANGKY E.M	01/I/Tgl 24/02/2005	06/V/Tgl 30/05/2006	014A/BH/XVI.28414.055/2010	KERAJINAN AKAR TUNGGAK
5	WANA BANGKIT	JATI LARAS	DIKIR	TAMBAKBOYO	TUBAN	SUMARI	SUMARI	04/II/Tgl 24022205	08/V/Tgl 30/05/2006	003A/BH/XVI.28414.055/2010	SAPROTAN & KSP
6	TANI WANA JAYA	TANI WANA JAYA	DINGIL	JATIROGO	TUBAN	F.KONCAR	WARSONO	08/II/Tgl 24022005	17/V/Tgl 30/05/2006	017A/BH/XVI.28414.055/2010	SAPROTAN & KSP
7	WANA AGUNG	WANA AGUNG	PLAJAN	TAMBAKBOYO	TUBAN	H.M.YASIR	MUADJIB	05/II/Tgl 24022005	09/V/Tgl 30/05/2006	002A/BH/XVI.28414.055/2010	JASA SAPROTAN & KSP
8	WONO MAKMUR	WONOMAKUR	BANJARWORO	BANGILAN	TUBAN	NUR HADI W	SUPAR	05/I/Tgl 31/01/2003	01/IV/Tgl17/04/203	005A/BH/XVI.28414.055/2010	SAPROTAN & KSP
9	WONO MUKTI	-	SIDOMUKTI	KENDURUAN	TUBAN	KARSONO	-	25/Tgl 07 januari 2008	34/27-09 2010	BELUM	-
10	MAKMUR JAYA	-	SADANG	JATIROGO	TUBAN	R A S N O	-	32/Tgl 27 September 2011	33/27-09 2010	BELUM	-
11	WANA BAKTI	-	B E J I	KEDEWAN	BOJONEGORO	GINOCO	-	315/19 Maret 2003	35/27-09 2010	BELUM	-
12	WANA LESTARI	-	MULYO AGUNG	SINGGAHAN	TUBAN	MOMON SP	-	5/062/11 Desember 2007	36/27-09 2010	SUDAH	-
13	WANA LESTARI	-	KEDEWAN	KEDEWAN	BOJONEGORO	K A S D I	-	09/19 Maret 2003	37/27-09 2010	BELUM	-
14	MUGI LESTARI	-	LAJU LOR	SINGGAHAN	TUBAN	MAKINUDIN	-	30/27 September 2010	31/27-09 2010	BELUM	-
15	TANI LUHUR	TANI LUHUR	JAMPRONG	KENDURUAN	TUBAN	TRIMO	TRIMO	03/IX/Tgl 24/09/2006	04/XII/Tgl 26/12/2006	011A/BH/XVI.28414.055/2010	HOME INDUSTRI MEBEL
16	WONOREJO	WONOREJO	SIDOREJO	KENDURUAN	TUBAN	PUSPO WARNO	PUSPO WARNO	06/VII/Tgl 10/07/2008	04/XII/Tgl 26/12/2008	009A/BH/XVI.28414.055/2010	SAPROTAN & KSP
17	SIDO MAKMUR JAYA	SIDO MAKMUR JAYA	KD JAMBANGAN	BANGILAN	TUBAN	SUMASTONO	SUKIMAN	07/II/TGL24/02/2005	051/TGL 19/01/2009	012A/BH/XVI.28414.055/2010	JASA SAPROTAN & KSP

Sumber: KPH Jatirogo, 2012

Lampiran 4a Kawasan Hutan Pangkuan Desa LMDH di KPH Parengan

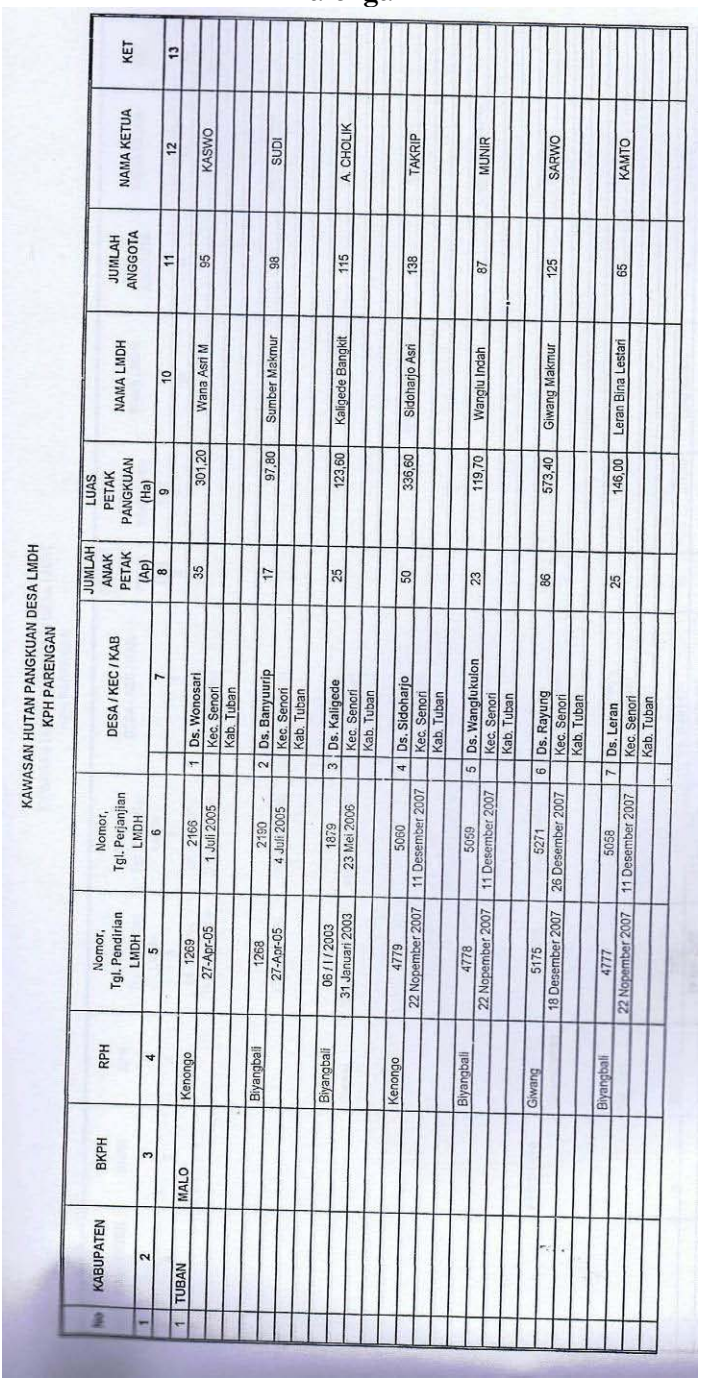

KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA LMDH
KPH PARENGAN

No	KABUPATEN	BKPH	RPH	Nomor, Tgl. Pendirian LMDH	Nomor, Tgl. Perjanjian LMDH		DESA / KEC / KAB	JUMLAH ANAK PETAK (Ap)	LUAS PETAK PANGKUAN (Ha)	NAMA LMDH	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA	KET
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	TUBAN	MALO	Kenongo	1269	2166	1	Ds. Wonosari	35	301,20	Wana Asri M	95	KASWO	
				27-Apr-05	1 Juli 2005		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						
			Biyangbali	1268	2160	2	Ds. Banyuurip	17	97,80	Sumber Makmur	98	SUDI	
				27-Apr-05	4 Juli 2005		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						
			Biyangbali	06 / 1 / 2003	1879	3	Ds. Kaligede	25	123,60	Kaligede Bangkit	115	A. CHOLIK	
				31 Januari 2003	23 Mei 2006		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						
			Kenongo	4779	5060	4	Ds. Sidoharjo	50	336,60	Sidoharjo Asri	138	TAKRIP	
				22 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						
			Biyangbali	4778	5059	5	Ds. Wanglukulon	23	119,70	Wangilu Indah	87	MUNIR	
				22 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						
			Giwang	5175	5271	6	Ds. Rayung	86	573,40	Giwang Makmur	125	SARWO	
				18 Desember 2007	26 Desember 2007		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						
			Biyangbali	4777	5058	7	Ds. Leran	25	146,00	Leran Bina Lestari	65	KAMTO	
				22 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Senori						
							Kab. Tuban						

KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA LMDH
KPH PARENGAN

No	KABUPATEN	BKPH	RPH	Nomor, Tgl. Pendirian LMDH	Nomor, Tgl. Perjanjian LMDH		DESA / KEC / KAB	JUMLAH ANAK PETAK (Ap)	LUAS PETAK PANGKUAN (Ha)	NAMA LMDH	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA	KET
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		PPGN	Sembung	05 / I / 2004	04 / III / 2004	8	Ds. Kumpulrejo	22	100,80	Tani Makmur	165	JIRMAN	
				31 Januari 2004	27 Maret 2004		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Getas	982	983	9	Ds. Kemlaten	16	143,60	Jati Makmur	180	JATI KESOWO	
				27 Maret 2006	27 Maret 2006		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Getas	4780	5061	10	Ds. Katerban	37	300,40	Sumber Makmur	180	SUKARNO	
			Giwang	22 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Sembung	4953	5017	11	Ds. Cengkong	3	23,80	Alas Cengkong Asri	30	KUSMONO	
				3 Desember 2007	7 Desember 2007		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Sembung	4954	5018	12	Ds. Brangkal	4	30,70	Martani	75	LANANG SUWITO	
				3 Desember 2007	7 Desember 2007		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
		PRG UTARA	Ngawun	07 / I / 2004	01 / V / 2004	13	Ds. Ngawun	69	539,10	Wono Subur	176	SUSANTO	
			Kedungjambe	31 Januari 2004	26 Mei 2004		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Manjung	1210	2076	14	Ds. Wukirharjo	69	1.154,70	Tani Makmur	240	JAYADI	
			Gebalan	21-Apr-05	28 Juni 2005		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Ngawun	1822	1990	15	Ds. Sukorejo	35	291,10	Suka Rimba	76	SUJAK	
				19 Mei 2006	31 Mei 2006		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Parengan	3124	4741	16	Ds. Parangbatu	136	1.060,30	Jati Asri	210	SLAMET S	
			Ponco	01-Sep-05	09-Des-05		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Kedungjambe	867	868	17	Ds. Manjung	15	627,80	Sekar Jati	115	WALUYO	
			Manjung	20 Maret 2006	20 Maret 2006		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						

KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA LMDH
KPH PARENGAN

No	KABUPATEN	BKPH	RPH	Nomor, Tgl. Pendirian LMDH	Nomor, Tgl. Perjanjian LMDH		DESA / KEC / KAB	JUMLAH ANAK PETAK (Ap)	LUAS PETAK PANGKUAN (Ha)	NAMA LMDH	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA	KET
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		PRG SELATAN	Ponco	05 / I / 2004	02 / IV / 2004	18	Ds. Suciharjo	27	289,50	Wono Utomo	171	YAKUR SUHADI	
				31 Januari 2004	28 Mei 2004		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Tluwe	08 / I / 2004	06 / III / 2004	19	Ds. Pacing	73	515,80	Wono Semi	210	PARIANTO	
			Ponco	31 Januari 2004	27 Maret 2004		Kec. Parengan						
			Sugihwaras				Kab. Tuban						
			Gebalan										
			Sugihwaras	3120	4997	20	Ds. Mojomalang	19	119,80	Jati Lestari	96	M. SHOLEH	
				31 Agustus 2005	29 Desember 2005		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Tluwe	4913	4914	21	Ds. Tluwe	36	292,30	Resi Joyo Asri	112	DASIMIN	
				23 Desember 2005	23 Desember 2005		Kec. Soko						
							Kab. Tuban						
			Sugihwaras	3225	4734	22	Ds. Sugihwaras	38	290,90	Trubus Subur	122	MULYONO	
				12-Sep-05	9 Desember 2005		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						
			Sugihwaras	2110	2173	23	Ds. Jati	31	265,80	Bina Jati Lestari	87	SUMARTO	
			Tluwe	9 Juni 2006	14 Juni 2006		Kec. Soko						
							Kab. Tuban						
			Tluwe	2139	2174	24	Ds. Wadung	16	184,90	Giat Mulyo	78	SUKARDI	
				12 Juni 2006	14 Juni 2006		Kec.Soko						
							Kab. Tuban						
			Sugihwaras	4957	5021	25	Ds. Pandanagung	4	43,90	Jaya Makmur	64	AGUS JAKA Y	
				3 Desember 2007	7 Desember 2007		Kec. Soko						
							Kab. Tuban						
			Sumberan	1559	5056	26	Ds. Dagangan	25	288,80	Sumber Tani M	98	MAKHMUDY	
			Gebalan	7 Mei 2007	11 Desember 2007		Kec. Parengan						
							Kab. Tuban						

KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA LMDH
KPH PARENGAN

No	KABUPATEN	BKPH	RPH	Nomor, Tgl. Pendirian LMDH	Nomor, Tgl. Perjanjian LMDH		DESA / KEC / KAB	JUMLAH ANAK PETAK (Ap)	LUAS PETAK PANGKUAN (Ha)	NAMA LMDH	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA	KET
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		MLYG	Guwoterus	11 / I / 2004	07 / III / 2004	27	Ds. Guwoterus	116	1.097,60	Wono Mulyo	105	TARTO	
			Mulyoagung	31 Januari 2004	30 Maret 2004		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Nguluhan	10 / I / 2004	05 / III / 2004	28	Ds. Nguluhan	64	688,60	Sumber Jati	159	SUJONO	
				31 Januari 2004	27 Maret 2004		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Trembul	3815	4781	29	Ds. Mulyorejo	48	436,50	Bangun Wono M	90	WARWILAN Sp.	
				14 Oktober 2005	14 Desember 2005		Kec. Singgahan						
							Kab. Tuban						
			Mulyoagung	1257	1258	30	Ds. Tingkis	26	311,60	Sumber Rejeki	107	LASTARI	
			Trembul	17-Apr-06	17-Apr-06		Kec. Singgahan						
							Kab. Tuban						
			Kedungjambe	4847	5065	31	Ds. Kedungjambe	34	330,00	Rimba Bangkit	54	DARMAJI	
				23 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Singgahan						
							Kab. Tuban						
			Mulyoagung	4781	5062	32	Ds. Mulyoagung	39	442,30	Wana Lestari	107	MOMON S	
				22 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Singgahan						
							Kab. Tuban						
			Guwoterus	3905	4116	33	Ds. Sidonganti	28	445,40	Sido Makmur	58	ACHMAD	
				26-Sep-06	10 Oktober 2006		Kec. Kerek						
							Kab. Tuban						
		MONTONG	Sumberan	09 / I / 2004	03 / III / 2004	34	Ds. Tanggulangin	131	908,00	Wono Indah	241	DASMANI	
			Nguluhan	31 Januari 2004	27 Maret 2004		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Ngindahan	1350	3223	35	Ds.Talangkembar	44	435,10	Wono Kembar	110	SABONI Spd	
				3 Mei 2005	12 Desember 2005		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Montong	1351	3224	36	Ds. Montongsekar	16	179,60	Wono Asih	84	RASMAN SH	
			Ngindahan	3 Mei 2005	12-Sep-05		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						

KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA LMDH
KPH PARENGAN

NO	KABUPATEN	BKPH	RPH	Nomor, Tgl. Pendirian LMDH	Nomor, Tgl. Perjanjian LMDH		DESA / KEC / KAB	JUMLAH ANAK PETAK (Ap)	LUAS PETAK PANGKUAN (Ha)	NAMA LMDH	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA	KET
2	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Jetak	01	2119	37	Ds. Sumurgung	50	530,60	Jati Mulyo	132	OMDIK	
				01-Sep-04	29 Juni 2005		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Jetak	1414	1455	38	Ds. Maindu	15	195,60	Wono Sumber	75	SABIANTO	
				24-Apr-06	26-Apr-06		Kec. Montong			Agung			
							Kab. Tuban						
			Jetak	4956	5020	39	Ds. Bringin	6	49,40	Jati Unggul	65	SARWANI	
				3 Desember 2007	7 Desember 2007		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Jetak	4955	5019	40	Ds. Jetak	6	42,80	Jati Kawulo	62	NURFAKIH A.R	
				3 Desember 2007	7 Desember 2007		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Montong	4214	5057	41	Ds. Pakel	29	170,80	Pakel Jati Lestari	105	KASTUR	
				8 Oktober 2007	11 Desember 2007		Kec. Montong						
							Kab. Tuban						
			Ngindahan	4784	5063	42	Ds. Tenggerwetan	7	174,50	Wono Asri	96	MUSTAK	
				22 Nopember 2007	11 Desember 2007		Kec. Kerek						
							Kab. Tuban						
					JUMLAH				14.700,70		4.858		

Lampiran 4b. Data *Sharing* Tebangan Tahun 2005-2010 di KPH Parengan

NO.	TAHUN	DESA	NILAI SHARING (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	2005	- Ds. Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban	10.983.051	
2	2006	- Ds. Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban	8.440.750	
		- Ds. Sidonganti, Kec. Kerek, Kab. Tuban	710.560	
3	2007	- Ds. Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban	16.033.743	
4	2008	- Ds. Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban	25.042.695	
5	2009	- Ds. Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban	2.809.786	
		- Ds. Sidonganti, Kec. Kerek, Kab. Tuban	11.675.984	
6	2010	- Ds. Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban	54.755	

Lampiran 4c. Data Penyaluran PKBL sampai dengan Tahun 2011 di KPH Parengan

NO.	TAHUN	JUMLAH	
		(Rp)	MITRA BINAAN
1	2	3	4
1	1992	29.000.000	13
2	1993	9.500.000	11
3	1994	32.500.000	9
4	1995	42.500.000	9
5	1996	30.000.000	10
6	1997	107.500.000	13
7	1998	85.000.000	11
8	1999	102.000.000	21
9	2000	45.000.000	3
10	2001	-	-
11	2002	76.000.000	12
12	2003	35.000.000	6
13	2004	5.000.000	1
14	2005	62.800.000	13
15	2006	42.000.000	11
16	2007	44.500.000	6
17	2008	16.000.000	1
18	2009	35.000.000	3
19	2010	65.000.000	3
20	2011	32.500.000	5
JUMLAH :		896.800.000	161

Lampiran 4d. Rekap Hasil Monitoring dan Evaluasi PHBM Tahun 2010 di Tingkat LMDH

NO	KPH		NAMA LMDH	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	NILAI	KATEGORI
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Parengan	1	Kedung Wono Jati	Kedung Rejo	Malo	Bojonegoro	911	Baik
		2	Karya Wana Sejahtera	Tinawun	Malo	Bojonegoro	783	Baik
		3	Podo Trisno	Trembes	Malo	Bojonegoro	863	Baik
		4	Sumber Makmur	Sukorejo	Malo	Bojonegoro	711	Baik
		5	Jati Mas	Malo	Malo	Bojonegoro	724	Baik
		6	Wana Bhakti	Ketileng	Malo	Bojonegoro	827	Baik
		7	Wono Makmur	Wonocolo	Kedewan	Bojonegoro	717	Baik
		8	Wono Dadi	Semlaran	Malo	Bojonegoro	723	Baik
		9	Wana Asri Mandiri	Wonosari	Senori	Tuban	693	Baik
		10	Sumber Makmur	Banyuurip	Senori	Tuban	737	Baik
		11	Kaligede Bangkit	Kaligede	Senori	Tuban	819	Baik
		12	Sidoharjo Asri	Sidoharjo	Senori	Tuban	578	Sedang
		13	Wanglu Indah	Wanglukulon	Senori	Tuban	711	Baik
		14	Giwang Makmur	Rayung	Senori	Tuban	759	Baik
		15	Leran Bina Lestari	Leran	Senori	Tuban	601	Sedang
		16	Wono Makmur	Tanggir	Malo	Bojonegoro	829	Baik
		17	Wana Bhakti	Kanten	Trucuk	Bojonegoro	705	Baik
		18	Sumber Wono Asri	Sumberejo	Trucuk	Bojonegoro	761	Baik
		19	Tani Makmur	Kumpulrejo	Parengan	Tuban	747	Baik
		20	Jati Makmur	Kemlaten	Parengan	Tuban	759	Baik
		21	Sumber Makmur	Katerban	Senori	Tuban	816	Baik
		22	Alas Cengkong Asri	Cengkong	Parengan	Tuban	627	Sedang
		23	Martani	Brangkal	Parengan	Tuban	735	Baik
		24	Wono Subur	Ngawun	Parengan	Tuban	749	Baik
		25	Tani Makmur	Wukirharjo	Parengan	Tuban	769	Baik
		26	Suka Rimba	Sukorejo	Parengan	Tuban	681	Baik
		27	Jati Asri	Parangbatu	Parengan	Tuban	693	Baik
		28	Sekar Jati	Manjung	Montong	Tuban	717	Baik
		29	Wono Utomo	Suciharjo	Parengan	Tuban	485	Sedang
		30	Wono Semi	Pacing	Parengan	Tuban	763	Baik
		31	Jati Lestari	Mojomalang	Parengan	Tuban	632	Sedang
		32	Resi Joyo Asri	Tluwe	Soko	Tuban	503	Sedang
		33	Trubus Subur	Sugihwaras	Parengan	Tuban	809	Baik
		34	Bina Jati Lestari	Jati	Soko	Tuban	636	Sedang
		35	Giat Mulyo	Wadung	Soko	Tuban	593	Sedang
		36	Jaya Makmur	Pandanagung	Soko	Tuban	737	Baik
		37	Sumber Tani Makmur	Dagangan	Parengan	Tuban	691	Baik
		38	Wono Mulyo	Guwoterus	Montong	Tuban	695	Baik

Lampiran 5: Daftar Nama-Nama LMDH Yang Mendapatkan *Sharing* Produksi Kayu Tebangan Tahun 2010 KPH Jatirogo

NO	NAMA LMDH	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	SHARING LMDH	PPH (15%)	PENRIMAAN BRSIH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wana B Lestari	Bate	Bangilan	Tuban	8,242,908	1,236,436	7,006,472	
2	Wono Makmur	Banjarworo	Bangilan	Tuban	8,572,997	1,285,950	7,287,047	
3	Wana Bangkit	Dikir	Tambakboyo	Tuban	9,513,919	1,427,088	8,086,831	
4	Wono Agung	Plajan	Tambakboyo	Tuban	8,169,336	1,225,400	6,943,936	
5	Tani Luhur	Jamprong	Kenduruan	Tuban	1,119,824	167,974	951,850	
6	Jati Mulyo	Bendolateng	Kenduruan	Tuban	917,078	137,562	779,516	
7	Wono Makmur	Wonocolo	Kedewan	Bojonegoro	2,019,558	302,934	1,716,624	
8	Sekar Jati	Sekaran	Jatirogo	Tuban	8,383,048	1,257,457	7,125,591	
9	Sumber Rejeki	Kumpul Rejo	Bangilan	Tuban	191,696	28,754	162,942	
10	Wana Tani Jaya	Dingil	Jatirogo	Tuban	13,291	1,994	11,297	
11	Wana Lestari	Ngulahan	Tambakboyo	Tuban	2,006,100	300,915	1,705,185	
12	Ngudi Luhur	Sidotentrem	Bangilan	Tuban	395,697	59,354	336,343	
Jumlah Total		**12 LMDH**	**5 Kecamatan**	**2 Kabupaten**	**49,545,452**	**7,431,818**	**42,113,634**	

Sumber: KPH Jatirogo, 2012

Lampiran 6.

Rencana Pengelolaan Hutan Disekitar Desa Sidonganti

Oleh KPH Parengan Tahun 2010

1. Pendahuluan

Dalam Pengelolaan Huatan Lestari (PHL) perlu adanya peran aktif dari masyarakat desa hutan, Perum Perhutani KPH Parengan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM Plus) telah membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Sidonganti. Dengan harapan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun dan melestarikan Sumber Daya Hutan, melalui ketua dan pengurus LMDH. Perum Perhutani dapat mengadakan pendekatan serta pembinaan yang akan menghasilkan kesadaran kelompok bermasyarakat dan selanjutnya dapat menguasai dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjaga dan merawat supaya hutan tetap eksis dan lestari.

2. Sejarah Desa Sidonganti.

Desa. Sidonganti masuk wilayah Kec. Kerek, Kab. Tuban, desa tersebut di kelilingi oleh hutan batas desa.

Sebelah Utara	= Tengger, Kec. Kerek, Kab. Tuban
Sebelah Selatan	= Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban
Sebelah Barat	= Tuwiwiyan, Kec. Bangilan, Kab. Tuban
Sebelah Timur	= Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban

Keadaan sosial desa Sidonganti termasuk daerah miskin dan penuh konflik. Letak desa Sidonganti di atas pegunungan kapur yang mana tanahnya sangat kurus dan lahan yang dimiliki masyarakat untuk pertanian sangat kurang.

Keagamaan di masyarakat Desa Sidonganti sangat rendah karena belum adanya tokoh agama yang bagus/guru ngaji dan pendidikan agama yang memadai, maka dari itu banyak orang yang buta agama sehingga perilakunya tidak sesuai dengan norma agama serta norma susila.

Pendidikan di desa Sidonganti terbilang tidak diperhatikan, kesadaran orang tua untuk mensekolahkan anak-anaknya belum ada. Mereka masih memanfaatkan anaknya untuk membantu bertani dan berternak. Sehingga

menyebabkan makin banyaknya orang yang buta ilmu pengetahuan dan tidak taat hukum dan peraturan pemerintah.

Budaya masyarakat desa Sidonganti kebanyakan suka tayub, main judi, mabuk dan main perempuan, sehingga penghasilannya untuk keperluan rumah tangga selalu kurang dan untuk mencukupi-nya mencuri kayu di hutan bahkan ada sebagian masyarakat mencuri kayu di hutan menjadi pekerjaan pokok mereka.

3. Rencana Kelola Hutan

Buffer Zone : antara desa Sidonganti dengan hutan diperlukan petak untuk lokasi penyangga. Agar masalah kerawanan hutan tidak semakin meluas baik masalah tenurial maupun pencurian kayu atau penguasaan dan pencurian sumberdaya hutan lain. Adapun radius desa Sidonganti dengan kawasan hutan adalah sekitar 500 M dan hutan yang di butuhkan sebagai penyangga sekitar 2 km .

Penanaman kayu putih: Dalam pengelolaan hutan disekitar desa Sidonganti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yaitu terwujudnya hutan lestari diperlukan tanaman khusus yang dapat mengakses kepentingan masyarakat dan kepentingan Perum Perhutani. Dalam hal ini jenis tanaman kayu putih, dimana tanaman kayu putih membutuhkan jarak tanam yang luas dan daun sering dipangkas untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dapat menanam polowijo dengan baik dan warga desa Sidonganti mempunyai penghasilan yang cukup tinggi dari pertanian sekaligus setelah tanaman kayu putih dapat di pangkas/di produksi akan menyediakan banyak lapangan kerja yang juga dapat menambah penghasilan warga. Semuanya itu dengan harapan warga Sidonganti dapat mencukupi kebutuhan mereka tanpa mengganggu Sumberdaya hutan.

Pendirian penyulingan kayu putih: Telah direncanakan bahwa diwilayah desa Sidonganti/atau disekitarnya akan di dirikan penyulingan daun kayu putih. Bistek/bentuk penyulingan yang akan dibangun adalah penyulingan home industri, penyulingan yang berskala kecil, untuk dapat di operasikan oleh perorangan/kelompok, dengan itu dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak yang bermotif padat karya; Dengan tujuan warga desa Sidonganti dan sekitarnya mendapatkan manfaat dari penyulingan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga agar tidak selalu mengganggu kelestarian hutan.

Upaya menjadikan LMDH mandiri: Setelah dibentuk LMDH Sido Makmur desa Sidonganti melalui pemilihan secara votting ternyata Bapak

Ahmad mendapatkan suara terbanyak mengalahkan 2 calon lainnya. Ahmad terpilih menjadi ketua LMDH 11 Agustus 2006 yang sekarang juga menjabat Kepala Desa Sidonganti. Dan Perum Perhutani KPH Parengan telah banyak memberikan pembinaan dan pendamping-an. Mengadakan sosialisasi PHBM, penyuluhan kehutanan, pertanian, memberikan pelatihan managemen LMDH, pelatihan usaha prodoktif kepemimpinan, peternakan dan perkoperasian. Mulai tahun 2006 di berikan dana Sharing produksi kayu :

Tahun 2006	jumlah	Rp. 723.559,-
Tahun 2009	jumlah	Rp. 13.205.495,-

Diberi pinjaman lunak dana PKBL sebesar Rp. 5.000.000,- dan beberapa peluang kerja buat kompos, borong kerja persiapan tanaman, angkut bibit dan produksi kayu.

Selain itu lokasi petak-petak hutan yang berada disekitar desa Sidonganti juga sering digunakan untuk praktek / pelatihan lapangan oleh siswa siswi SMK Kehutanan Wali Songo Gomang Tuban.

Di samping itu melalui program Bakorwil Bojonegoro Koperasi yang didirikan LMDH diberi bantuan biaya untuk pembuatan Akta Notaris. Badan Hukum Koperasi dengan maksud diharapkan LMDH Sido Makmur desa Sidonganti cepat bisa mandiri.

4. Pilot Project

Perum Perhutani KPH Parengan dalam pengelolaan hutan dengan tanaman kayu putih di sekitar pangkuan desa Sidonganti sebagai Buffer Zone yang telah direncanakan seluas 250,8 Ha, yang sudah realisasi seluas 156,2 Ha,. Masih sisa 94,6 Ha, direncanakan ditanam tahun 2010 dengan jarak tanam 6 x 1mtr agar ada kelonggaran bagi para penggarap untuk tanaman tumpangsari mereka.

Bojonegoro, 28 September 2010

Administratur / KKPH Parengan

Ir. AFWANDY

LAMPIRAN 7. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 12 a RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2008

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	12 a	26.10	18.25	2008	JATI	ISMAN	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad	
2	12 a			2008	JATI	KASNADI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
3	12 a			2008	JATI	BRALIM	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
4	12 a			2008	JATI	DASMANI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
5	12 a			2008	JATI	MUJI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
6	12 a			2008	JATI	KANDAR	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
7	12 a			2008	JATI	NGALI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
8	12 a			2008	JATI	KARSIYO	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
9	12 a			2008	JATI	URIP	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
10	12 a			2008	JATI	SURAT	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
11	12 a			2008	JATI	PANDU	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
12	12 a			2008	JATI	SANGI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
13	12 a			2008	JATI	MUNAWAR	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
14	12 a			2008	JATI	JULUK	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
15	12 a			2008	JATI	SANGGUP	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
16	12 a			2008	JATI	SADIG	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
17	12 a			2008	JATI	DAMILAH	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
18	12 a			2008	JATI	NYAMU	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
19	12 a			2008	JATI	YAT	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
20	12 a			2008	JATI	LAMIJAH	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
21	12 a			2008	JATI	SUWARNI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
22	12 a			2008	JATI	JUWADI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
23	12 a			2008	JATI	HARBI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
24	12 a			2008	JATI	KARNITI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
25	12 a			2008	JATI	SATI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
26	12 a			2008	JATI	DAKSIN	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
27	12 a			2008	JATI	TARMIN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
28	12 a			2008	JATI	DILER	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
29	12 a			2008	JATI	RUSLAN	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
30	12 a			2008	JATI	USUM	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
31	12 a			2008	JATI	SARCU	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
32	12 a			2008	JATI	KUNTARI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
33	12 a			2008	JATI	ESTAK	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
34	12 a			2008	JATI	SUKLIMIN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
35	12 a			2008	JATI	SUGUT	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	

36	12 a	2008	JATI	RAMAJI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
37	12 a	2008	JATI	KARRIT	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
38	12 a	2008	JATI	LAIN	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
39	12 a	2008	JATI	SANJU	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
40	12 a	2008	JATI	KASIR	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
41	12 a	2008	JATI	SALMO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
42	12 a	2008	JATI	GONO	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
43	12 a	2008	JATI	KASIANI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
44	12 a	2008	JATI	KAMDANI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
45	12 a	2008	JATI	DADANG	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
46	12 a	2008	JATI	SUMONO	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
47	12 a	2008	JATI	DARSIT	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
48	12 a	2008	JATI	LONO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
49	12 a	2008	JATI	SUMARDI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
50	12 a	2008	JATI	BAIJAN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
51	12 a	2008	JATI	SUGENG	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

LAMPIRAN 8. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 13 b RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2008

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	13 b	9.10	8.25	2008	K Putih	KASTURI	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
2	13 b			2008	K Putih	JASMI	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
3	13 b			2008	K Putih	MARJANI	0.15	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
4	13 b			2008	K Putih	BRONTO	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
5	13 b			2008	K Putih	TAWI	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
6	13 b			2008	K Putih	KASJAN	1.00	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
7	13 b			2008	K Putih	PRAMUSITO	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
8	13 b			2008	K Putih	DAKSU	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
9	13 b			2008	K Putih	JOIS	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
10	13 b			2008	K Putih	SUMIDAK	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
11	13 b			2008	K Putih	KAJAT	0.15	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
12	13 b			2008	K Putih	SUGUT	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
13	13 b			2008	K Putih	KASNO	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
14	13 b			2008	K Putih	SUDADI	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
15	13 b			2008	K Putih	TAYUB	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
16	13 b			2008	K Putih	YAMU	0.75	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
17	13 b			2008	K Putih	KASRINI	0.75	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
18	13 b			2008	K Putih	KASMAJI	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
19	13 b			2008	K Putih	JUPRI	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
20	13 b			2008	K Putih	JULI	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
21	13 b			2008	K Putih	RAJI	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
22	13 b			2008	K Putih	KALAM	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

LAMPIRAN 9. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 14 b
RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2006

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	14 b	17.20	15.75	2006	JATI	SAMSURI	0.25	Guwoterus	Wono M	TARTO	
2	14 b			2006	JATI	SUKRAM	0.50	Soco	Wono M	TARTO	
3	14 b			2006	JATI	MUNGIN	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
4	14 b			2006	JATI	DARMOJO	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
5	14 b			2006	JATI	SUKAK	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
6	14 b			2006	JATI	DARSILAN	0.25	Guwoterus	Wono M	TARTO	
7	14 b			2006	JATI	JASMANI	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
8	14 b			2006	JATI	KUNDONO	1.00	Guwoterus	Wono M	TARTO	
9	14 b			2006	JATI	JAMANI	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
10	14 b			2006	JATI	JARI	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
11	14 b			2006	JATI	DASMU	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
12	14 b			2006	JATI	KALAM	1.00	Sidonganti	Wono M	TARTO	
13	14 b			2006	JATI	WARSONO	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
14	14 b			2006	JATI	PAK SIMAH	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
15	14 b			2006	JATI	KARJINI	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
16	14 b			2006	JATI	SUMINDAR	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
17	14 b			2006	JATI	YANI	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
18	14 b			2006	JATI	WARTAWI	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO	
19	14 b			2006	JATI	TOMPO	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
20	14 b			2006	JATI	HARTONO	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
21	14 b			2006	JATI	SUNADI	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
22	14 b			2006	JATI	TAJIR	0.50	Sidonganti	Wono M	TARTO	
23	14 b			2006	JATI	SAJAK	0.15	Sidonganti	Wono M	TARTO	
24	14 b			2006	JATI	DARNO	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
25	14 b			2006	JATI	PURYATIN	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
26	14 b			2006	JATI	DARIMAN	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO	
27	14 b			2006	JATI	LILIK	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO	
28	14 b			2006	JATI	BEYOK	0.25	Sidonganti	Wono M	TARTO	
29	14 b			2006	JATI	RAMINI	0.25	Guwoterus	Wono M	TARTO	
30	14 b			2006	JATI	NGUCIT	0.25	Luhde	Wono M	TARTO	

LAMPIRAN 10. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 15 d RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2004

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	15 d	5.90	5.25	2004	JATI	TALIBAN	0.50	Guwoterus	Wono Mulyo	Tarto	
2	15 d			2004	JATI	SUKADI	0.50	Guwoterus	Wono Mulyo	Tarto	
3	15 d			2004	JATI	JOYO LELES	0.50	Guwoterus	Wono Mulyo	Tarto	
4	15 d			2004	JATI	NING	0.25	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
5	15 d			2004	JATI	WIKNYO	0.25	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
6	15 d			2004	JATI	SARGI	0.75	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
7	15 d			2004	JATI	DARIMAH	0.50	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
8	15 d			2004	JATI	DARSILAN	0.50	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
9	15 d			2004	JATI	LASMIJAN	0.50	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
10	15 d			2004	JATI	DARMU	0.50	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	
11	15 d			2004	JATI	MINTO	0.50	Sidonganti	Wono Mulyo	Tarto	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

31	14 b	2006	JATI	NARYANTO	0.25	Guwoterus	Wono M	TARTO
32	14 b	2006	JATI	LATIN	0.50	Soco	Wono M	TARTO
33	14 b	2006	JATI	RAMU	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO
34	14 b	2006	JATI	RASNO	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO
35	14 b	2006	JATI	SARWITO	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO
36	14 b	2006	JATI	DARUS	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO
37	14 b	2006	JATI	SUNANG	0.50	Guwoterus	Wono M	TARTO
38	14 b	2006	JATI	KASNO	0.25	Guwoterus	Wono M	TARTO

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

LAMPIRAN 11. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 16 a RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2004

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	16 a	10.80	9.00	2004	JATI	SAMBONG	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
2	16 a			2004	JATI	HLAKTAJI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
3	16 a			2004	JATI	DASIR	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
4	16 a			2004	JATI	LAMI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
5	16 a			2004	JATI	SUJAN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
6	16 a			2004	JATI	PARDI	1.50	Guwoterus	Sidomakmur	Ahmad	
7	16 a			2004	JATI	SUDARNO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
8	16 a			2004	JATI	DARWADI	0.50	Guwoterus	Sidomakmur	Ahmad	
9	16 a			2004	JATI	SUKARTI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
10	16 a			2004	JATI	DARMO	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
11	16 a			2004	JATI	KARNI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
12	16 a			2004	JATI	WAELAN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
13	16 a			2004	JATI	KOCO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
14	16 a			2004	JATI	NGASRI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
15	16 a			2004	JATI	PATMI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
16	16 a			2004	JATI	SUNI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
17	16 a			2004	JATI	CARUPO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
18	16 a			2004	JATI	BEYOK	0.50	Guwoterus	Sidomakmur	Ahmad	
19	16 a			2004	JATI	PUJI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
20	16 a			2004	JATI	PARMI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

LAMPIRAN 12. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 16 b RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2006

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	16 b	6.00	4.50	2006	MINDI	ISWATI	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
2	16 b			2006	MINDI	WIYAR	0.50	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
3	16 b			2006	MINDI	PUL	0.50	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
4	16 b			2006	MINDI	GONO	0.50	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
5	16 b			2006	MINDI	KASIR	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
6	16 b			2006	MINDI	WARMU	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
7	16 b			2006	MINDI	YOTO	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
8	16 b			2006	MINDI	KATI	0.50	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
9	16 b			2006	MINDI	KARJINI	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
10	16 b			2006	MINDI	SAMIDI	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
11	16 b			2006	MINDI	DARMU	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
12	16 b			2006	MINDI	KACUNG	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
13	16 b			2006	MINDI	NGGATO	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	
14	16 b			2006	MINDI	SANJI	0.25	Sidonganti	SIDO M	AHMAD	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

LAMPIRAN 13. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 16 b RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG TAHUN 2007

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	16 b	10.00	7.75	2007	MINDI	CAWANG	1.00	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
2	16 b			2007	MINDI	SURADI	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
3	16 b			2007	MINDI	SAREH	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
4	16 b			2007	MINDI	BATHU	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
5	16 b			2007	MINDI	BASUKI	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
6	16 b			2007	MINDI	PARWOTO	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
7	16 b			2007	MINDI	DURAJAK	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
8	16 b			2007	MINDI	KARSIDAM	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
9	16 b			2007	MINDI	TAKSU	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
10	16 b			2007	MINDI	SUTOPO	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
11	16 b			2007	MINDI	WIJI	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
12	16 b			2007	MINDI	PARIJO	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
13	16 b			2007	MINDI	RASIT	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
14	16 b			2007	MINDI	DARSITO	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
15	16 b			2007	MINDI	INTIK	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
16	16 b			2007	MINDI	DARNU	0.25	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
17	16 b			2007	MINDI	RAT	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
18	16 b			2007	MINDI	SUWARTO	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	
19	16 b			2007	MINDI	DARTO	0.50	Sidonganti	Sido Makmur	Ahmad	

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

LAMPIRAN 14. MENGERJAKAN KAWASAN TANPA IJIN PETAK 17 a RPH GUWOTERUS BKPH MULYOAGUNG

NO	PETAK	LUAS (ha)	LUAS GARAPAN (ha)	TAHUN TANAM	JENIS TAN POKOK	NAMA PENGGARAP	LUAS GARAPAN (ha)	ALAMAT	LMDH	KETUA	KET
1	17 a	55.70	47.75	2007	JATI	SUYATIN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
2	17 a			2007	JATI	RASTO	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad	
3	17 a			2007	JATI	DARSANI	1.00	Tengger	Sidomakmur	Ahmad	
4	17 a			2007	JATI	DASIKAH	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
5	17 a			2007	JATI	RASMADI	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad	
6	17 a			2007	JATI	SAMIJAN	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad	
7	17 a			2007	JATI	SUMINDAR	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
8	17 a			2007	JATI	NARTI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
9	17 a			2007	JATI	SRIATUN	1.00	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
10	17 a			2007	JATI	TARMAN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
11	17 a			2007	JATI	SUYONO	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad	
12	17 a			2007	JATI	WARTONO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
13	17 a			2007	JATI	WANTO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
14	17 a			2007	JATI	SUWARNO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
15	17 a			2007	JATI	SUWADAK	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
16	17 a			2007	JATI	DARNU	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
17	17 a			2007	JATI	NGAIJAH	0.75	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
18	17 a			2007	JATI	KASIRUN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
19	17 a			2007	JATI	JEMOKO	1.00	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
20	17 a			2007	JATI	PARLI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
21	17 a			2007	JATI	WARNI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
22	17 a			2007	JATI	ISWATI	1.00	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
23	17 a			2007	JATI	DARMUJI	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad	
24	17 a			2007	JATI	DONO	1.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
25	17 a			2007	JATI	UPARMAN	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad	
26	17 a			2007	JATI	SUTOPO	0.75	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
27	17 a			2007	JATI	PATMADI	1.00	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
28	17 a			2007	JATI	PATMI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
29	17 a			2007	JATI	RASMADI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
30	17 a			2007	JATI	DARSUKI	1.00	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
31	17 a			2007	JATI	ALIP	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
32	17 a			2007	JATI	KARSUN	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
33	17 a			2007	JATI	PARJANI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
34	17 a			2007	JATI	SABARI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
35	17 a			2007	JATI	PARSIO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
36	17 a			2007	JATI	NGADI	0.75	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	
37	17 a			2007	JATI	TARMIDI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad	

38	17 a	2007	JATI	SARJI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
39	17 a	2007	JATI	KARSIMEN	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad
40	17 a	2007	JATI	WOLYONO	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
41	17 a	2007	JATI	SARJI	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
42	17 a	2007	JATI	NYAMAT	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
43	17 a	2007	JATI	KASJI	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
44	17 a	2007	JATI	WARTONO	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
45	17 a	2007	JATI	RUSMAN	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
46	17 a	2007	JATI	RASMI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
47	17 a	2007	JATI	PANRIS	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad
48	17 a	2007	JATI	KASTIN	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad
49	17 a	2007	JATI	PRI	0.25	Soco	Sidomakmur	Ahmad
50	17 a	2007	JATI	JAMARI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
51	17 a	2007	JATI	WADIMAN	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
52	17 a	2007	JATI	KANDAR	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
53	17 a	2007	JATI	JASMIN	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
54	17 a	2007	JATI	KAMURI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
55	17 a	2007	JATI	KASTRUP	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
56	17 a	2007	JATI	WANI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
57	17 a	2007	JATI	PUJITO	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
58	17 a	2007	JATI	SAKUR	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
59	17 a	2007	JATI	RATIMIN	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
60	17 a	2007	JATI	WANCI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
61	17 a	2007	JATI	RAKIS	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
62	17 a	2007	JATI	KAMIDIN	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
63	17 a	2007	JATI	SAGER	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
64	17 a	2007	JATI	TRIMAH	0.25	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
65	17 a	2007	JATI	KORADI	1.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
66	17 a	2007	JATI	SUYONO	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad
67	17 a	2007	JATI	KARJAK	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
68	17 a	2007	JATI	MIJI	1.00	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
69	17 a	2007	JATI	SURTI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
70	17 a	2007	JATI	DAYIN	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
71	17 a	2007	JATI	TEYENG	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
72	17 a	2007	JATI	TARUS	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
73	17 a	2007	JATI	SUJAM	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
74	17 a	2007	JATI	SAGER	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
75	17 a	2007	JATI	BANTU	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
76	17 a	2007	JATI	KARYATI	0.25	Soco	Sidomakmur	Ahmad
77	17 a	2007	JATI	HANTO	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
78	17 a	2007	JATI	YAKUB	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
79	17 a	2007	JATI	DUGI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
80	17 a	2007	JATI	MASRIP	0.50	Soco	Sidomakmur	Ahmad

81	17 a	2007	JATI	SARMANI	1.00	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
82	17 a	2007	JATI	WARSIT	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
83	17 a	2007	JATI	TARMUJI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
84	17 a	2007	JATI	GUSNANG	1.00	Tengger	Sidomakmur	Ahmad
85	17 a	2007	JATI	JULI	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
86	17 a	2007	JATI	TARJAN	0.25	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
87	17 a	2007	JATI	WARJINI	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
88	17 a	2007	JATI	TAJIB	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
89	17 a	2007	JATI	TAYOH	0.50	Sidonganti	Sidomakmur	Ahmad
90	17 a	2007	JATI	SADI	0.50	Tengger	Sidomakmur	Ahmad

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Parengan Tahun 2012

Lampiran 15. Data Sumber Mata Air/Sendang/Waduk/Bendungan Yang Ada Diwilayah Hutan Kph Parengan

No.	NAMA SENDANG/ SUMBER MATA AIR	LOKASI			LUAS		KONDISI AIR		KEGUNAAN
		BKPH	RPH	PETAK	YG SUDAH DITETAPKAN (HA)	YG BELUM DITETAPKAN (HA)	MENGALIR SPJ. TAHUN	MUSIMAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sumber Air panas	Parengan U	Manjung	23C	0.20	-	x	-	-
2	Sumber Air panas WW Prataan	Parengan U	Manjung	23D	0.15	-	x	-	Obat penyakit kulit
3	Sumber mata air Watu Agar	Parengan U	Manjung	24D	0.20	-	x	-	Air Minum
4	Sumber mata air Pancuran	Parengan U	Ngawun	2D	1.20	-	x	-	Air Minum
5	Sumber mata air	Parengan U	Ngawun	3C	0.70	-	-	x	-
6	Sumber mata air Ngondang	Parengan U	Ngawun	2C	-	0.10	x	-	Air Minum
7	Sumber mata air Kemuning	Parengan U	Ngawun	4A	-	0.05	x	-	Air Minum
8	Sumber mata air Jambe	Parengan U	Ngawun	4A	-	0.10	x	-	Mandi Cuci
9	Sumber mata air Preset	Parengan U	Ngawun	5D	-	0.15	x	-	Air Minum
10	Sumber mata air Selang gede	Parengan U	Ngawun	7C	-	0.20	x	-	Air Minum
11	Sumber mata air Selang gede	Parengan U	Ngawun	7C	-	0.10	x	-	Air Minum
12	Sumber mata air Sumberan	Parengan U	Ngawun	9C	-	0.30	x	-	Air Minum
13	Sumber mata air Klampok	Parengan U	Ngawun	10I	-	0.10	x	-	Mandi Cuci
14	Waduk Preset	Parengan U	Ngawun	5D	-	0.30	x	-	Pertanian
15	Bendungan Jurang Jero	Parengan U	Parengan	12G	-	1.10	x	-	Pertanian
16	Sumber Air panas WW Prataan	Parengan S	Gebalan	34C	1.50	-	x	-	Mandi air hangat/Obat
17	Sendang Kerep	Parengan S	Gebalan	32E	2.00	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
18	Sendang Binah	Parengan S	Gebalan	32A	5.40	-	-	x	Kebutuhan rumah tangga
19	Sumber Bendo	Parengan S	Tluwe	43B	2.60	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
20	Sumber Kerep	Parengan S	Tluwe	47F	0.50	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
21	Sendang Reco	Parengan S	Tluwe	52G	0.50	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
22	Mata Air	Parengan S	Tluwe	52D	-	0.50	-	x	Kebutuhan rumah tangga
23	Sendang Budeng	Parengan S	Tluwe	48A	0.50	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
24	Sendang Pacing	Parengan S	Tluwe	47A	0.50	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
25	Sendang Gilang	Parengan S	Tluwe	47F	0.50	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
26	Sendang Tungkol	Parengan S	Tluwe	42B	-	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
27	Sendang Gondang	Parengan S	Tluwe	46	-	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
28	Sendang Miri	Punggungan	Sembung	125D	0.25	-	-	x	Dialirkan kedasa terdekat untuk kebutuhan rumah tangga
29	Dung Jumbleng	Punggungan	Kampak	93C	0.50	-	-	x	Dialirkan kedasa terdekat untuk kebutuhan rumah tangga
30	Joglak	Punggungan	Kampak	98C	0.25	-	-	x	Dialirkan kedasa terdekat untuk kebutuhan rumah tangga
31	Sumberan	Punggungan	Getas	101A	0.20	-	-	x	-
32	Sumber Mata Air Kedungpati	Malo	Malo	85C	0.60	-	-	x	Pengairan sawah
33	Sumber Mata Air Klampok	Malo	Bayanghali	30B	0.10	-	x	-	Kebutuhan rumah tangga
34	Sendang Gadong	Malo	Kenongo	6D	0.60	-	-	x	Mandi orang-orang tertentu
35	Sendang Gajah	Malo	Kenongo	16d	0.60	-	-	-	
36	Sumur wali	Montong	Ngindahan	23C	-	-	x	-	Air Minum
37	Sendang Asin	Montong	Ngindahan	23D	1.30	-	x	-	Mandi
38	Balik Luo	Montong	Ngindahan	23G	-	-	x	-	Air Minum/Mandi

39	Sumber Mata Air Kali Besar	Montong	Montong	63C	-	-	x	-	Mandi
40	Sumber Mata air Baubulan	Montong	Montong	66F	-	-	x	-	Mandi
41	Sumber Mata Air Pet	Montong	Montong	67F	-	-	x	-	Air Minum/Mandi
42	Sumber Mata Air Klampok	Montong	Sumberan	70D	-	-	x	-	Air Minum/Mandi
43	Sumber Mata Air Biji	Montong	Sumberan	70A	-	-	x	-	Mandi
44	Sumber Mata air Bayu Kuning	Montong	Sumberan	70L	-	-	x	-	Mandi
45	Sumber Mata air Ding Bunder	Montong	Sumberan	70E	-	-	x	-	Mandi
46	Sumber Mata air Poh De	Montong	Sumberan	75G	-	-	x	-	Mandi
47	Sendang Trono	Montong	Sumberan	75C	-	-	x	-	Air Minum/Mandi
48	Sendang Ngogro	Montong	Sumberan	77F	-	-	x	-	Air Minum/Mandi
49	Sendang Lanang	Montong	Sumberan	76C	-	-	x	-	Air Minum/Mandi
50	Sumber Mata air Pancuran	Montong	Sumberan	80A	-	-	x	-	Air Minum
51	Sumber Mata air Ding Ngacan	Montong	Sumberan	81B	-	-	x	-	Air Minum
52	Sumber Mata air Bendungan	Montong	Sumberan	81B	-	-	x	-	Mandi
53	Sumber Mata air Soding	Montong	Sumberan	83E	-	-	x	-	Air Minum/Mandi
54	Sendang Ngrakas	Montong	Sumberan	82D	-	-	x	-	Mandi
55	Sumber Mata air Mbalong	Montong	Sumberan	83A	-	-	x	-	Mandi
56	Sendang Nongko	Mulyoagung	Mulyoagung	5E	0.10	-	-	-	

Sumber: KPH Parengan Tahun 2011

Lampiran 16. Realisasi Bantuan Dana PKBL di KPH Tuban S/D Agustus Tahun 2011

NO	KPH	TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011	
		Jml LMDH	Rp.	Jml LMDH	Rp.	Jml LMDH	Rp.	Jml LMDH	Rp.	Jml LMDH	Rp.	Jml LMDH	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	TUBAN	3	30,000,000	6	65,000,000	5	44,000,000	9	77,500,000	4	60,000,000	-	-
	JUMLAH	3	30,000,000	6	65,000,000	5	44,000,000	9	77,500,000	4	60,000,000	-	-

Sumber: KPH Tuban, 2012

Lampiran 17. Daftar Jenis Tanaman Tahan Naungan

Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Penggunaan
	Familia Araceae	
Dringo/Jaringo	Acorus calamus	Obat
Suweg	Amorphallus campanulatas	Pangan (umbi)
Iles-iles	Amorphophallus variabilis (A.oncophyllus)	Obat
Tales/Talas	Colocasia esculenta	Pangan (umbi)
Tales Bogor		
Kimpul	Xanthosoma nigrum	Pangan (umbi/sayur)
	Familia Marantaceae	
Garut	Maranta arundinacea	Pangan (umbi)
	Familia Taccaceae	
Gedung Tikus	Tacca palmata	Obat
Uwi-uwian	Familia Dioscoreaceae	
Uwi biasa	Dioscorea alata	Pangan (umbi)
Uwi kelapa		
Uwi buah	Dioscorea bulbifera	Pangan (umbi) obat
Uwi gembili	Dioscorea esculenta	Pangan (umbi)
Uwi aung		
Gadung	Dioscorea hispida	Pangan (umbi)
	Familia Cannaceae	
Ganyol/Ganyong	Canna edulis	Pangan (umbi)/makanan
Senitra		ternak

Empon-empon	Familia Zingiberaceae	
Lengkuas kecil	Languas Officinarum (Alpinia officinarum)	Obat/bumbu
Kapulaga	Amomum cardamomum	Obat/bumbu
Temu kunci	Boesenbergia pandurata (Kaempferia pandurata)	Obat/bumbu
Kamijara	Catimbium malaccensis	Obat
Lengkuas malaka		
Pacing/setawar	Costus spp	Obat
Temu iring	Curcuma aeruginosa	Obat
Temu hitam		
Kunyit/kunir	Curcuma domestica Val.	Obat/bumbu
Kuning/Kunyir	(C. longa)	Bahan Pewarna
Temu giring	Curcuma domestica Val.	Obat
Temu mangga	Curcuma mangga	Bumbu
Temutis	Curcuma purpurascens	Obat
Temu glenyeh	Curcuma soloensis	Obat
Temu lawak	Curcuma Xanthorriza	Obat/Bahan
Koneng gede		
Temu Putih	C.zeodaria	Obat
Kapulaga sabrang	Elettaria cardamomum	Bumbu
Gandasuli	Hedychium coronarium	Obat

Kencur	Kaempferia galanga	Bumbu/obat
Kunci pepet	Kaempferia rotunda	Obat
Kunir putih		
Lengkuas/laos	Languas galanga	Obat/bumbu
Lempuyang	Zingiber aromaticum	Obat
Bengle	Zingiber cassumunar	Obat
Jahe	Zingiber officianale Roxb	Obat/bumbu
	Familia Bromeliaceae	
Nenas	Ananas comosus	Buah
	Familia Orchidaceae	
Panili	Vanilla fragrens	Bumbu
	Familia Piperaceae	
Cabe hutan	Piper bantamense	Obat
Sirih	Piper betel L	Obat/bahan penyegar
Kemukus/marica buntut	Piper cubeba	Obat
Lada hitam/merica	Piper nigrum	Bumbu
Cabe jamu/jawa	Piper retrofactum	Obat/bumbu
Lada panjang	(P.longum)	
Kacang-kacangan	Familia Leguminosae	
Kacang asu	Calapogonium mucunoides	Pupuk hijau
Sentro	Centrosema pubescens	Pupuk hijau/makanan ternak
Jalakan	Desmodium gyroides	Makanan ternak/pupuk hijau

Karawedus Lablab	Dolichos lablab	Sayur
Kara benguk	Mucuna pruriens	Makanan ternak
Bengkuang	Pachyrrhizus erosus	Kosmetik,makanan ternak
Kacang panjang/bayung	Vigna unguiculata var	Sayur
	Familia Convolvulaceae	
Bidara Upas	Merremia mammosa	Obat
	Familia Labiatae	
Janggelan	Mesona Palustris	Agar-agar hitam
Kemangi/Selasi	Ocimum basilicum	Bumbu
Kumis kucing	Orthosiphon aristatus	Obat
Rumput-rumput	Familia Graminae	
Rumput hamil	Brachiaria decumbens	Makanan ternak
	Familia Urticaceae	
Rami	Boehmeria nivea	Serat

Lampiran 18. Pengembangan Komoditi *Agroforestry*

Guna menunjang PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) sampai dengan akhir daur memang diperlukan inovasi-inovasi pengembangan komoditi Afroforestry sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Pola Agroforestry berjalan dinamis sejalan dengan berlakunya waktu. Pada tahun 1-3 petani dapat menanam jenis palawija. Segera setelah lapisan tajuk-tajuk pohon mulai me-naungi, tanaman palawija bisa digantikan dengan tanaman tahan naungan misalnya makanan ternak atau empon-empon. Jenis komoditi Agroforestry dan analisa usaha berikut ini diuraikan komodity agroferesty adalah tanaman: (i) Jahe, (ii) Temulawak, (iii) Kunyit, (iv) Garut, (v) Ganyong, dan (vi) Kopi,

Pertama Jahe

1. Syarat Pertumbuhan

a. Iklim

- Tanaman jahe membutuhkan curah hujan relatif tinggi, yaitu antara 2.500-4.000 mm/tahun.
- Pada umur 2,5 sampai 7 bulan atau lebih tanaman jahe memerlukan sinar matahari. Dengan kata lain penanaman jahe dilakukan di tempat yang terbuka sehingga mendapat sinar matahari sepanjang hari.
- Suhu udara optimum untuk budidaya tanaman jahe antara 20-35 oC.

b. Media Tanam

- Tanaman jahe paling cocok ditanam pada tanah yang subur, gembur dan banyak mengandung humus.
- Tekstur tanah yang baik adalah lempung berpasir, liat berpasir dan tanah laterik.
- Tanaman jahe dapat tumbuh pada keasaman tanah (pH) sekitar 4,3-7,4. Tetapi keasaman tanah (pH) optimum untuk jahe gajah adalah 6,8-7,0.

c. Ketinggian Tempat

- Jahe tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian 0 - 2.000 m dpl.

- Di Indonesia pada umumnya ditanam pada ketinggian 200-600 m dpl.

d. Analisis Ekonomi Budidaya Tanaman

d.1 Analisis Usaha Budidaya

a. Perkiraan analisis usaha budidaya jahe seluas 1 ha; Biaya produksi: Bibit: 2.000 bh @ Rp. 1.700,- = Rp. 3.400.000,-

- Pupuk
  - Pupuk buatan: Urea 165 kg @ Rp. 1.100, = Rp. 181.500,-; TSP 160 kg @ Rp. 1800,- = Rp. 288.000,-; KCl 160 kg @ Rp. 1.600,- = Rp. 256.000,-
  - Pupuk kandang: 3.000 kg @ Rp. 150,- = Rp. 750.000,-
- Obat 20 kg @ Rp. 15.000,- Rp. 300.000,-
- Alat Rp. 180.000,
- Bahan (mulsa) 20.000 m @ Rp. 150,- Rp. 3.000.000,-
- Tenaga kerja 200 OH Rp. 2.000.000,-
- Biaya Lain-lain Rp. 1.000.000,-

Jumlah biaya produksi Rp. 11.355.500,-

1) Penerimaan: 10.000 bh @ 1.500,-= Rp. 15.000.000,-
2) Keuntungan usaha tani Rp. 3.644.500,-

2. Gambaran Peluang Agribisnis

Saat ini permintaan akan jahe oleh negara importir terus mengalami peningkatan, akan tetapi permintaan tersebut belum semuanya dapat dipenuhi mengingat produksi jahe masih terserap oleh kebutuhan dalam negeri. Dilihat dari segi harga setiap tahun hingga saat ini fluktuasi harga jahe basah maupun kering boleh dikatakan stabil. Dilihat dari segi permintaan, stabilitas harga serta produksi jahe dalam negeri prosepek agrobisnis jahe sangat cerah.

Kedua Temulawak

1. Syarat Pertumbuhan

a. Iklim

- Secara alami temulawak tumbuh dengan baik di lahan-lahan yang teduhdan terlindung dari teriknya sinar matahari. Di habitat alami rumpun tanaman ini tumbuh subur di bawah naungan pohon bambu atau jati. Namun demikian temulawak juga dapat dengan mudah ditemukan di tempat yang terik seperti tanah tegalan. Secara umum tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai cuaca di daerah beriklim tropis.
- Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman ini antara 19-30 oC
- Tanaman ini memerlukan curah hujan tahunan antara 1.000-4.000 mm/tahun.

b. Media Tanam

Perakaran temulawak dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah baik tanah berkapur, berpasir, agak berpasir maupun tanah-tanah beratyang berliat. Namun demikian untuk memproduksi rimpang yang optimal diperlu-kan tanah yang subur, gembur dan berdrainase baik. Dengan demikian pemupukan anorganik dan organik diperlukan untuk memberi unsur hara yang cukup dan menjaga struktur tanah agar tetap gembur. Tanah yang mengandung bahan organik diperlukan untuk menjaga agar tanah tidak mudah tergenang air.

c. Ketinggian Tempat

Temulawak dapat tumbuh pada ketinggian tempat 5-1.000 m/dpl dengan ketinggian tempat optimum adalah 750 m/dpl. Kandungan pati tertinggi di dalam rimpang diperoleh pada tanaman yang ditanam pada ketinggian 240 m/dpl. Temulawak yang ditanam di dataran tinggi menghasilkan rimpang yang hanya mengandung sedikit minyak atsiri. Tanaman ini lebih cocok dikembangkan di dataran sedang.

2. Analisis Ekonomi Budidaya Tanaman

a. Analisis Usaha Budidaya

Perkiraan analisis budidaya kunyit seluas 1000 m2

1) Biaya produksi:
   a. Sewa lahan 1 musim tanam Rp. 100.000,-
   b. Bibit 250 kg @ Rp. 700,- Rp. 175.000,-
   c. Pupuk;
   d. Pupuk kandang 1.000 kg @ Rp. 100,- Rp. 100.000,-
      - Pupuk buatan: Urea 13.5 kg @ Rp. 1.200,- Rp. 16.200,-
      - SP-36 10 kg @ Rp. 1700,- Rp. 17.000,-
      - KCl 12.5 kg @ Rp. 1700,- Rp. 21.250,-
   e. Pestisida Rp. 7.000,-
   f. Alat Rp. 20.000,-
   g. Tenaga kerja Rp. 112.000,-
   h. Panen dan pasca panen Rp. 42.000,-
   i. Lain-lain (Pajak 15%) Rp. 91.567,-
   Jumlah biaya produksi Rp. 702.017,-
2) Pendapatan 2.000 kg @ Rp. 500,- Rp.1.000.000,-
3) Keuntungan Rp. 297.983,-

b. Gambaran Peluang Agribisnis

Temulawak merupakan tanaman obat yang secara alami sangat mudah tumbuh di Indonesia dan telah lama digunakan sebagai bahan pembuatan jamu. Setiap produsen jamu baik skala kecil atau skala industri selalu memasukkan temulawak ke dalam racikan jamunya. Rimpang temulawak yang dikeringkan juga sudah merupakan komoditi perdagangan antar negara. Indonesia dengan dukungan kondisi iklim dan tanahnya dapat menjadi produsen dan sekaligus pengekspor utama rimpang temu lawak dengan syarat produks dan kualitas rimpang yang dihasilkan memenuhi syarat. Kuantitas dan kualitas ini dapat ditingkatkan dengan mengubah pola tanam temulawak dari tradisional ke "modern" yang meng-ikuti tata laksana penanaman yang sudah teruji. Selama periode 1985-1989 Indonesia mengekspor temulawak sebanyak 36.602 kg senilai US $ 21.157,2 setiap tahun. Negara pengekspor lainnya adalah Cina, Indo Cina dan Bardabos. Untuk dapat meningkatkan ekspor temulawak diperlukan sosialisasi tanaman temulawak kepada masyarakat

petani dan sekaligus memasyarakat-kan carabudidaya temu lawak yang benar dalam skala yang lebih besar.

Ketiga Kunyit

1. Syarat Pertumbuhan

a. Iklim

- Tanaman kunyit dapat tumbuh baik pada daerah yang memiliki intensitas cahaya penuh atau sedang, sehingga tanaman ini sangat baik hidup pada tempat-tempat terbuka atau sedikit naungan.
- Pertumbuhan terbaik dicapai pada daerah yang memiliki curah hujan 1000-4000 mm/tahun. Bila ditanam di daerah curah hujan < 1000mm/tahun, maka system pengairan harus diusaha-kan cukup dan tertata baik. Tanaman ini dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Pertumbuhan yang paling baik adalah pada penanaman awal musim hujan.
- Suhu udara yang optimum bagi tanaman ini antara 19-30 oC.

b. Media Tanam

- Kunyit tumbuh subur pada tanah gembur, pada tanah yang dicangkuldengan baik akan menghasilkan umbi yang berlimpah.
- Jenis tanah yang diinginkan adalah tanah ringan dengan bahan organiktinggi, tanah lempung berpasir yang terbebas dari genangan air/sedikitbasa.

c. Ketinggian Tempat

Kunyit tumbuh baik di dataran rendah (mulai < 240 m dpl) sampai dataran tinggi (> 2000 m dpl). Produksi optimal + 12 ton/ha dicapai pada ketinggian 45 m dpl.

2. Analisis Ekonomi Budidaya Tanaman

a. Analisis Usaha Budidaya

Perkiraan analisis budidaya kunyit seluas 1000 m2

1) Biaya produksi
   a. Sewa lahan 1 musim tanam Rp. 150.000,-
   b. Bibit 50 kg @ Rp.
   c. Pupuk
      - Pupuk kandang 4.000 kg @ Rp. 150,- Rp. 600.000,-
      - Pupuk buatan: Urea 32 kg @ Rp. 1.100,- Rp. 35.200,-

- TSP 16 kg @ Rp. 1800,- Rp. 28.800,-
- KCl 16 kg @ Rp. 1.600,- Rp. 25.600,-

d. Pestisida Rp. 100.000,-
e. Alat Rp. 60.000,-
f. Tenaga kerja Rp. 200.000,-
g. Panen dan pasca panen Rp. 100.000,-
h. Lain-lain Rp. 100.000,-

Jumlah biaya produksi Rp.1.399.600,-
2) Pendapatan 2.500 kg @ Rp. 750,- Rp.1.875.000,-
3) Keuntungan Rp. 475.400,-

Usaha budidaya tanaman kunyit skala besar (komersial) atau yang dilakukan secara intensif, di Indonesia belum ada dan sebagian besar petani cenderung menanam tanaman ini sebagai tanaman sampingan saja.

b. Gambaran Peluang Agribisnis

Dewasa ini rata-rata kebutuhan bahan baku kunyit untuk industri kosmetik/jamu tradisional yang ada di Indonesia antara 1,5-6 ton/bulan. Tingkat kebutuhan pasar dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan persentase peningkatan 10-25% per tahunnya. Kebutuhan lebih tinggi pada saat menjelang hari-hari besar/hari raya. Permintaan kebutuhan industri di atas sebagian besar berasal dari pasokan para petani. Melihat dari kebutuhan ratarata industri jamu dan kosmetik yang ada di dalam negeri, suplai dan permintaan terhadap kunyit tidak seimbang, apalagi memenuhi permintaanpasar luar negeri. Sementara kebutuhan kunyit dunia hingga saat ini mencapai ratusan ribu ton/tahun. Sebagian kecil dari jumlah tersebut dipenuhi oleh negara India, Haiti, Srilanka, Cina, dan negara-negara lainnya. Indonesia kini sudah selayaknya membudidayakan tanaman ini, terutama dengan sistem monokultur/tumpang sari sehingga produksi yang dicapai lebih cepat dan tinggi, agar kebutuhan minimal dalam negeri terpenuhi secara optimal. Walaupun di daerah Jawa Tengah kini sudah diupayakan system penanaman tersebut, juga diperhitungkan dari sudut produktivitas dan jalur tata niaganya, namun luas lahan tanam yang ada belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri yang mencapai ratusan ribu ton/hanya. Indonesia sebenarnya mulai mengekspor kunyit. Negara yang dituju

antara lain Asia (Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Jepang), Amerika, dan Eropa (Jerman Barat dan Belanda).

Keempat Garut

1. Budidaya tanaman Garut

Tanaman Garut pada umumnya menghendaki tanah yang gembur, karena pada struktur tanah yang gembur umbi dapat tumbuh dengan leluasa. Proses pemanenan juga akan lebih mudah dan cepat apabila kondisi tanah gembur. Untuk memperoleh struktur tanah yang gembur perlu dilakukan pengolahan sebaik mungkin dengan cara membajak atau mencangkul dengan kedalaman 20- 30 cm, agar tanah menjadi semakin gembur maka sebaiknya diberikan kompos atau pupuk kandang sebanyak 25-30 ton per hektar karena kompos atau pupuk kandang tersebut selain menggemburkantanah juga untuk memperkaya kandungan unsur hara di dalam tanah. Tanah diolah dengan membajak atau mencangkul, kemudian dibuat bedengan dengan ukuran panjang sesuai dengan kondisi lahan, lebar 120 cm dan tingginya antara 25- 30 cm. Jarak antara bedengan yang satu dengan yang lain adalah 30-50 cm.

Bertanam garut biasanya dilakukan pada awal musim hujan yaitu sekitar bulan Oktober agar tanaman lebih banyak tertolong pertumbuhan-nya dengan adanya curah hujan. Bibit ditanam pada bedengan-bedengan yang telah disiapkan dengan menggunakan alat tanam seperti cangkul dengan kedalaman yang cukup yaitu antara 8- 15cm. Dalamnya penanaman bibit garut ini bertujuan agar umbi yang ter-bentuk nantinya tidak menonjol ke permukaan tanah. Setelah bibit ditanam selanjutnya lubang tanaman ditutup dengan tanah. Jarak tanam garut yang umumnya digunakan adalah sekitar 37,5 x 75cm

2. Analisa Usaha Tani Garut

Perkiraan analisa ekonomi usahatani garut per musim pada lahan seluas satu hektar adalah sebagai berikut :

A. Biaya Produksi

i. Biaya Sarana Produksi

a. Bibit 3.500 kg @ Rp. 250,:
Rp. 875.000,

Pupuk Kandang 20 ton : Rp. 1.000.000,c.
Pupuk Buatan :
- Urea 350 kg @ Rp. 1.200 , :Rp. 420.000,
- SP36 300 kg @ Rp. 1.600 , :Rp. 480.000,
- KCl 300 kg @ Rp. 1.900, :Rp. 570.000,*2.*

i. Biaya Tenaga Kerja

a. Pengolahan Tanah 100 HKP : Rp. 750.000
b. Pemupukan dan Penanaman 10 HKP + 20 HKW: Rp. 155.000.
c. Pemeliharaan 10 HKP + 50 HKW : Rp. 275.000,
d. Panen dan Pasca Panen 10 HKP + 80 HKW: Rp. 395.000

ii. Biaya Lainlain(tak terduga) : Rp. 400.000,
iii. Nilai Sewa Tanah 1 Tahun : Rp. 1.000.000,
iv. Jumlah : Rp. 6.320.000,

B. Produksi dan Pendapatan

Diasumsikan hasil mencapai 25 ton/ha dengan harga Rp. 400,per kg, maka :

1. Dijual dalam bentuk umbi segar:

a. Hasil penjualan 25.000 kg @ Rp. 400,: Rp. 10.000.000,
b. Biaya produksi : Rp. 6.320.000,
c. Pendapatan (keuntungan) : Rp. 3.680.000,

2. Dijual dalam bentuk olahan :

Bila umbi diolah menjadi tepung garut dengan rendemen 15 % dengan harga jual tepung sebesar Rp. 4.000,per kg, maka :

a. kg @ Rp. 4.000,: Rp. 15.000.000
b. Biaya sarana produksi : Rp. 6.320.000,
c. Biaya pengolahan (umbi à tepung) : Rp. 1.000.000,
d. Pendapatan (keuntungan) : Rp. 7.680.000,

Kelima Ganyong

Budidaya tanaman Ganyong

Tanaman ganyong tidak memerlukan syarat-syarat iklim tertentu yang sulit untuk dipenuhi. Hanya saja tanaman ini tidak tahan di daerah yang anginnya kuat, karena ganyong merupakan tanaman

herba atau terna hingga mempunyai batang yang rapuh dan tidak tahan terhadap serangan angin. tanamanini baru akan tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 250meter dpl. Tetapi hal ini tidak mutlak, karena di Hawai tanaman ini justru berproduksi maksimal pada daerah yang mempunyai ketinggian dibawah 450 meter dpl sementara di Peru, di daerah dengan ketinggian di atas 2.550 meter dpl,ganyong masih mampu tumbuh subur.

Pertumbuhan ganyong di daerah tropis sangat baik sekali. Di daerah yang sangat dingin tanaman ini juga dapat hidup, tetapi proses pembentukan umbi untuk menuju dewasa cukup lama. Di daerah yang suhu udaranya pada siang hari sangat tinggi dan pada malam harinya sangat rendah, tanaman inipun mampu hidup dan berkembang biak dengan baik. Misalnya di daerah Aparimacgorge/ Peru yang pada siang hari bersuhu 32 0 C dan pada malam hari cuma 7 0 C. Kenyataan-nya tanaman ganyong tersebar luas di daerah tersebut.

Keenam Kopi

Budidaya Tanaman KOPI

Secara ekonomis pertumbuhan dan produksi tanaman kopi sangat tergantung pada atau dipengaruhi oleh keadaan iklim dan tanah. Kebutuhan pokok lainnya yang tak dapat diabaikan adalah mencari bibit unggul yang produksinya tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit. Setelah persyaratan tersebut dapat dipenuhi, suatu hal yang juga penting adalah pemeliharaan, seperti: pemupukan, pemangkasan, pohon peneduh, dan pemberantasan hama dan penyakit.

Iklim yang Cocok untuk Tanaman Kopi

Persyaratan iklim kopi Arabika :

- Garis lintang 6-9o LU sampai 24o LS.
- Tinggi tempat 1250 s/d 1.850 m dpl.
- Curah hujan 1.500 s/d 2.500 mm/th.
- Bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan) 1-3 bulan.
- Suhu udara rata-rata 17-21o C.
- Persyaratan iklim Kopi Robusta :
- Garis lintang 20o LS sampai 20o LU.

- Tinggi tempat 300 s/d 1.500 m dpl.
- Curah hujan 1.500 s/d 2.500 mm/th.
- Bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan) 1-3 bulan.

Suhu udara rata-rata 21-24o C.

Pengaruh angin :

Pohon tanaman kopi tidak tahan terhadap goncangan angin kencang, lebih-lebih dimusim kemarau. Karena angin itu mempertinggi penguapan air pada permukaan tanah perkebunan. Selain mempertinggi penguapan, angin dapat juga mematahkan dan merebahkan pohon pelindung yang tinggi, sehingga merusakkan tanaman di bawahnya.

Lampiran 19.
Data Reboisasi KPH Tuban Tahun 2005 s/d. 2009 dan Rencana Tahun 2010

No.	Kabupaten	Sistim Tanam	2005	2006	2007	2008	2009	Renc. 2010
1	Tuban	TS	525,0	1.197,8	1.502,2	1.664,9	2.290,9	1.605,5
		BH	-	104,7	285,3	202,1	215,0	368,4
2	Lamongan	TS	118,3	95,3	202,5	233,6	177,4	352,3
		BH	-	90,3	105,6	227,0	132,6	156,7
3	Gresik	TS	7,5	22,5	-	-	-	1,5
		BH	-	36,8	48,9	60,1	84,1	2,5
	Jumlah	TS	650,8	1.315,6	1.704,7	1.898,5	2.468,3	1.959,3
		BH	-	231,8	439,8	489,2	431,7	527,6
	TOTAL	BH	650,8	1.547,4	2.144,5	2.387,7	2.900,0	2.468,9

Sumber: KPH Tuban 2011

Lampiran 20. Kritik Pakde Karwo kepada Perhutani Unit II Jawa Timur

SURABAYA: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak Perum Perhutani dapat membenahi program penanaman hutan bersama masyarakat (PHBM) agar bisa lebih efektif menyusul banyaknya keluhan masyarakat sekitar hutan atas program itu, padahal 9,81 juta jiwa penduduk Jatim berada disekitar hutan.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengkritisi program PHBM yang dikelola Perhutani khususnya Unit II yang berlokasi di Jatim banyak dikritik masyarakat.

"Dari kritik yang masuk, tingkat efektifitasannya rendah ditaksir mencapai sekitar 25%-30%. Masyarakat menilai kepentingannya tidak banyak tertampung dengan program PHBM, atau program itu [PHBM] lebih berorientasi pada tujuan Perhutani an sich," kata Soekarwo seusai Deklarasi Green Spirit Jatim di Puspa Agro, Sidoarjo, hari ini, (Selasa, 25/10).

Secara khusus Soekarwo menerangkan luas hutan 1,36 juta hektare atau 28,54% dari luas daratan yang ada.

Dari total luas hutan itu terbagi atas hutan lindung 315.505,30 Ha, hutan konservasi 233.828,50 Ha, dan hutan produksi seluas 815.062,02 Ha.

"Faktanya, dari kawasan hutan itu, 82,8 % dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Jatim. Pada kontek itu maka efektifitas PHBM menjadi penting agar pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bisa lebih masif," ujarnya.

Soekarwo menerangkan ada 9,81 juta jiwa penduduk Jatim yang hidup disekitar hutan yang berada di 2.092 desa pada 454 kecamatan.

"Faktanya lagi, dari total penduduk disekitar hutan itu ternyata mayoritas berada diareal lahan hutan Perum Perhutani. Tepatnya 8,55 juta jiwa di 1.961 desa pada 412 kecamatan."

Dia meminta ada evaluasi PHBM sehingga kemauan masyarakat dapat terwadahi.

"Artinya Perum Perhutani bisa lebih mengetahui aspirasi masyarakat sekitar hutan, aspirasi itu yang jadi landasan kebijakan dalam realisasi PHBM. Bila itu dilakukan dipastikan PHBM akan bisa efektif dan berdaya guna dalam meningkatkan tarif hidup masyarakat desa hutan," ujarnya.

Soekarwo yakin dengan fakta data itu maka Perhutani Unit II Jatim akan dapat menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa di Jatim.

"Jadi fakta bila ada sekitar 24,6 % desa yang berada di sekitar hutan dan masyarakat sekitar hutan yang bisa diberdayakan mencapai sekitar 22,6 %, bukan hanya angka saja tapi menjadi sesuatu yang konkrit."(api) http://www.bisnis.com/articles/perhutani-jatim-diminta-benahi-phbm-agar-efektif diakses 4 Maret 2012, jam 10.02

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/251/KPTS/013/2006

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI
PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara optimum, maka perlu membentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Forum Komunikasi Pengelolaan Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Provinsi Jawa Timur, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. melaksanakan peningkatan Program Pengelolaan Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bersama semua pihak baik aparat Dinas/Instansi terkait, Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan para pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) ;

2. melaksanakan komunikasi secara berkala antar anggota Forum Komunikasi Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menyangkut semua kegiatan PHBM ;
3. menyusun Program Pengelolaan Pemberdayaan Hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Masyarakat Desa Hutan serta *stakeholders* lainnya dengan jiwa berbagi (*sharing*) pemantapan hutan secara lestari ;
4. memfasilitasi program-program pembangunan desa sekitar hutan melalui sistem pengelolaan sumber daya hutan yang diarahkan menjadi tanggung jawab bersama sesuai tugas dan tanggung jawab Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Masyarakat Desa Hutan dan *stakeholders* lainnya ;
5. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat Desa Hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk dapat meningkatkan peran serta secara aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan ;
6. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) secara berkala ;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Biaya Perum Perhutani Unit II Jawa Timur serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat..

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/KPTS/013/2001 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2006

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 12-09-2006 No. 251 Th 2006/E2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2006
NOMOR : 188/251/KPTS/013/2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI
PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	a. Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4.	Ketua Harian	Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
5.	a. Sekretaris I	Kepala Biro Pembinaan Sumberdaya Hutan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
	b. Sekretaris II	Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
6.	Anggota-anggota :	a. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur b. Wakil dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c. Wakil dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur e. Wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Timur f. Wakil dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur i. Wakil dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur j. Wakil dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

NO	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
		k. Wakil dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur l. Wakil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur m. Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur n. Wakil dari Forum Komunikasi LSM Provinsi Jawa Timur o. Wakil dari Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Brawijaya Malang p. Wakil dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya q. Wakil dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan "Veteran" Nasional Surabaya r. Wakil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas s. Wakil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean Madura t. Wakil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 12-09-2006 No. 251 Th 2006/E2

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Kepala Perum Perhutani II Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Anggota Forum Komunikasi dimaksud.

Lampiran 22

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan RA. Kartini No. 2 Telp. (0356) 321023
T U B A N - 62311

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RISET / PKL / KKN
Nomor : 072 / 1195 / 414.107 / 2011

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakukitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tanggal 03 nopember 2011 Nomor : 2415/ H3.1.7/PPd/2011 perihal Ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan mengijinkan Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswa Universitas Airlangga atas nama:

N a m a	: **Drs. H. MOH ADIB,MA dkk**
Departemen	: Antropologi
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Tuban
Waktu Pelaksanaan	: 10 Nopember 2011 s/d 10 Pebruari 2012
Judul Penelitian	: Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Sosial-Budaya dan Ekonomi (Studi Antropologi Pada 3 Desa di Kecamatan Kerek,Kabupaten Tuban.
Peserta	: 6 (Enam) Orang sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat;
2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan – perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar yang telah ditetapkan tersebut diatas;
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Bupati Tuban Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tuban;
5. Dalam pelaksaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban yang merupakan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954;
6. Surat Keterangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Tanggal : 09 Nopember 2011

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TUBAN

Drs. TEGUH SETYOBUDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19630428 199203 1 008

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Camat Kerek Kabupaten Tuban
4. Yth. Kepala Perum Perhutani Unit 2 Jatim u.b. Kepala Biro Perlindungan SDH Surabaya
5. Yth. Kepala Desa Sidonganti, Trantang dan Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
6. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
7. Yth. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN **SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RISET / PKL / KKN**
Nomor : 072 / 1195 / 414.107 / 2011

NO	NAMA	Jabatan
1	Drs. H. Moh. Adib,MA.	Dosen
2	Drs. Pudjio Santoso	Dosen
3	Aditya Mahendra Putra	Mahasiswa
4	Yudha Pratama	Mahasiswa
5	Rizki Ramadhan	Mahasiswa
6	Adhi Yoga Mahendra	Mahasiswa

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TUBAN

Drs. TEGUH SETYOBUDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 1630428 199203 1 008

Lampiran 23

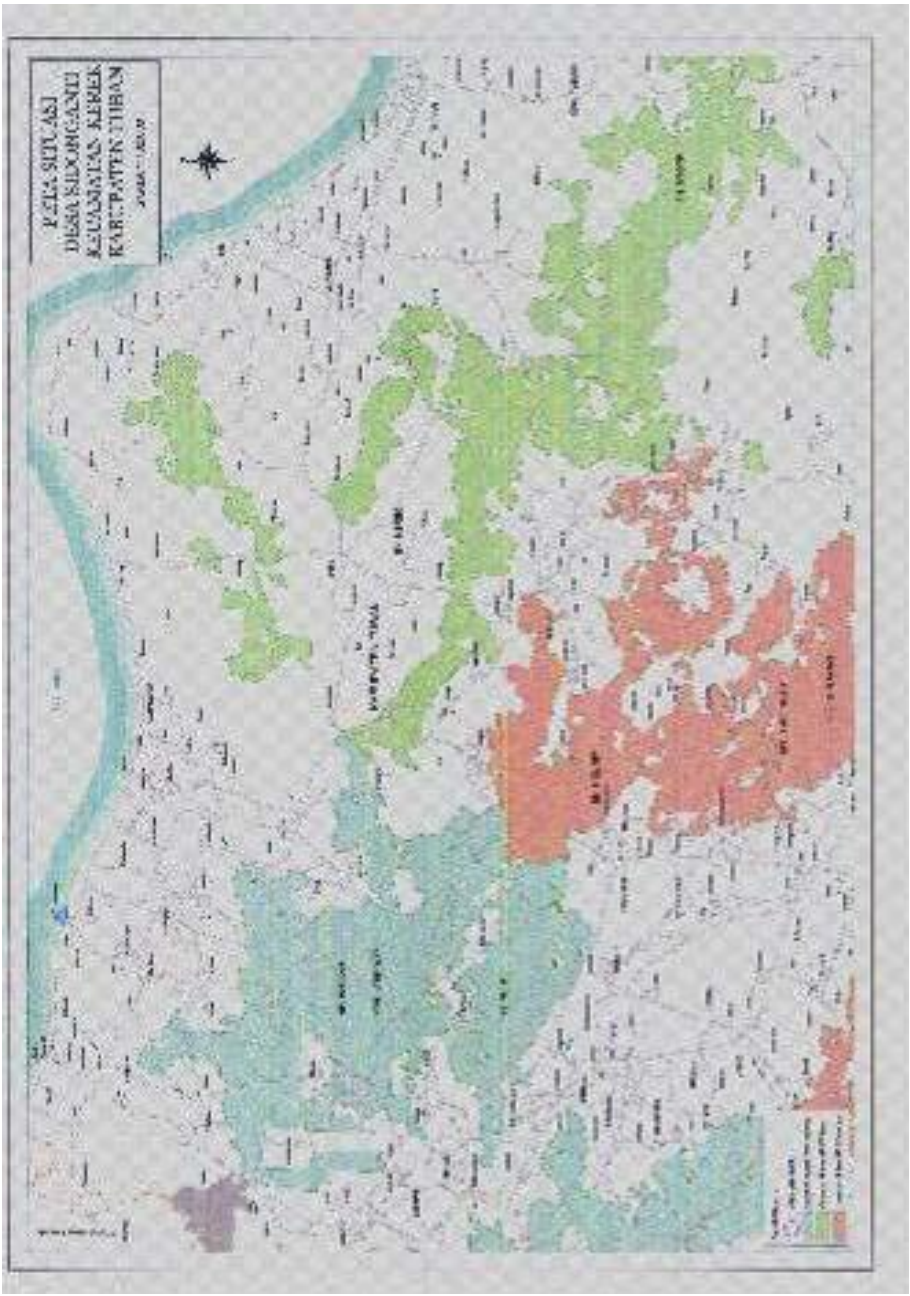
PETA SITUASI
DESA SIDONGANTI
KECAMATAN KEREK
KABUPATEN TUBAN

Lampiran 24

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

KAJIAN SOSIAL –ANTROPOLOGI PADA MASYARAKAT DESA SIDONGANTI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

Kabupaten Tuban

Dalam rangka upaya memutus matarantai kemiskinan, kebodohoan, dan kriminalitas

DEP. ANTROPOLOGI FISIP UNAIR
hmadib@unair.ac.id http://madib.unair.ac.id
MEI-2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- "Manusialah yang harus didahulukan, bukan Kapital." Begitu, pernyataaan Sjafrudin Prawiranegara dalam bukunya yang berjudul *Membangun Kembali Ekonomi Indonesia*, pada tahun 1966.
- Masuknya teknologi modern ke pedesaan menimbulkan dilema. Di satu pihak masuknya teknologi menghancurkan pranata-pranata tradisional yang berfungsi mencegah terjadinya polarisasi, namun di pihak lain tanpa teknologi modern perekonomian desa mengalami kemandegan (stagnasi) (Hayami dan Masao Kikuchi (1987: 267),
- C. Geertz (1976) yang melihat masyarakat pedesaan di Jawa hanya mengalami perubahan yang bersifat ke dalam (involusi), sehingga kemiskinan yang dialami tidak makin berkurang tetapi malah makin merata (*shared poverty*).
- Data dari Kemenhut (2003) menjelaskan bahwa dari 25.068 desa (30.351.371 KK) di seluruh wilayah Jawa-Madura terdapat 5.603 desa (22.35%) terletak di sekitar kawasan hutan. Di samping itu, terdapat 5.073 desa dengan: (i) 536.350 KK yang tinggal di wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor; (ii) 76.245 KK tinggal di daerah rawan longsor, tersebar di 1.970 desa; (iii) 2.744 rumah di bantaran sungai yang ditinggali oleh 3.055 KK berada di daerah rawan banjir bandang, yang tersebar di 257 desa; dan (iv) 457.060 KK tinggal pada daerah rawan bencana banjir tahunan (reguler) yang tersebar di 2.846 desa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa sekitar hutan yang ada di pulau Jawa lebih dikarenakan kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga "menggerogoti" area hutan yang ada di sekitarnya.
- Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani masih rawan gangguan keamanan hutan. Hal ini mengakibatkan penurunan potensi sumber daya hutan yang cukup tajam. Akar masalah terjadinya gangguan keamanan hutan ini disebabkan dua faktor yaitu (i) eksternal dan (ii) internal (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 2011).

B. Maksud dan Tujuan

- Menyediakan data lapangan yang memadai sebagai dasar dalam pemberdayakan--peningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian hutan, dan peningkatan produksi hutan;
- Mengidentifikasi akar permasalahan dalam perilaku perusakan dan pencurian kayu hutan dalam pengelolaan Perum Perhutani.
- Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan dan pemberdayaan dalam pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ssidonganti
- Menyusun model pemberdayaan masyarakat yang efektif di sekitar kawasan hutan.

.

II. METODE PENELITIAN

- Wawancara
- Pengamatan terlibat
- FGD *(Focused Group Discussion)*.

.

II. PROFIL DESA SIDONGANTI

- Sejarah

- Bagong (yang disebut guru) dan Lempar (murid) di alas *Ndelong*
- ←Raden Said (Sunan Kalijogo)

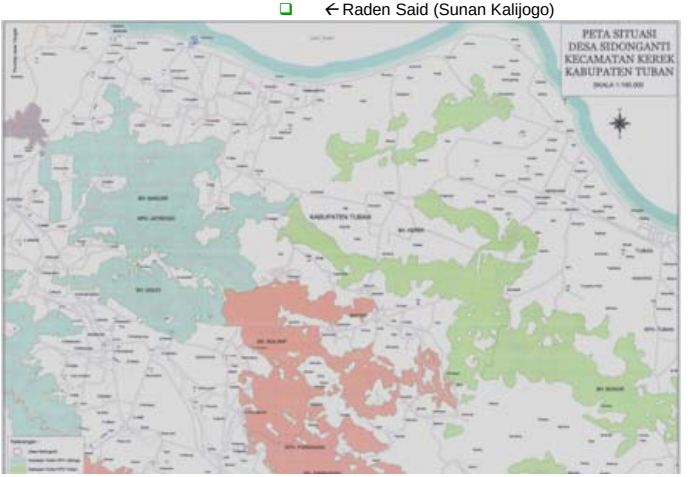

II. PROFIL DESA SIDONGANTI

- Demografi

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	0 – 5	151 orang	3,49 %
2	6 – 10	251 orang	5,80 %
3	11 – 15	273 orang	6,30 %
4	16 – 20	335 orang	7,75 %
5	21 – 25	379 orang	8,75 %
6	26 – 30	402 orang	9,28 %
7	31 – 35	409 orang	9,44 %
8	36 – 40	410 orang	9,47 %
9	41 – 45	398 orang	9,20 %
10	46 – 50	311 orang	7,20 %
11	51 – 55	256 orang	5,91 %
12	56 – 60	162 orang	3,74 %
13	>61	493 orang	11,39%
Jumlah Total		**4.330 orang**	**100%**

II. PROFIL DESA SIDONGANTI

- Pendidikan

No.	Tamatan Sekolah	Jumlah	Persentase
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun ke atas	2230 orang	50 %
2	Pra-Sekolah	52 orang	1,20 %
3	Tidak Tamat SD	893 orang	21 %
4	Tamat Sekolah SD	1.026 orang	24 %
5	Tamat Sekolah SMP	103 orang	2,38 %
6	Tamat Sekolah SMA	26 orang	0,60 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	6 orang	0,14 %
Jumlah Total		4.330 orang	100 %

II. PROFIL DESA SIDONGANTI

- Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentese
1	Pertanian	4.114 orang	97.44%
2	Jasa / perdagangan		0.23%
	a. Jasa Pemerintahan	10 orang	
	b. Jasa Perdagangan	75 orang	1.77%
	c. Jasa Angkutan	23 orang	0.54%
	d. Jasa Keterampilan	-	
	e. Jasa lainnya	-	
3	Sektor Industri	-	
4	Sektor Lain	-	
	Jumlah	4.222 orang	100%

II. PROFIL DESA SIDONGANTI

- Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentese
1	Pertanian	4.114 orang	97.44%
2	Jasa / perdagangan		0.23%
	a. Jasa Pemerintahan	10 orang	
	b. Jasa Perdagangan	75 orang	1.77%
	c. Jasa Angkutan	23 orang	0.54%
	d. Jasa Keterampilan	-	
	e. Jasa lainnya	-	
3	Sektor Industri	-	
4	Sektor Lain	-	
	Jumlah	4.222 orang	100%

INTERAKSI MASYARAKAT PADA HUTAN

- FORKOM PHBM BELUM TERBENTUK DI TU

- Bupati Tuban telah semakin terbuka dalam pembentukan Forkom BHBM

INTERAKSI MASYARAKAT PADA HUTAN

- KEAMANAN HUTAN
- Prevemtif

- mengadakan patroli intensif, peningkatan kinerja personil internal, dan kerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa hutan);
- Memfasilitasi kebutuhan kayu bagi MDH (Masyarakat Desa Hutan) dan industri kayu atau mebel di sekitar hutan melalui implementasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) industri mebel dengan mekanisme yang jelas;
- Pembinaan pemeriksaan rutin terhadap industri kayu / mebel secara bersama dengan instansi terkait; dan
- Koordinasi dengan instansi dan aparat

INTERAKSI MASYARAKAT PADA HUTAN

- TENURIAL

- adanya anggapan dari masyarakat yang tentang kawasan hutan: (i) bahwa lahan hutan yang dikuasai adalah milik leluhur atau nenek moyang tanpa didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atau tanpa melalui proses perijinan;

IV. MODEL PEMBERDAYAAN

1. Enabling, Empowering, dan Protecting

1. Enabling:

(i) mengkomunikasikan dan mendiskusikan dengan Forkom LMDH dalam penyusunan program Tahunan, Semesteran, Triwulan dalam pengelolaan SDH (Sumber Daya hutan);

(ii) Mendiskusikan bersama Forkom LMDH tentang problem-problem dan penyusunan solusi dalam pengelolaan SDH;

(iii) mendialogkan penyusunan zonasi pengelolaan SDH (Zona Ekologi, Zona Enonomi, dan Zona Bisnis) di Kabupaten Tuban;

(iv) Mendialogkan pola dan bentuk Demplot (Demonstrasi dan Ploting) pengelolaan SDH;

(v) pembuatan persemaian bibit bersama LMDH atau kelompok tani hutan;

(vi) Penentuan jenis tanaman FGS *(Fast Growing Species)*, seperti tanaman Sengon, Jabon, dan lain-lain; dan

(vii) Mendialogkan penerapan sistem *Agro Foresty*.;

IV. MODEL PEMBERDAYAAN

1. Enabling, Empowering, dan Protecting

2. Empowering:
Térbentuknya LMDH “Sido Makmur” pada tahun 2006 dan telah berbadan hukum nomor pendirian No.3905. Setelah terbentuk, sebaiknya dilakukan penguatan-penguatan dengan sejumlah pelatihan dan pendampingan antara lain:

(i) organisasi dan kepengurusan;
(ii) Pelatihan resolusi dan rekonsiliasi konflik;
(iii) Kewirausahaan dan usaha produktif;
(iv) Pelatihan agro foresty;
(v) pembentukan Koperasi LMDH “Sidomakmur” di Desa Sidonganti.

IV. Model Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

2. Penguatan Kelembagaan LMDH dan KOPERASI

.

No.	K P H	TAHUN									
		2010					2011				
		Pemula	Muda	Madya	Mandiri	Jumlah	Pemula	Muda	Madya	Mandiri	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Jatirogo	-	12	15	-	27	-	14	15	-	29
2	Parengan	-	3	50	-	53	1	10	106	5	122
3	Tuban	1	35	36	-	72	-	18	33	-	51
JUMLAH		1	50	101	-	152	1	42	154	5	202

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 2012, *Diolah*.

IV. Model Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

3. Pendekatan Hati dan Perut
4. Air: Entry Point Pelestarian Hutan
5. Penataan Zonasi (Ekologi, Ekonomi, Sosial)

Model Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

6. Pengembangan Jaringan (Networking)

Adapun para pemangku kepentingan yang terliput dalam jaringan sosial tersebut adalah:

(i) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
(ii) Badan Usaha Nasional PT Semen Gresik;
(iii) Penegak Hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman;
(iv) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

V. Kesimpulan

"Opname" kebudayaan:

(i) Masyarakat Sidonganti mayoritas penduduknya adalah miskin harus dilakukan pemutusan matarantai kemiskinan dengan pengembangan SDM.
(ii) Faktor eksternal (Sidonganti)
(iii) Faktor internal Kelembagaan Desa;
(iv) Pelestarian Hutan dengan penanaman pohon jenis FGS.

V. Lampiran
Road Map Model Pemberdayaan

No.	Isu-isu Strategis	Faktor Penyebab	Kendala	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana/ Keterangan
1	Masyarakat - eksternal	krisis multi-dimensi	Petugas/aparat yang ter-kontaminasi"/" Tercemar" dalam penegakan kebaikan/ keberanan	Memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, im-moralitas	Pendidikan formal, informal, non formal, dan pelatihan	
	- internal	1. sosial budaya kehidupan masya-rakat;	mata pencaharian	Enomomi-Industri	Pendirian Pabrik/industri skala kecil dan menengah	
		2. gangguan penyakit Masya-rakat;	tidak merasa sakit	Pendekatan/ metode	Ilmu Pengetahuan-Teknologi	
		3. politik-regulasi;	Komitmen eksekutif-legislatif-yudikatif dan lembaga masyarakat	Audiensi, inisiasi, dialog, dan komunikasi	- Peraturan/ - perundangan dan penegakan hukum	
		4. ekonomi.	Terbatasnya SD (Sumber Daya) lahan dan SD Manusia	Pelatihan	Demplot/ Percontohan bibit dan agroforesty	
2.	Pelestarian Lingkungan dan Penataan Zonasi	Jangka Pendek	- Kurang Komunikasi-koordinasi - Lemahnya komitmen	Fasilitasi pembibitan dan penanaman	Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara	

V. Lampiran
Road Map Model Pemberdayaan

No.	Isu-isu Strategis	Faktor Penyebab	Kendala	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana/ Keterangan
2.	Pelestarian Lingkungan dan Penataan Zonasi (Ekologi, Ekonomi, dan Bisnis)	Jangka Pendek	- Kurang Komunikasi-koordinasi - Lemahnya komitmen	Fasilitasi pembibitan dan penanaman	Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara	
		Jangka Menengah	Lemahnya komitmen	Fasilitasi pembibitan dan penanaman	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara	
		Jangka Panjang	Lemahnya komitmen dan penetapan visi	Pelatihan dan fasilitasi	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara	
3.	Produksi	- Tidak pernah tumbuh hutan (Wilayah Tuban Barat)	Lemahnya komitmen dan penetapan visi, misi, dan strategi	Pelatihan dan fasilitasi	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara	

V. Lampiran
Road Map Model Pemberdayaan

No.	Isu-isu Strategis	Faktor Penyebab	Kendala	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana/ Keterangan
3.	Produksi	- Tidak pernah tumbuh hutan (Wilayah Tuban Barat)	Lemahnya komitmen dan penetapan visi, misi, dan strategi	Pelatihan dan fasilitasi	Realisasi Demplot/ Percontohan hutan rakyat dan hutan negara	

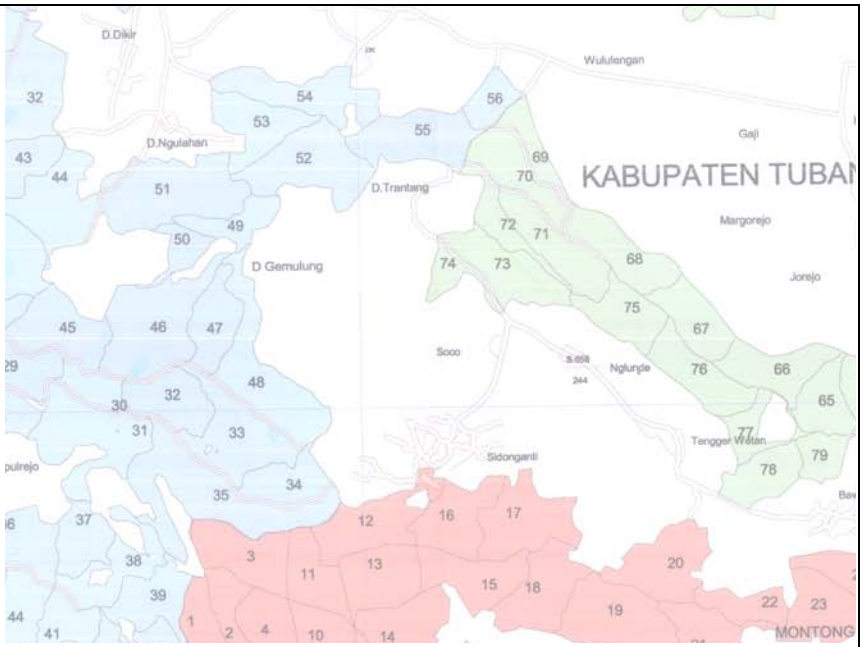

Terima Kasih

BIODATA PENULIS

Drs. H. Mohammad Adib, MA. Lahir di Jombang, pada 28 Nopember 1960, adalah Lulusan Filsafat Barat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1986). Pendidikan S-2 dan gelar MA nya diperoleh di Departemen Antropologi Universitas Indonesia Kampus Salemba Jakarta (1999). Kandidat Doktor dari Universitas Airlangga (2012). Ia adalah dosen pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1987. Jabatan fungsionalnya adalah Lekrot Kepala; Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan LPPM UNAIR (2008-); Pengurus LLI (Lembaga Lansia Indonesia) Propinsi Jawa Timur (2003-sekarang); Pengurus Komda (Komisi Daerah) Lansia Provinsi Jawa Timur (2007-2010 dan 2010-2013).

Tulisan-tulisannya antara lain, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan* (2010), *Syahwat (Meningkatkan Kesejahteraan) Lansia* (2009), *Optimalisasi Fungsi Komisi Lansia* (Editor, 2008), dan *Ecxellence with Morality: Mutiara Jatidiri Univrsitas Airlangga dan Identias Kebangsaan* (Editor, 2010).

Tulisan-tulisan tersebut umumnya merupakan peredaksian kembali dari sejumlah tulisan yang pernah dimuat diberbagai media massa seperti *Jawa Pos, Surya, Surabaya Post, Pelita, Berita Buana, Rapublika, Media Indonesia,* dan *Kompas.*

Penulis ini berlamat tempat tinggal di Jl. Gebang Putih (Puskesmas) 64 Surabaya 60117. Email: hmadib@unair.ac.id. Tulisan dan diskusi dapat diakses di WebBlog: http://madib.blog.unair.ac.id. *Phone Cell* dan *WhatsApps Messanger* yang dapat dihubungi di GSM: 081-551-M-ADIB (6-2342).

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

Pemberdayaan tidaklah hanya dikebiri pengertiannya hanya sebagai partisipasi dan mobilisasi. Ia lebih dimaknakan sebagai penciptaan suasana (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*). Model pemberdayaan masyarakat yang tidak setengah hati di sekitar kawasan hutan adalah dilakukan dengan meningkatkan penguatan kelembagaan berbasis masyarakat desa sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrol seluruh aktivitas program. Para pemangku kepentingan (*stake holders*) di berbagai level hendaknya memerankan posisi dan meneguhkan komitmen sebagai fasilitator, negosiator, dan motivator.

Buku ini diterbitkan bekerja sama :

PERHUTANI

PMN

ISBN 978-602-7508-03-3
9 786027 508033